

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PEMERINTAHAN GAMPONG (DESA) DI WILAYAH PESISIR KOTA LHOKSEUMAWE

Muhammad Fazil<sup>1)</sup>, Awaluddin Arifin<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Malikussaleh. email: *mfazil@unimal.ac.id*

<sup>2)</sup> Universitas Malikussaleh. email: *awaludin.arifin@unimal.ac.id*

### ABSTRAK

Pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dari kota sampai ke desa (gampong). Tidak terlepas dalam wilayah pesisir yang selama ini dirasakan tertinggal. Studi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat gampong dalam wilayah pesisir kota Lhokseumawe menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi dan menganalisa realisasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan gampong di wilayah pesisir kota Lhokseumawe. Fokus pada pemerintahan gampong Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dilakukan dalam penelitian ini pada pemerintahan gampong di wilayah pesisir Kota Lhokseumawe, dimana penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive* sampling dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mendapati bahwa realisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan gampong di wilayah pesisir kota Lhokseumawe telah mengalami beberapa perubahan dengan kehadiran teknologi komputer dan internet. Pemanfaatan aplikasi *Microsoft office* berfungsi sebagai pusat pengolahan, penyimpanan dan percetakan. Peningkatan produktivitas dan kecepatan dalam mengolah dokumen, surat menyurat dan laporan serta membagikannya kepada seluruh stakeholder dengan cepat (*realtime*). Selanjutnya pemanfaatan internet telah meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil, memudahkan dalam mengedit, mengolah data, menghemat tenaga, dan sangat dipermudah pada administrasi perkantoran. Terutama dalam penerapan aplikasi e-Planning dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

**Kata Kunci:** *Pemanfaatan, Teknologi informasi dan komunikasi, Wilayah Pesisir, Komunikasi Pemerintahan.*

### PENDAHULUAN

Kehadiran era komunikasi global ketika ini telah membuat perangkat teknologi informasi berupa internet bukan lagi barang asing. Akan tetapi kehadiran internet telah membuka akses jarak yang jauh makin dekat dan memberikan efisiensi waktu yang sangat berguna. Teknologi diperkenalkan untuk membantu memudahkan aktivitas manusia, yang kemudian berkembang

memasuki sendi-sendi kehidupan (Pacey, 1983). Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai aplikasi dapat digunakan untuk kemudahan dan kelancaran segala urusan manusia, seperti penggunaan aplikasi web, email, media dan jejaring sosial, bahkan teleconference dan lain sebagainya.

Di Indonesia, UU No. 6 Tahun 2014 menjadi payung hukum utama dalam rangka pembangunan desa era baru. UU ini juga mengamankan beberapa faktor Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan desa. Ini paling jelas adalah Pasal 86 mengenai Sistem Informasi Desa, dan beberapa pasal terkait pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Program-program pembangunan desa perlu digagas oleh berbagai komponen dalam pemerintahan. Terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang pemerintahan desa dengan baik dan benar. Hal ini merupakan respons *counter active* atas arus globalisasi dan teknologi di berbagai bidang dalam pemerintahan sampai ke level terendah yaitu pedesaan.

Dalam pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi sendiri telah ada dengan berbagai macam program seperti: e-government, e-learning, e-commerce. Walaupun kontennya sendiri sangat bergantung pada penetrasi akses ke internet dan inovasi-inovasi baru *software*. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memainkan peranan yang besar di dalam mendukung *good governance* melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberi ketegasan dalam hal ini. Dan ini sangat tergantung kepada pengelola pemerintahan dan peran aktif masyarakatnya sehingga *good governance* ini bisa direalisasikan dan bukan hanya sekedar mitos belaka.

Dalam penyampaian informasi pada warga masyarakat dengan berbagai latar belakang dan karakteristik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu cara dalam meningkatkan dialog antar pemerintah dengan masyarakat. Baik itu dalam proses pelayanan administrasi maupun pelayanan publik guna membentuk pemerintahan yang lebih transparan. Hal ini juga bisa menawarkan potensi partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk ikut serta dalam

proses pembangunan daerah. Walaupun kemudian hadir kesenjangan teknologi dan digital antar wilayah dalam sesebuah daerah seperti belum meratanya infrastruktur, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia dalam penerapan teknologi. Selanjutnya berpotensi tidak menjadi prioritas utama oleh beberapa pemerintahan, khususnya pada pemerintahan tingkat desa (gampong).

Masyarakat pesisir di Indonesia, mempunyai kehidupan yang berbeda, menghadapi keadaan ekosistem yang keras, dan ketergantungan sumber kehidupan pada sumberdaya pesisir dan laut. Kehidupan dalam masyarakat pesisir terutama pesisir pedalaman masih dalam persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini tentu berkaitan dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga beberapa daerah komunitas perkampungan pesisir masih tertinggal. Persoalan utama adalah rendahnya taraf hidup dan akses yang terbatas akan aset dan sumber-sumber pembiayaan bagi kawasan pesisir adalah hal yang sering dijumpai untuk wilayah ini. Namun demikian sifat masyarakat pesisir yang cepat dan relatif terbuka terhadap pembaharuan, telah menunjukkan adanya peningkatan penggunaan teknologi yang pesat, terutama pada perkampungan pesisir yang teknosentrik, dimana fokusnya adalah ketersediaan teknologi lebih penting ketimbang kebutuhan pengguna teknologi itu sendiri (Nurudin, 2017;94)

Kota Lhokseumawe, dari karakteristik wilayahnya yang berbatasan langsung dengan laut Selat Malaka, mempunyai Koordinat : 5°7'0"LU 97°2'0"BT, Total 181 km<sup>2</sup> (70 mil<sup>2</sup>), Total Penduduk 179,807, Kepadatan 950/km<sup>2</sup> (2,400/sq mi) dan dengan 68 gampong yang tersebar dalam empat kecamatan ([www.bappedalhokseumawe.web.id](http://www.bappedalhokseumawe.web.id), 2019 diakses 14 Agustus 2019), merupakan pemerintahan kota yang giat terus berupaya menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung administrasi organisasi agar lebih efektif dan efisien. Kota Lhokseumawe mempunyai beberapa gampong (desa) yang letaknya di wilayah pesisir pantai. Sebagaimana besar daerahnya berada dalam wilayah pesisir secara karakteristik pantainya landai atau dataran, Pesisir datar hingga landai menempati bagian mintakat kraton atau pantai cekungan. Beberapa desa atau gampong yang berada langsung berhadapan dengan laut selat Malaka seperti

Ujong Blang, Ulee Jalan, Hagu Barat Laut, Hagu Teungoh, Hagu Selatan, Kampung Jawa Lama, dan Pusong Baru di Kecamatan Banda Sakti. Untuk Kecamatan Muara Satu ada Gampong Blang Naleung Mameuh, Rancong. Kecamatan Blang Mangat terdiri dari Kuala, Blang Cut, Mesjid Meuraksa, Jambo Timu, Tunong.

Wilayah Pesisir di kota Lhokseumawe sebagaimana wilayah pesisir lainnya yang merupakan wilayah yang khas karena merupakan pesisir pantai yang rendah permukaan antara daratan dan lautan, hal ini berpengaruh terhadap kondisi fisik dimana pada umumnya daerah yang berada di sekitar laut memiliki kontur yang relatif datar. Dari karakteristik ekosistem Pesisir, wilayah pesisir kota Lhokseumawe merupakan wilayah di perairan laut dangkal pada umumnya seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove pada sisi rawa yang melindungi daratan dari lautan seperti tertera dalam UU No.4/1982 dan UU No. 5/1990. Dimana dari segi ekonomi, sosial dan budaya dengan penduduk mempunyai kegiatan sosial ekonomi yang berorientasi ke air dan darat, rata-rata penduduk dengan ekonomi lemah, dengan latar belakang pendidikan yang relatif terbatas, pengetahuan akan lingkungan sehat juga cenderung kurang, terjadi kebiasaan tidak sadar lingkungan serta kurang memperhatikan bahaya dan resiko. Walaupun beberapa kawasan sudah sadar dengan memanfaatkan kawasannya menjadi objek wisata seperti gampong-gampong yang berada di pesisir kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe.

Dari observasi awal peneliti dalam pemanfaatan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi bahwa terlihat adanya komitmen pemerintah dalam memberi dukungan akan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembangunan di wilayahnya, terutama peningkatan perbaikan proses administrasi pemerintahan gampong, pelayanan publik dan perbaikan *database* maupun dalam mendukung promosi pariwisata bahari di kota Lhokseumawe terutama bagi gampong-gampong (desa) di wilayah pesisir laut Selat Malaka. Hal ini juga terlihat dari arahan penggunaan Anggaran Dana gampong (ADG) dan Dana Desa (DD) yang dibolehkan untuk alokasi inovasi gampong dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi seperti penyediaan

*Portable computer (PC)*, modem, Projektor, kamera digital, pembelian data internet, *hosting website*, faximile dan *smartphone* yang dianggarkan dalam anggaran tahunan gampong. Dengan harapan penerapan dan pemanfaatan teknologi dengan baik akan mendukung perbaikan *database*, dukungan grafis, simulasi modeling, yang kesemuanya secara integral akan berguna bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, manajemen dan pembangunan gampong ke depannya.

Namun demikian dalam beberapa gampong masih terlihat bahwa ketersediaan peralatan teknologi yang dihadirkan oleh beberapa organisasi pemerintahan bukan hanya membawa perbaikan ekonomi dan sosial masyarakatnya, malah membawa pada bentuk lain dari eksklusivitas. Dimana isu, sistem dan perubahan sosial masih menjadi fokus utama dalam gampong dibandingkan keinginan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (Nurudin, 2017:94) yang kemudian melahirkan gagap teknologi dalam sistem pemerintahan gampong seperti aliran kebijakan masih dalam surat menyurat dan pelayanan public masih manual, *database* dan ketersediaan aplikasi website gampong (desa) yang tidak *upto date*.

Dari itu muncul permasalahan bagaimana pemerintah gampong (desa) dikawasan pesisir memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan pemerintahan, khususnya gampong dalam wilayah pesisir di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini dirasa sangat penting untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pemerintahan gampong (desa), karena gampong (desa) dalam wilayah pesisir merupakan suatu wilayah pemerintahan yang biasanya tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi. Idealnya perkembangan suatu organisasi akan beriring dengan perkembangan teknologi dalam rangka menjalankan tugasnya serta mewujudkan visi dan misinya. Tentunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media dalam pengelolaan informasi dan kebijakan dalam pencapaian visi tersebut. Walaupun pada sisi lainnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi suatu organisasi disebabkan oleh beberapa hal yang berbeda satu

sama lain, antara lain: kebutuhan dan kepentingan organisasi itu sendiri, kebijakan pemerintah atau paksaan dari negara-negara maju.

## **LANDASAN TEORI**

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2006: 6). Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan

Karakteristik dalam sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain: Mampu menyediakan informasi, *User Friendly*, didesign dengan tepat untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna, handal, siklus inovasi yang cepat, mempunyai waktu respon yang minimal, teknologinya beragam dan sudah stabil desentralisasi atau individualisme; penggunaan teknologi ini cenderung mengarahkan masyarakat menjadi individualis, karena kemudahan yang ditawarkan (Dedi. 2013). Selain itu teknologi komunikasi memiliki kategori karakteristik yang lain yaitu, Teknologi komunikasi adalah sebuah alat yang dilahirkan oleh sebuah struktur ekonomi, sosial dan politik, Teknologi informasi meliputi penggunaan alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Teknologi informasi berkembang secara cepat sehingga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Informasi dapat disimpan dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan lain-lain. Dan Teknologi komunikasi merupakan alat untuk menambah kemampuan orang dalam berkomunikasi.

Komponen-komponen dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah: (1). Hardware (perangkat keras), yaitu perangkat keras komputer, berupa: CPU, storage, perangkat Input/ Output, terminal untuk interaksi, media komunikasi data. (2). Software (perangkat lunak), yaitu perangkat lunak

komputer, berupa perangkat lunak sistem (sistem operasi dan utilitinya), perangkat lunak umum aplikasi (bahasa pemrograman), perangkat lunak aplikasi (aplikasi akuntansi). (3). Brainware (orang yang membuat, menggunakan dan memelihara sistem), yaitu personil untuk pengelolaan operasi (SDM), meliputi Clerical personal (untuk menangani transaksi dan pemrosesan data dan melakukan inquiry(operator). (4). Database (penyimpanan data pada media penyimpanan komputer), yaitu beberapa keuntungan pemrosesan data berdasarkan database. Pencegahan redundansi data dengan menghindari pengulangan penyimpanan melalui struktur yang logik dan hemat (menghindari penyimpanan data berulang pada file). Selanjutnya konsistensi data dengan pengendalian duplikasi data maka tampilan data selalu konsisten karena dari sumber/lokasi penyimpanan yang sama. Selanjutnya (5). Telekomunikasi dan Prosedur, yaitu Telekomunikasi dan Prosedur merupakan langkah-langkah penggunaan sistem (Dedi, 2013).

Lebih lanjut, dalam perkembangannya globalisasi dan teknologi informasi dan komunikasi telah pun menghadirkan aliran proses komunikasi dalam perubahan-perubahan organisasi dan manajemen baik dalam pemerintahan maupun dalam lembaga bisnis. Naisbitt & Aburdene (1985) mencatat berbagai perubahan paradigma aliran komunikasi sebagai akibat dari perubahan lingkungan global. Meijer (2008) melihat terjadinya berbagai perubahan paradigma aliran komunikasi mengandung implikasi pada perubahan paradigma organisasi dan manajemen baik pada struktur, strategi maupun budayanya. Perubahan-perubahan tersebut menuntut cara pandang yang berbeda terhadap kedudukan dan peran sumberdaya manusia. Cara pandang baru yang memposisikan sumberdaya manusia lebih strategis dan vital dari pada cara pandang lama. Sistem komunikasi pun mulai mengalir dengan berbagai pola, salah satu dari cara tersebut ialah dengan mendefinisikan struktur tersebut sebagai satu sistem laluan dimana pesan-pesan mengalir atau aliran komunikasi dalam organisasi (Whitworth, 2006).

Terdapat klasifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam tiga jenis, yaitu : pertama, teknologi informasi dan komunikasi sebagai media (alat bantu) administrasi pemerintahan. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber yakni sebagai sumber informasi dan mencari

informasi. Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sistem pengelolaan administrasi dalam pemerintahan (Praditya, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di gampong pesisir dalam kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh, yaitu Gampong Hagu Barat Laut, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pemerintahan gampong (desa) untuk mendukung kegiatan pemerintahan terkait kelancaran administrasi, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan website, dan database gampong. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Creswel, 1994). Metode penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan gampong di wilayah pesisir kota Lhokseumawe.

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), dengan penentuan informan berdasarkan teknik *purposive sampling* pada pemerintahan gampong di wilayah pesisir kota Lhokseumawe yaitu Gampong Hagu Barat Laut, yang meliputi aparatur pemerintahan Gampong, tokoh Masyarakat dan Masyarakat gampong. Selanjutnya kajian pustaka, yakni teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, makalah, jurnal penelitian, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. (Sugiyono, 2004:129)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kehadiran Teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran. Beberapa perubahan teknologi telah terjadi dengan kehadiran computer dengan keyboard, layar, prosesor, memory dan printer telah menghadirkan word processor yang digabungkan sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai pusat pengolahan, penyimpanan dan percetakan. Inovasi online dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kemudian telah membawa kepada keuntungan dalam

penggunaannya seperti peningkatan produktivitas dan kecepatan dalam mengolah dokumen, surat menyurat dan laporan serta membagikannya kepada seluruh stakeholder dengan realtime.

Hasil dari penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan gampong (desa) di wilayah pesisir kota Lhokseumawe lebih kepada kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat, pelaporan keuangan gampong dan juga kelancaran hubungan pemerintahan baik internal maupun eksternal gampong. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi internal pemerintahan gampong, peralatan teknologi informasi dan komunikasi digunakan lebih pada proses mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data-data gampong ini mulai menggunakan komputer demi kelancaran proses administrasi dan pelayanan masyarakat secara cepat dan baik.

Dari observasi yang dilakukan terlihat beberapa tahapan dari pemanfaatan teknologi yang meliputi, tahap proses awal yang dilakukan adalah mendapatkan, mengumpulkan dan menginput data. Hasil wawancara didapati bahwa pengumpulan data dilakukan melalui dokumen dasar yakni dari formulir-formulir yang diisi oleh masyarakat. Dokumen formulir ini membantu dalam penanganan arus data yaitu dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Data dapat diinput dan dicatat dengan jelas dan akurat, menjadi file-file data dan *folder* data dengan pemberian nama di komputer. Proses pengumpulan data dilakukan untuk mempermudah administrasi gampong dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan dalam sistem informasi serta pengolahan data. Walaupun beberapa fungsi dan bagian kerja dari aparatur di pemerintahan gampong terlihat belum semuanya lancar dengan pekerjaan tersebut.

Dalam tahapan penyimpanan data di Gampong Hagu Barat Laut, dilakukan demi menghindari terjadinya kehilangan data atau misalnya perangkat komputer mengalami error. Menyimpan data selain langsung di harddisk computer juga dilakukan dengan menggunakan flashdisk. Observasi peneliti melihat bahwa yang dilakukan di Kantor gampong ini, aparatur Gampong sangat mudah dalam melakukan penyimpanan data. Hal ini dirasa penting dalam

menyimpan data dan juga mudah dalam mencari kembali data yang sewaktu-waktu dibutuhkan karena dapat disimpan dalam bentuk soft file dalam computer maupun disimpan juga dalam flashdisk. Penyimpanan data merupakan serangkaian tugas pemrosesan data yang sangat dibutuhkan. Menyimpan data dilakukan setelah data didapat. Data tersebut kemudian disimpan supaya data tidak hilang dan mudah dalam menemukan kembali sewaktu dibutuhkan.

Data yang baik tentunya tidak hanya untuk disimpan namun dapat ditransmisikan atau dapat distribusikan dari satu orang ke orang lain. Transmisi data melalui proses pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data dengan menggunakan komputer/media elektronik. Di gampong Hagu Barat Laut, proses ini sudah mulai berjalan walaupun data yang ditransmisi menggunakan flasdisk. Belum memanfaatkan wireless atau jaringan intranet dan internet yang ada. Hal ini disebabkan belum semuanya aparatur gampong mempunyai pengetahuan dalam penggunaan wireless atau jaringan intranet dan internet dalam proses pengiriman data dan juga melalui aplikasi e-mail dan sebagainya. Padahal gampong ini sudah berlangganan jaringan internet *Speedy* dari PT. Telkom. Penggunaan internet selama ini hanya untuk mengambil data-data lewat *blog*, *website* dan lain-lain, yang itu dirasakan perlu untuk format dan model atau bentuk surat menyurat dan bahkan data-data lainnya yang penting bagi pemerintahan gampong, seperti aparatur gampong mengambil data kependudukan di internet melalui *website* kependudukan yang sudah disediakan oleh dinas kependudukan dan lainnya. Penggunaan internet belum dipakai untuk aplikasi atau program *online* tertentu seperti pemanfaatan internet untuk pengiriman surat elektronik (e-mail) dan aplikasi *online* lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan gampong idealnya juga harus dapat memanfaatkan internet untuk selain mendapatkan contoh data juga dapat melakukan proses memanipulasi data yang merupakan bagian dari tugas pemrosesan data. Proses ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi dalam mengedit data seperti mengubah data asli yang menjadi contoh untuk pembuatan data baru. Manipulasi yang dilakukan dapat berupa menambah, menghapus, mengganti, menyisip, dan menarik suatu

informasi tertentu dan hasil dari penggabungan tersebut menimbulkan produk baru yang bisa dijadikan informasi. Penelitian mendapati bahwa aparatur di pemerintahan gampong Hagu Barat Laut belum dapat memanipulasi data secara baik walaupun sebelumnya ada aparatur yang telah mencoba membuat program sistem database gampong, namun saat ini database tersebut tidak dapat diupdate lagi dan jarang digunakan sebagai data informasi.

Data tersebut harus diedit kembali dengan manual di program *office*. Apalagi pada data yang lebih spesifik seperti program *database* gampong dan program rancangan *website* serta promosi gampong masih belum dimulai dengan serius dan belum ada penganggaran dana. Walaupun idealnya memanipulasi data sebenarnya perlu diketahui oleh aparatur pemerintahan gampong supaya data informasi yang baik siap untuk disajikan kepada internal pemerintahan maupun kepada masyarakat gampong. Sajian data kepada masyarakat dalam bentuk tampilan *hard copy* dan juga dengan bentuk tampilan *soft copy* menjadi penting dalam proses pelayanan. Dalam pemerintahan gampong Hagu Barat Laut, sajian data masih dalam bentuk *hard copy* saja. Dimana data tersebut diprint terlebih dahulu untuk mudah dalam mendistribusikannya. Seperti data informasi tentang profil gampong, administrasi gampong dan sebagainya. Dalam proses komunikasi secara internal pemerintahan gampong, lebih banyak menggunakan media jejaring sosial yakni WhatsApp (WA). Dimana aplikasi ini telah memudahkan dan membantu dalam pengiriman informasi dan komunikasi secara nonformal dalam internal pemerintahan gampong selama ini.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintahan muaranya adalah kualitas pelayanan masyarakat dan stakeholder lainnya yang prima berbasis teknologi atau lebih dikenal dengan *E-Government*. Pelayanan publik sebaiknya bukan hanya mengikuti tren global, melainkan juga meliputi langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat. *E-Government* mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang langsung ke institusi pemerintahan terkait. Kualitas pelayanan akan meningkat dengan adanya pemanfaatan teknologi, karena dengan terciptanya *good governance* maka

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik termasuk pemerintahan tingkat gampong di wilayah pesisir. Pemanfaatan teknologi infotmasi dan komunikasi di bidang pemerintahan dari gampong-gampong di wilayah pesisir tentunya tidak jauh berbeda dengan daerah perkotaan lain. Wilayah pesisir kota Lhokseumawe adalah wilayah yang dekat dengan pusat kota dimana pusat kota Lhokseumawe berada berhadapan langsung dengan laut Selat Malaka.

Pelayanan publik yang dijalankan di pemerintahan gampong Hagu Barat Laut belum sepenuhnya berjalan secara *online* sebagaimana harapan dalam pemanfaatan teknologi saat ini yang serba memudahkan. Hal ini terlihat dalam penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi masih bersifat mendukung kualitas administrasi internal saja dan belum *online*. Namun demikian pemakaian peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti computer, printer, projector dan internet sudah banyak membantu dalam proses pelayanan terutama dalam efisiensi waktu pelayanan yang semakin membaik. Pelayanan seperti surat-surat sudah memakai computer dan printer sedangkan internet hanya dimanfaatkan untuk mengetahui dan mencari bentuk atau format surat saja. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil, memudahkan dalam mengedit, mengolah data, menghemat tenaga, dan sangat dipermudah, cepat dan cermat. Walaupun demikian dalam pelaksanaan pelaporan keuangan gampong dan juga perencanaan pembangunan gampong, pemerintahan Kota Lhokseumawe telah menyediakan aplikasi tersendiri dalam format online tertutup antar lembaga di pemerintahan.

Pemerintahan kota Lhokseumawe dalam pemberdayaan teknologi di gampong-gampong dalam wilayahnya, membuat payung hukum dalam Qanun Kota Lhokseumawe nomor 1 tahun 2015 tentang Gampong, yakni terdapat dalam pasal 29 ayat 2 dalam kewajiban pemerintah gampong serta di pasal 30 ayat 2 dalam tugas dan wewenang Keuchik di gampong. Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dilevel gampong terlihat dari beberapa pengadaan fasilitas penunjang teknologi informasi seperti dalam menjalankan sistem informasi manajemen administrasi dan keuangan Gampong selama ini, dimana

mengimput data administrasi dan keuangan serta kearsipan gampong melalui aplikasi SIMAKDES yang selama tahun 2016 dan 2017 sudah online dan server datanya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat kota Lhokseumawe.

Pada tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe melakukan perubahan aplikasi terbaru yang bernama SisKeuDes yaitu Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. Aplikasi keuangan desa (gampong) telah menggunakan *Microsoft Acces* sehingga lebih *simple* dan cepat diterapkan oleh pengguna aplikasi walau awam sekalipun. Penggunaan data base acces ini dirasa lebih mudah dalam mengatur dan mengolah transaksi dan data keuangan dalam kelompok skala kecil seperti pelaporan keuangan gampong (desa). Penggunaan aplikasi *SisKeuDes* di gampong-gampong dalam wilayah kota Lhokseumawe sangat membantu dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi yang ada di gampong.

Aplikasi sistem keuangan desa (*SisKeuDes*) mengakomodir juga regulasi sistem keuangan tingkat desa dengan baik dan dirancang secara terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Secara umum, keluaran dari aplikasi ini adalah dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen penatausahaan dan laporan-laporan tingkat gampong dan tingkat kabupaten/ kota. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Keuangan gampong yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Nilai lainnya bagi para aparatur gampong adalah peningkatan kapasitas keilmuan sebagai unsur pelaksana teknis pengelolaan keuangan, yang membantu Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.

Selain aplikasi *SisKeuDes*, Pemerintah kota Lhokseumawe juga mulai menerapkan aplikasi *e-Planning* bagi semua gampong yang ada dalam wilayah kota Lhokseumawe tanpa terkecuali gampong Hagu Barat Laut. Program aplikasi ini digunakan untuk mengintegrasikan proses pembangunan menjadi sinergi antara visi dan misi pemerintahan, lembaga satuan kerja dan gampong-gampong di kota Lhokseumawe. Proses dalam program ini dimulai dari perencanaan pembangunan yakni usulan perencanaan pembangunan dari gampong-gampong, Satuan Kerja Pemerintahan Kota dan Lembaga badan lainnya dimasukkan secara

online dan disusun dalam satu dokumen yakni e-Musrenbang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentunya telah memberi banyak kemudahan bagi setiap orang untuk dapat berkomunikasi ke berbagai belahan dunia. Namun demikian untuk memanfaatkan produknya tersebut, perlu kemampuan khusus dalam memilih, mengolah dan menyerap informasi yang baik baginya.

Kebijakan dan program-program pemerintah sering menempatkan gampong (desa) sebagai objek bukan sebagai subjek, terutama program-program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Pemerintah seharusnya memulai gerakan teknologi dari pemerintahan gampong (desa), agar gampong dapat menyelenggarakan pemeritahan secara baik dan mandiri, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi secara baik, efektif dan efisien. Penerapan dan pemanfaatan teknologi yang baik tentunya akan membuka transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Pemanfaatan piranti lunak secara baik dan efektif akan menjadi sumber terbuka dalam kegiatan operasional (Mustika, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadikan pemerintahan terbuka dan dapat membangun kolaborasi pembangunan bersama antar pemerintahan gampong dalam sebuah wilayah pemerintahan kabupaten/kota terutama pembangunan wilayah pesisir yang selam ini menjadi tolak ukur dalam pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu pemanfaatan piranti ini dapat juga untuk berkomunikasi dan membangun jejaring antar desa (Desa Madusari, 2013). Penyediaan informasi melalui pembuatan *website/blog* menjadi keperluan dalam diseminasi informasi kegiatan yang dilakukan oleh warga maupun aparat desa, meningkatkan penyebaran informasi sampai melewati batas wilayah (Gerakan Desa Membangun, 2014). Selanjutnya pemanfaatan sistem informasi untuk melaksanakan pelayanan publik, memperkenalkan potensi desa maupun menyosialisasikan pembangunan desa (Jahja, 2012) dan akhirnya sisi kemudahan dan tujuan teknologi inilah menjadi pangkal dari gerakan pemberdayaan dalam percepatan pembangunan oleh organisasi pemerintahan (Hanafi, 1987; Pala, 2009).

## KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi pemerintahan gampong Hagu Barat Laut, kota Lhokseumawe telah berdampak pada perubahan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran. Beberapa perubahan teknologi telah terjadi dengan kehadiran komputer, printer, projector dan internet wifi. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan gampong dalam wilayah pesisir kota Lhokseumawe, pada pemerintahan gampong Hagu Barat laut, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi lebih kepada kemudahan administrasi secara internal saja dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam menginput data ke dalam database gampong. Kemudian data tersebut dijadikan file-file data dan folder data dengan pemberian nama di komputer. Dalam penyimpanan data selain di *harddisk* komputer juga dilakukan dengan menggunakan *flashdisk*. Selanjutnya dalam transmisi atau distribusi informasi dan data juga masih manual dengan flashdisk (eksternal disk). Namun demikian, Hal ini sudah banyak membantu dalam proses pelayanan terutama dalam efisiensi waktu pelayanan yang semakin membaik, dimana pelayanan seperti surat-surat sudah memakai computer dan printer

Pemanfaatan jaringan internet lebih kepada pengambilan format bentuk surat menyurat, informasi terbaru dan data pemerintahan dari *website* pemerintah serta pelaporan keuangan dan perencanaan pembangunan secara internal antar lembaga pemerintahan Kota atau kabupaten dalam aplikasi yang disediakan oleh pemerintah kota/ kabupaten. Dalam berkomunikasi antar personal secara internal pemerintahan gampong, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi lebih banyak menggunakan media *smartphone* secara pribadi dengan memanfaatkan aplikasi jejaring sosial yakni WhatsApp (WA). Aplikasi ini telah memudahkan dan membantu dalam pengiriman informasi dan komunikasi secara nonformal dalam internal pemerintahan gampong selama ini, seperti pemberitahuan, pengumuman dan undangan dalam bentuk file ke dalam group-group internal dalam aplikasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 1994. *Research design: qualitative & quantitative approaches*. London: Sage Publications.
- Dedi. *Pengertian Komponen dan Karakteristik*. <http://bk1120011-dedi.blogspot.com/2013/12/pengertian-komponen-dan-karakteristik.html>. (Diakses 21 februari 2019)
- Desa Madusari. 2013. *Madusari Bergabung Dalam Jejaring Gerakan Desa Membangun*. Tersedia di <<http://madusari.desa.id/madusaribergabung-dalam-jejaring-gerakandesa-membangun/>>. diakses 22 Agustus 2019.
- Gerakan Desa Membangun. 2014. *GDM Siap Luncurkan Program Desa 2.0 di 100 Desa*. Tersedia di <<http://desamembangun.or.id/2014/08/g-dm-siap-luncurkan-program-desa-2-0di-100-desa/>>. diakses 22 Agustus 2019.
- Hanafi, Abdillah. 1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- Jahja, Ranggoaini. et. al. 2012. *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data Untuk Pembaruan Desa*. Yogyakarta: COMBINE Resource Institution (CRI).
- John Naisbitt and Patricia Aburdene. 1985. *Re-Inventing the Corporation: Transforming Your Job and Your Company for the New Information Society*. New York: Warner Books.
- Meijer, A. J. 2008. E-mail in government: Not post-bureaucratic but late-bureaucratic organizations. *Government Information Quarterly*, 25:429–447.
- Mustika, Maya Dewi. 2011. *Desa Mandalamekar, Raih Kemandirian Teknologi dengan Open Source*. Indonesian e-Learning Media. Tersedia di <<http://idelearning.com/desamandalamekar-raih-kemandirianteknologi-dengan-open-source/>>. diakses 22 Agustus 2019
- Nurudin. 2017. *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Cet.1. Jakarta; Rajawali Pers.
- Pacey, Arnold. 1983. *The Culture of Technology*. Massachusetts: The MIT Press.
- Pala, Rukman. 2009. Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perannya dalam Proses Perubahan Sosial. Dlm: *Majalah Publik Ilmiah Semi Populer*. Ed. Desember 2009. Makassar: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan informatika.
- Praditya, Didit. 2014. The Utilization of information and Communication Technology (ICT) By Government in Rural Level (88): 129–40.

- Sugiyono. 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta,
- Whitworth, B. 2006. Internal communication. Dlm. Gillis, T. L. (pnyt.). *The IABC Handbook of Organizational Communication: A Guide to internal communication, Public Relations, Marketing and Leadership*, hlm. 205-214. San Francisco: Jossey-Bass.
- BAPPEDA Lhokseumawe. 2017. *Profil Kota Lhokseumawe*. <http://www.bappedalhokseumawe.web.id> (diakses 22 Agustus 2019)

## REPRESENTASI BUDAYA DALAM FILM SALAWAKU

Cindenia Puspasari<sup>1)</sup>, Masriadi<sup>1)</sup>, Rahmah Yani<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh  
email: *hmhyn258@gmail.com*

### ABSTRAK

Film merupakan bentuk karya seni yang berisi informasi, dan hiburan, serta mengandung representasi atau pemaknaan terhadap sesuatu yang ditampilkan. Skripsi ini bertujuan untuk merepresentasi atau memaknai budaya lokal Maluku dalam Film Salawaku, yang merepresentasikan mengenai budaya pariwisata Provinsi Maluku dengan subjek penelitian yang meliputi adegan dan teks dialog dalam film Salawaku. Jenis pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan kualitatif dengan teknik analisis kandungan berdasarkan model budaya menurut Edgar H. Schein, yang mengategorikan model budaya menjadi dua yaitu budaya benda dan budaya bukan benda. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa dalam Film Salawaku ditemukan representasi dua tanda kebudayaan antara lain budaya benda yang terdiri dari : (a) Seni Budaya (b) Bahasa (c) Produk Makanan dan Minuman Lokal (Pappeda dan Sopi) dan budaya bukan benda, yaitu : (a) Kepercayaan/Upacara Adat (b) Hubungan Personal..

**Kata kunci :** *representasi film, schein model budaya, kebudayaan maluku, film salawaku*

### PENDAHULUAN

Film merupakan salah satu bentuk media komunikasi yang muncul dari produk media massa populer. Penyampaian pesan oleh film adalah cara yang cukup efektif agar penonton dapat mengetahui informasi yang ingin disampaikan oleh sutradara. Tampilan suara dan gambar dalam film ialah bentuk hasil yang mengandung unsur hiburan, kebudayaan, dan informasi sekaligus keberadaan film tersebut, yang dapat digunakan menjadi sarana sosialisasi politik, budaya, pendidikan, keindahan alam, maupun keagamaan.

Film merupakan salah satu produk komunikasi massa yang pengaruhnya mampu menjangkau seluruh segmen sosial masyarakat. Film dapat merepresentasikan sebuah kebudayaan dan berfungsi sebagai proses budaya suatu masyarakat yang disajikan dalam bentuk gambar bergerak. Pembuatan film tentunya dipengaruhi juga oleh latar belakang dan budaya dari para pembuatnya. (Ardianto, 2004 : 136). Dalam hal ini, suatu budaya tertentu dipengaruhi oleh aksi

media melalui penyebaran informasi yang ditampilkan. Disini, media punya peran yang vital karena menyajikan sebuah cara dalam mengkonstruksi sebuah realita. Isi dalam sebuah film digerakkan oleh para produser untuk merepresentasikan sebuah tanda-tanda maupun elemen suatu budaya. Salah satu film karya sineas Indonesia yang menampilkan suatu budaya dengan kearifan lokalnya adalah film berjudul Salawaku. Film ini bergenre road movie yang menghadirkan begitu banyak pesona alam dan kearifan budaya lokal khas Maluku yang diisi dengan sedikit kisah tentang hamil diluar nikah. Namun pada penelitian ini, isu hamil diluar nikah tidak dibahas terlalu spesifik, penulis hanya fokus pada sudut pandang budaya yang ada dalam film Salawaku.

Film Salawaku adalah sebuah karya perdana Pritagita Arianegara yang ditayangkan pertama kali dalam ajang tahunan Tokyo International Film Festival 2016 dengan menampilkan pertunjukkan keindahan alam yang begitu khas pada tiap pengambilan lokasi di daerah Maluku yang menjadi lokasi pembuatan film dan sekaligus mengajak kita lebih dekat mengenal karakter masyarakat Maluku. Walaupun film ini sempat ditolak di beberapa bioskop dalam negeri karena menyangkut nama sutradara Pritagita yang belum terlalu dikenal publik, namun tak dipungkiri bahwa film Salawaku menjadi media promosi wisata yang berbeda sekaligus cerdas karena tidak seperti sedang berjualan sebuah produk dibuktikan dengan tidak adanya iklan yang sering kali bermunculan dalam film dengan orientasi komersil.

Film ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan pertemuan dua latar belakang budaya yang sangat berbeda dari berbagai segi namun begitu indah dan menyenangkan saat bertemu dengan pengangkatan nuansa keindahan alam khas Maluku ditambah dengan sedikit konflik mengenai permasalahan hidup perempuan. Terlihat cover film Salawaku pun didominasi oleh panorama alamnya yang begitu khas. Asumsi dari film Salawaku begitu sederhana yaitu mencari keberadaan Binaiya, namun proses perjalanan Salawaku dapat membawa kita pada pengalaman yang berbeda dan dipadukan dengan sajian tampilan panorama alam yang begitu menakjubkan.

Film sebagai bentuk representasi dari suatu budaya yaitu tentang bagaimana budaya tersebut ditampilkan juga tidak terlepas dari pengaruh dan nilai-nilai yang dianut oleh sutradaranya serta dipercayai oleh masyarakat yang diceritakan. Representasi dapat dilakukan dengan melihat pada model budaya yang dikemukakan oleh Schein, yang mengkategorikan budaya menjadi dua, yaitu budaya benda dan budaya bukan benda. Budaya benda, berdasarkan ciri-ciri yang digunakan oleh Schein, ialah budaya yang boleh dilihat atau didengar (*visible and audible pattern*), seperti setting, pakaian, peralatan keseharian, kendaraan, bahasa dan seni dan budaya. Sedangkan budaya bukan benda ialah budaya yang bersifat abstrak namun wujud dalam kehidupan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah hubungan personal, aspek komunikasi, nilai-nilai dan norma, agama dan kepercayaan, serta tingkah laku dan gaya hidup

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian ialah : (1) Identifikasi budaya Maluku dalam Film Salawaku. (2) Analisis budaya benda dan budaya bukan benda menurut Edgar H. Schein : Budaya benda (*setting, media komunikasi, bahasa*) & budaya bukan benda (*agama/ritus kepercayaan*). Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya Maluku direpresentasikan ke dalam Film Salawaku dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya Maluku direpresentasikan ke dalam Film Salawaku. Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu *Representasi Budaya Maluku Dalam Film Salawaku*, merupakan judul yang belum pernah dibahas oleh penulis sebelumnya.

## **LANDASAN TEORI**

Menurut Prof. Kuntjaraningrat, ada 3 wujud kebudayaan, yaitu : (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat diamati secara kasat mata, (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakatnya. Wujud ini sering disebut sebagai sistem sosial. Dalam sistem sosial tersebut terdapat aktivitas manusia yang berinteraksi, serta saling mempengaruhi dari waktu ke waktu dan mengikuti pola-pola tertentu

berdasarkan adat istiadat, (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik yang sifatnya paling konkret, dapat dilihat, dirasakan dan diamati. Dari hasil karya manusia mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit, misalnya dari korek api kayu sampai teknologi komputer. (Setiadi. dkk, 2011:28-30)

Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda. Tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik melainkan universal tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam ataupun pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun, antara lain yaitu : (1) budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia, (2) budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, (3) budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya, (4) aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan yang diizinkan. (Setiadi. dkk, 2011:33-34)

Sistem kebudayaan suatu daerah dapat menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pertama, kebudayaan material yang berupa hasil cipta, karsa, yang berwujud benda, barang alat pengolahan alam seperti gedung, pabrik, jalan, rumah dan sebagainya. Kedua, kebudayaan non material yang berwujud kebiasaan, adat istiadat ilmu pengetahuan dan sebagainya. (Setiadi. dkk, 2011:33-35) Selanjutnya, Lustig & Koester (Puspasari, 2017:03) menerangkan bahwa identitas budaya adalah sebagai rasa yang dimiliki seseorang terhadap sebuah budaya atau kumpulan etnis tertentu. Identitas budaya terbentuk dalam proses budaya yang meliputi pembelajaran dan penerimaan tradisi, warisan, bahasa, agama, keturunan, estetika, pola pikir dan struktur sosial dalam budaya. Seseorang yang memiliki identitas budaya menginternalisasikan kepercayaan, nilai, norma dan tingkah laku sosial yang berasal dari budaya mereka dan mengidentifikasi budaya tersebut sebagai bagian dari konsep diri.

### **Model Budaya Edgar H. Schein**

Menurut Edgar H. Schein (Miller, 2006: 89) mendefinisikan budaya sebagai berikut,

*“Culture is “A pattern of share basic assumption that the group learner as it solved itsproblems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to these problems”.*

Ini berarti bahwa budaya ialah pola asumsi-asumsi yang ditemukan oleh suatu kelompok tertentu dan dikembangkan melalui pembelajaran untuk memecahkan masalah-masalah adatasi eksternal, dan integrasi internal yang telah berjalan cukup lama untuk dipandang sebagai sesuatu yang sah, maka dari itu, diajarkan kembali kepada anggota-anggota yang baru sebagai cara yang benar untuk memandang, berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah tersebut.

Menurut Schein, budaya organisasi mengacu pada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggotanya untuk mengklasifikasikan organisasi tersebut terhadap organisasi lain. Schein juga menjelaskan beberapa unsur-unsur budaya, yaitu: ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, perilaku, (norma) masyarakat, asumsi dasar, sistem nilai, pembelajaran/pewarisan, maupun masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

Merujuk pada model budaya yang dipaparkan oleh Schein (Puspasari dkk, 2017:04) budaya dapat di bedakan menjadi dua jenis yakni budaya benda dan budaya bukan benda. Budaya benda memiliki ciri yaitu budaya yang bisa didengar atau dilihat seperti bahasa, pakaian, kendaraan, seni budaya, setting, peralatan keseharian dan budaya bukan benda adalah budaya yang sifatnya abstrak tetapi hadir secara nyata di kehidupan masyarakat seperti, nilai-nilai dan norma, agama, kepercayaan, aspek komunikasi, tingkah laku maupun gaya hidup.

### **Budaya Maluku**

Film Salawaku kental dengan tema lokalitas dan kearifan lokalnya, tidak hanya sekedar membuat promosi Indonesia karena mengangkat sektor-sektor wisata alam yang luar biasa di daerah Maluku, namun juga mengenalkan kebudayaannya, penggunaan bahasa daerah Maluku yang kenal, pengenalan

karakter masyarakatnya, filosofi produk makanan atau minuman seperti Pappeda dan Sopi, serta makna seni tari dan filosofinya yaitu seni tari Cakelele dan arti pedang Salawaku. (Argadia, 2016:6)

Penggunaan bahasa daerah yang kental menambah suasana kearifan lokal dalam film, karakter masyarakat beretnis Ambon, Maluku yang punya julukan pribahasa ‘Labu Jua Ada Hati’ yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “sekeras-kerasnya watak orang Ambon, punya hati tetap lembut” hadir dalam film. Berdasarkan dari segi berbicara, terlihat tegas dan kasar namun dibalik itu, mereka tetap manusia biasa yang mempunyai hati nurani dan punya kekurangan.

Selain itu, sagu merupakan sumber makanan rakyat yang sudah lama dikenal oleh masyarakat yang daerahnya merupakan penghasil sagu. Olahan makanan yang terbuat dari sagu dengan cara pengolahannya maupun resepnya berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat yang diturunkan secara lisan dari turun-temurun. Substansinya adalah sagu merupakan makanan rakyat sebagai informasi budaya karena bersifat sederhana (penyajianya apa adanya). (Tulalessy, 2016:90).

Pemanfaatan sagu secara tradisi sudah lama dikenal di daerah-daerah penghasil sagu. Produk-produk makanan secara tradisi yang dihasilkan dari sagu seperti papeda, sagu lempeng, sagu bakar kelapa, sagu bakar apatar, dan lain sebagainya merupakan produk yang benar-benar terlahir dari sebuah pengetahuan tradisi masyarakatnya. (Tulalessy, 2016:87)

Selain memperkenalkan makanan lokal khas, minuman tradisional Maluku, yang dikenal dengan nama Sopi juga tak luput dari pembahasan. Sopi merupakan citra yang terwujud dalam semangat persaudaraan, dan telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Sopi merupakan hikmat dari Tuhan bagi para leluhur masyarakat Maluku, untuk membuat minuman tradisional tersebut, dan sebenarnya merupakan simbol adat di Maluku. (Zairin, 2019)

Yang terakhir, yaitu filosofi tombak dan anak laki-laki, karena tombak dan panah telah menyatu dengan pribadi laki-laki suku Nuaulu di Pulau Seram, Pewarisan nilai-nilai budaya yang terdapat pada tombak dan panah dilakukan

sejak anak laki-laki masih berusia muda. Pada usia 5-6 tahun anak laki-laki sudah diperkenalkan dengan kedua senjata ini. Mulai dari cara memegangnya, menimbang-nibangnya sampai akhirnya ia memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakannya. (Fahham, 2016:27-28). Laki-laki dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat suku Nuaulu di Pulau Seram memiliki kedudukan yang penting. Anak laki-laki sejak kecil telah ditempa sehingga ketika mereka dewasa, mampu bertindak sebagai pria yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun pada sesama. Kedewasaan seorang laki-laki ditentukan berdasarkan kemampuannya menggunakan senjata, panah dan tombak.

### **Sinopsis Film Salawaku**

Dikutip dari laman web *BookMyShow Indonesia* (2017) film Salawaku ialah suatu karya sineas Indonesia yang bergenre drama (*road movie*). Film ini disutradarai Pritagita Arianegara dan dua orang produser yakni Ray Zuham dan Michael Julius dan penulis skenario bernama Iqbal Fadly dan Titien Watimena. Film Salawaku diperankan beberapa tokoh penting yaitu Karina Salim sebagai saras, Raihaanun sebagai Binaiya, Elko Kastanya sebagai Salawaku, J-Flow sebagai Kawanua, dan Shafira Umm. Film yang diproduksi Kamala Films ini rilis dan tayang pertama kali di ajang tahunan Tokyo International Film Festival 2016. Film ini mengangkat dan mengeksplorasi habis-hadaptn keindahan alam yang ada di Indonesia bagian Timur, yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Film Salawaku berkisah tentang dua orang bernama Salawaku dan Saras dimana dua karakter ini mempunyai perbedaan usia, budaya, sifat, kepentingan antar satu sama lain. Film dengan tema lokalitas dan kearifan lokal yang kuat.

Tekad kuat Salawaku, seorang bocah laki-laki tanggung asal Maluku, untuk mencari ‘ussi’(panggilan kakak perempuan dalam bahasa Maluku) bernama Binaiya yang melarikan diri

meninggalkan desa, terbentur dengan pertemuannya dengan Saras, seorang remaja perempuan asal Ibukota Jakarta yang memilih daerah Maluku untuk berlibur dan mengalihkan sejenak permasalahannya bersama kekasihnya. Saras yang terdampar disuatu pulau pasir di tengah laut awalnya membuat Salawaku dengan berat hati harus menolongnya. Seiring berjalannya cerita dalam perjalanan mereka

ini lantas terjadi suatu hubungan yang saling bertolak belakang budaya, cara hidup dan kebiasaan dari tokoh Salawaku dan tokoh Saras. Hingga muncul masalah lain ketika Kawanua yang menyusul Salawaku yang tampak baik hati menawarkan bantuan untuk Salawaku agar menemukan Binaiya. Lantas, Salawaku mau menerima Kawanua untuk bergabung dalam perjalanan mereka karena telanjur percaya pada kakak angkatnya tersebut. Namun, kebaikan Kawanua yang sebenarnya mempunyai maksud lain untuk mencegah dan mengurungkan niat Salawaku bertemu dengan Binaiya karena pada dasarnya Kawanua lah yang menyebabkan Binaiya melarikan diri dari desa. Akan tetapi, mata Saras dan Salawaku akhirnya berhasil dibutakan oleh kebaikan Kawanua. Saras sedikit demi sedikit mulai melupakan patah hati terhadap kekasihnya di Jakarta dan mengalihkan hatinya pada Kawanua. Hingga pada satu titik Salawaku sadar bahwa mereka sebenarnya telah menjauhi daerah Piru, dimana dikabarkan Binaiya berada disana.

Film ini mencoba menaruh pesan tentang selalu ada pilihan dalam hidup melalui peristiwa didalamnya. Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita dan memunculkan konflik batin. Norma yang berbenturan serta bagaimana menjaga martabat sebuah keluarga. Ayah Kawanua adalah seorang Upulatu (orang terhormat di kampung) maka menjaga nama baik adalah keharusan. Hanya saja ada kesalahan yang dibuat oleh Kawanua dimana melibatkan Binaya sehingga Binaya harus pergi dan sembunyi di Piru. Melalui film Salawaku, Pritagita mencoba menampilkan kekayaan alam Indonesia di Maluku, di sisipkan dengan nuansa kearifan lokalnya dengan didominasi oleh bahasa dan dialek Ambon, Maluku. Film Salawaku juga mengajak penonton melihat kuliner yang begitu menggoda dari wilayah Timur sana. Ada Sopi (minuman khas Maluku yang mengandung alkohol). Penonton juga dapat mengenal Papeda (makanan unik khas Maluku yang terbuat dari tepung sagu), mengenal karakter etnis Ambon, dan filosofi Salawaku tercermin dari karakter tokohnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu secara kualitatif dengan teknik analisis kandungan. Objek penelitian yang ada di dalam penelitian ini adalah sebuah film bergenre *roadmovie* atau film perjalanan berjudul “Salawaku”. Film ini dipilih karena penelitian ini meneliti tentang bagaimana representasi budaya Maluku yang ada dalam film tersebut. Subjek penelitian ini meliputi *shot/sequence/scene* dan teks dialog yang terdapat dalam film Salawaku yang nantinya akan di *screenshoot* atau rekam layar. Dalam hal ini, *sequence* kita kenal seperti dalam suatu teater yaitu babak. Sumber data dalam suatu penelitian ialah bagian vital yang harus diperhatikan. Dalam penelitian ini sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah data primer dan data kepustakaan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Representasi yang diamati pada Aspek Budaya Benda**

#### 1. Seni Tari Cakalele



Representasi pada adegan tersebut adalah Salawaku seorang anak-anak asli Maluku dan melalui karakter Salawaku penulis melihat ketulusan dan kasih sayang seorang lelaki kecil yang begitu besar pada kakak perempuannya. Representasi penulis terkait nama Salawaku pada penokohan ditunjang dengan referensi lain yang bersangkutan yang mengatakan bahwa nama diri adalah sebuah simbol pertama dan utama bagi seseorang.

Gambar diatas adalah adegan saat Salawaku beserta teman sekolahnya melakukan tarian Cakalele, Salawaku sudah melakukan perlawanan dan perjuangan harga dirinya dengan sang kakak yang dihina oleh teman-temannya lantas ia pun hampir melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pukulan tangan pada temannya tersebut. Bukannya mendapatkan semangat motivasi dari lingkungan justru kalimat hinaan dan ejekan yang ia dapatkan disekolah. Namun, Salawaku adalah simbol kekuatan untuk keluarganya, terutama Binaiya seorang kakak perempuan seorang yang ia miliki di hidupnya, ia terus memperjuangkan keadilan untuk orang yang ia kasihi. Secara tidak langsung, diumur yang masih anak-anak Salawaku belajar dewasa dan bijaksana dari permasalahan orang dewasa tentang bagaimana cara mereka menghadapi sebuah masalah. Belajar memahami bahwa kehidupan adalah tentang bagaimana manusia meninggalkan dan ditinggalkan.

## 2. Bahasa Ambon & Dialek Maluku



Gambar diatas merepresentasikan interaksi antara Saras dan Salawaku, yang kemudian membuat Saras bingung mendengar arti kata 'seng' yang diucapkan Salawaku kepadanya. Kata tersebut ialah salah satu bahasa daerah Ambon yang bermakna 'tidak'. Dalam hal ini, dapat ditafsirkan bahwa Salawaku sedang menunjukkan identitasnya sebagai orang Maluku dengan berinteraksi menggunakan dialek dan bahasa daerahnya. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dan kemudian agar bahasa dapat dipahami pemakainya, maka pemberi dan penerima pesan dalam penggunaan bahasa harus mempunyai kesepakatan

bersama dalam menggunakan simbol- simbol dan dalam mengrepresentasikan maknanya. Pada contoh prakteknya, konsep mengenai kata “seng” sebagai pengganti kata “tidak” akan bermakna ketika konteks budaya Maluku diperlakukan. Bagi penonton atau masyarakat yang asing dengan bahasa orang Maluku, konsep “seng” akan berbeda maknanya atau bahkan hampir sulit untuk dipahami karena bahasa Maluku tidak berlaku di luar masyarakat Maluku.

Dalam film, karakter Salawaku digambarkan dengan watak keras kepala ditambah dengan gaya berbicara yang keras. Di Indonesia, suku bangsa lain yang dikenal dengan penekanan suara yang keras adalah Suku Batak dan suku bangsa di Riau Kepulauan. Selain itu, bangsa yang cenderung bersuara keras saat berkomunikasi yaitu bangsa Arab, terutama ketika mereka berbicara kepada orang yang mereka sukai. Bagi orang Arab suara keras menandakan kekuatan dan ketulusan, sedangkan suara lemah mengisyaratkan kelemahan atau tipu daya. Maka dari itu bila kita tidak mengenal karakter budaya ini Ini kemungkinan kita menganggap suara keras mereka sebagai tanda agresivitas, kekasaran atau kemarahan bukan sebagai cerminan ketulusan atau keramahan.

Kesalahpahaman ini terjadi pada Saras selaku masyarakat diluar suku Ambon, yang menganggap Salawaku seperti ‘preman’ karena bersuara keras dan terkesan kasar saat berbicara dengannya. Bahkan anggapan Saras terhadap kesan ‘jahat’ pada orang Ambon sampai pada dugaannya bahwa ia mengira akan dibunuh oleh pemuda desa yang mencari Salawaku. Padahal kondisi tersebut dipicu karena Salawaku berasal dari daerah pesisir pantai, kepulauan Maluku yang masih dikelilingi oleh alam yang begitu luas dengan kondisi kerasnya tiupan angin dan ombak sehingga membuat Salawaku berbicara dengan dialek bergelombang, aksen yang tegas dan volume yang tinggi, kasar dan seperti ‘preman’ yang identik dengan kekerasan.

Secara umum yang terbangun didalam masyarakat adalah generalisasi, kebiasaan ataupun karakter orang-orang tertentu dalam masyarakat dijadikan sebagai sesuatu yang berlaku umum, untuk semua orang. Namun, diluar hal tersebut masih banyak masyarakat Ambon yang berbicara dengan gaya bahasa yang santun. Terlalu sulit untuk menyatakan satu bentuk karakter sebagai label

untuk suatu suku, ada yang terlihat menonjol namun akan hadir orang-orang lain yang berasal dari suku yang sama namun tidak nyaman dengan label yang diberikan tersebut. Penulis melihat bahwa karakter Salawaku yang dihadirkan mampu memberikan contoh yang baik bagi para penonton, sebagai masyarakat dengan keberagaman suku telah memenuhi dasar-dasar etika sosial budaya yang merupakan ketentuan baik buruk yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya di masyarakat seperti bersikap baik terhadap orang lain, mempunyai rasa peduli karena membantu Saras dari masalahnya, serta memberikan perhatian kepada Saras yang mengalami luka di area kaki. Ia menganggap Saras layaknya seperti kakaknya sendiri, maka ia melakukan hal-hal baik kepada Saras

### 3. Bahasa



Pada gambar diatas ialah interaksi yang dilakukan Salawaku dan Saras di atas sampan atau perahu. Selepas terhindar dari pemuda desa yang mencari Salawaku, ia pun bertanya mengapa Saras terus mengikuti dirinya. Saras yang ketakutan langsung mengatakan bahwa ia takut diculik dan dibunuh oleh pemuda desa yang mencari Salawaku. Lantas, Salawaku menolak secara tegas bahwa masyarakat didesanya tidak mempunyai niat jahat seperti itu dengan mengungkapkan pribahasa

Nama dapat melambangkan status, cita rasa budaya, untuk memperoleh citra tertentu (pengelolaan kesan) sebagai nama hoki atau apapun alasannya. Nama pribadi adalah unsur penting identitas seseorang dalam masyarakat karena

interaksi dimulai dengan nama dan kemudian diikuti dengan atribut lainnya. (Mulyana, 2005:274-275).

Karakter masyarakat beretnis Ambon, Maluku yang punya julukan pribahasa ‘Labu Jua Ada Hati’ yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “sekeras-kerasnya watak orang Ambon, punya hati tetap lembut” disampaikan oleh Salawaku pada Saras. Berdasarkan karakter Salawaku yang masih berusia anak-anak, dari segi berbicara terlihat tegas dan kasar namun dibalik itu mereka tetap manusia biasa yang mempunyai hati nurani, rasa peduli dan punya kekurangan. Kepedulian Salawaku terbukti pada gambar di atas, yang akhirnya menolong Saras yang diceritakan terdampar di pulau seorang diri dan tidak tau harus kemana. Julukan ini pun tercermin dari perilaku Salawaku yang terus menolong Saras sebagai seseorang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, dari awal menemukan Saras terdampar di sebuah pulau hingga melakukan perjalanan bersama-sama untuk saling menemukan tujuan. Kekuatan nilai-nilai maupun segala sumber daya sosial budaya membentuk dan mempengaruhi pola tingkah laku individu. Oleh karena setiap individu memiliki lingkungan sosial budaya yang berbeda dengan yang lain maka situasi ini menghasilkan karakter sosial budaya setiap individu yang bersifat unik khusus dan berbeda dengan orang lain. (Aw, 2010:27)

#### **4. Representasi Makanan Khas – Pappeda**



Dalam tradisi masyarakat Kampung Abar di Distrik Ebungfau, Kabupaten Jayapura, Papua, satu keluarga akan makan pappeda dari satu "sempe" sebagai

tanda ikatan kekeluargaan. Pada gambar diatas ialah adegan Binaiya yang sedang bercerita sedikit pada Saras tentang cara membuat Pappeda dengan sederhana dan filosofinya menurut orang Nusa Ina (Pulau Seram) yakni sebagai perekat hubungan antara keluarga, maupun teman-teman. Adegan yang menunjukkan ketiga tokoh mengkonsumsi Pappeda secara bersamaan, dapat dimaknai sebagai makanan ini menjadi media perekat hubungan antar saudara maupun teman, diceritakan Saras yang bertolak belakang dari segi budaya, cara hidup dan kebiasaan dengan Salawaku, Binaiya, dan Kawanua namun tetap hangat saat bertemu. Tidak membedakan ras, agama, dan suku, mereka tetap saling tolong menolong.

Sagu merupakan sumber makanan rakyat yang sudah lama dikenal oleh masyarakat yang daerahnya merupakan penghasil sagu. Olahan makanan yang terbuat dari sagu dengan cara pengolahannya maupun resepnya berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat yang diturunkan secara lisan dari turun-temurun. Subtansinya adalah sagu merupakan makanan rakyat sebagai informasi budaya karena bersifat sederhana (penyajianya apa adanya). (Tulalessy, 2016:90)

### **5. Representasi Minuman Khas – Sopi**



Sopi atau moke adalah sekian dari nama lokal untuk minuman khas yang diproduksi secara turun temurun oleh masyarakat yang ada di berbagai pulau di Nusa Tenggara Timur maupun Maluku. Sopi atau moke yang namanya bervariasi tergantung etnis penyebutnya merupakan atribut yang tidak terlepas dari setiap perayaan upacara tradisional. Meskipun memegang peranan penting dalam acara

adat, tidak berarti minuman organik tradisional ini juga diterima dengan baik di berbagai kalangan di NTT. Selain penting dalam fungsi adat, secara ekonomis tidak dipungkiri bahwa arak organik tradisional memang menjadi sumber pendapatan bagi sekian keluarga yang memiliki tradisi penyulingan (destilasi) arak. (Li, 2013:01)

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pernah mengatakan bahwa minuman tradisional Maluku, yang dikenal dengan nama Sopi, merupakan citra yang terwujud dalam semangat persaudaraan, dan telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Ia melanjutkan bahwa Sopi merupakan hikmat dari Tuhan bagi para leluhur masyarakat Maluku, untuk membuat minuman tradisional tersebut, dan sebenarnya merupakan simbol adat di Maluku, juga dikatakan bahwa Sopi adalah produk yang membiayai hampir sebagian besar kehidupan di daerah-daerah di Maluku, hampir semua menjadi sentra produksi minuman tradisional ini, walaupun masih dikategorikan ilegal. Bukan sekedar untuk dikonsumsi para pemuda mabuk-mabukan, namun minuman tradisional ini sangat berarti dalam melaksanakan upacara adat atau pesta adat, dimana sopi sudah pasti menjadi harga mati. (Zairin, 2019)

Di Flores, Sopi menjadi salah satu konsumsi utama para lelaki Flores. Bukan mereka tak menyukai minuman keras lain, tapi dalam kultur mereka, Sopi dianggap sebagai minuman yang prestisius atau mewah, dan merupakan bagian dari ukuran martabat kehormatan tradisi adat warisan leluhur. Sopi disebut sebagai minuman kekeluargaan. Dikeluarkan saat acara adat maupun menyambut tamu. (Iman, 2018). Dalam film, Kawanua berstatus sebagai anak dari Upulatu (orang terhormat di kampung) maka dapat dimaknai dengan hadirnya Sopi itengah perjalanan Kawanua ialah untuk menunjukkan bahwa itu merupakan bagian dari kehormatan tradisi adat dan sekaligus menyambut Saras di pulau Seram yang berstatus sebagai backpacker atau tamu di Pulau Seram. Representasi diatas diperkuat dengan ungkapan Fredy Frits Maunareng, selaku Ketua Komunitas Wetar Peduli, Tokoh Pemuda Wetardi laman RakyatMaluku.com pada tanggal 28 Mei 2019, bahwa pertemuan informal di rumah-rumah penduduk atau untuk menjamu tamu dirasa kurang lengkap jika tidak ada sopi. Bagi beberapa wilayah

di Maluku yang memproduksi minuman ini, sopi dianggap sebagai pengganti kopi.

### **Representasi pada Aspek Budaya Bukan Benda**

#### 1. Representasi Kepercayaan Adat (Hubungkait Tombak dan Laki-Laki)



Gambar diatas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Kawanua yang diceritakan sebagai pemuda asli Pulau Seram menunjukkan kecerdasannya dalam membuat tombak dan menyelam ke laut kepulauan Maluku untuk mencari ikan. Keahlian Kawanua pun turut diakui oleh Saras selaku pendatang dari kota lain yang memuji keahlian menyelamnya. Dalam referensi lain yang bersangkutan salah satunya penelitian A. Muchaddam Fahham mengatakan bahwa suku Nuaulu merupakan salah satu suku di Pulau Seram yang masih menganut sistem religi warisan leluhur mereka. Secara umum kehidupan suku Nuaulu diikat oleh sistem adat istiadat yang telah mereka warisi secara turun temurun. Adat istiadat itu mengatur pola hidup dan perilaku keseharian mereka. Dalam adat istiadat itulah ditemukan sistem keyakinan dan sistem ritus mereka (Fahham, 2016:21).

Masyarakat suku Nuaulu memiliki beragam ritus sebagai penghormatan mereka terhadap yang supranatural, roh dan roh leluhur. Beragam ritus itu antara lain adalah ritus kehamilan, kelahiran, menuju dewasa, perkawinan, dan kematian. (Fahham, 2016:24). Laki-laki dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat suku Nuaulu memiliki kedudukan yang penting. Anak lakilaki sejak kecil telah ditempa sehingga ketika mereka dewasa, mampu bertindak sebagai pria yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun pada sesama. Kedewasaan seorang laki-laki ditentukan berdasarkan kemampuannya menggunakan senjata, panah dan

tombak. Kelangsungan hidup masyarakat suku Nuaulu sangat ditentukan oleh ombak dan panah. Pada masa lalu, kedua alat ini berfungsi untuk berburu dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Intinya, kemampuan dan ketrampilan laki-laki menggunakan tombak dan panah menjadi patokan utama dalam menentukan tingkat kedewasaan seorang laki-laki. Penelitian Fahham turut didukung oleh beberapa penelitian lain yang berkaitan. Misalnya dalam penelitian Utami (2015) yang mengatakan bahwa tombak dan panah telah menyatu dengan pribadi laki-laki suku Nuaulu, Pewarisan nilai-nilai budaya yang terdapat pada tombak dan panah dilakukan sejak anak laki-laki masih berusia muda. Pada usia 5-6 tahun anak laki-laki sudah diperkenalkan dengan kedua senjata ini. Mulai dari cara memegangnya, menimbang-nibangnya sampai akhirnya ia memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakannya. (Fahham, 2016:27-28).

Proses pewarisan nilai-nilai ini dilakukan secara langsung. Misalnya dengan mengikutsertakan sang anak dalam kegiatan berburu. Proses ini memakan waktu yang cukup lama selama beberapa tahun. Lamanya waktu yang diperlukan tidaklah sama bagi setiap anak, ada yang cepat tapi ada juga yang lambat, tergantung potensi sang anak. (Fahham, 2016:28)

Dalam scene yang sama juga dikatakan bahwa Salawaku mampu berenang dan mencari ikan dengan sangat cepat. Hal ini selaras dengan isi penelitian Utami dan Fahham yang sudah dijelaskan diatas bahwa pewarisan nilai-nilai budaya yang terdapat pada tombak dan panah dilakukan sejak anak laki-laki berusia 5-6 tahun hingga akhirnya ia mahir berenang dan menggunakan tombak untuk mencari ikan. Sementara itu, Kawanua sebagai laki-laki dewasa, sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin adat ialah penduduk asli pulau Seram yang mempunyai rasa peduli terhadap orang lain terlebih peduli dengan citra dirinya dan ayahnya yang merupakan seorang pemuka adat setempat.

Namun di sisi lain, terdapat semacam “kecenderungan bias gender” yang secara diam-diam dilabelkan pada peran laki-laki dan perempuan di Maluku Tengah (Seram). Seperti ditemukan dalam ungkapan seperti ini, “Anak laki-laki pegang parang salawaku, Anak perempuan pegang sempe aru-aru”. Sempe aru-aru adalah tempat untuk memasak papeda. Ini adalah simbol dari keterampilan

memasak; sedangkan laki-laki dituntut terampil memainkan parang salawaku. Kualitas-kualitas tersebut dapat menentukan tingkat kedewasaan dan kematangan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan, bahkan menentukan kesiapan untuk menikah. Seperti dalam ungkapan lainnya yang berbunyi : “Kalau belum sanggup pegang sempe dan aru-aru, jangan cepat terima lamaran pria”, dan “kalau belum sanggup pegang parang salawaku, jangan melamar gadis orang” (depdikbud 1996/1997).

Pada gambar 4 diatas dalam representasi makanan khas budaya benda dari Maluku ialah adegan Binaiya yang sedang bercerita sedikit pada Saras tentang filosofi makanan Pappeda, bahwa menurut orang Nusa Ina (Pulau Seram) Pappeda dibuat sebagai perekat hubungan antara keluarga, maupun teman-teman. Hubungan personal yang diamati dalam film Salawaku ini dapat diibaratkan seperti filosofi Pappeda yaitu hubungan antara kakak dan adik yang menguat karena rasa kebersamaan (budaya kolektif) dalam hubungan kekeluargaan yang erat. Di dalam film Salawaku ini terlihat pada alur cerita Salawaku yang melakukan perjalanan jauh dalam mencari keberadaan sang kakak yang tiba-tiba pergi meninggalkannya. Disinilah terbentuk alur hubungan interpersonal antara kakak beradik. Tersirat bahwa ada kekuatan batin antara seorang kakak dan adik, yaitu antara Bianiya sebagai seorang kakak yang percaya pada adiknya seorang yaitu Salawaku. Kekuatan batin yang terbentuk dari seorang adik yang mengkhawatirkan kakaknya dan membuatnya ingin mencari kakaknya. Dan dialog budaya dengan sentuhan personal antara hubungan kakak dan anak ini, pada akhirnya menjawab segala permasalahan.

## **KESIMPULAN**

Budaya menjadi aspek yang penting karena merupakan sebuah identitas yang menunjukkan karakter berbeda dari setiap masing-masing individu. Budaya adalah landasan jembatan komunikasi. Apabila budaya beraneka ragam, tentu praktik-praktik komunikasi yang dilakukan juga akan bermacam-macam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, hasil representasi pada film Salawaku pada aspek budaya benda dan budaya bukan benda model budaya

Schein yang telah dijelaskan di atas diperoleh kesimpulan. Pertama, budaya benda ialah budaya yang boleh dilihat atau didengar (visible and audible pattern) terdiri atas : (1) bahasa, (2) Seni Budaya (Tari Cakalele), (3) Produk makanan/minuman (Pappeda dan Sopi). Kedua, budaya bukan benda yaitu budaya yang abstrak namun hadir nyata dalam kehidupan masyarakat yaitu: (1) Kepercayaan/ritual adat dan (2) Hubungan interpersonal dalam alur cerita pencarian seorang adik terhadap sang kakak, disebabkan adanya kekuatan batin yang terjalin antara kakak beradik. Film Salawaku menjadi media promosi wisata, nilai budaya serta kebudayaan Maluku yang cerdas sekaligus berbeda, dengan tidak meletakkan iklan dengan tujuan komersil. Menyajikan pengenalan karakter orang Ambon, memperkenalkan makanan-makanan lokal khas Maluku, serta menampilkan tempat-tempat pariwisata yang eksotis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. (2004). *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Argadia, Riva, dkk. (2016). *Penyusunan Data Awal Referensi Nilai Budaya Tak Benda Kota Ternate Provinsi Maluku Utara : Tarian Cakalele*. Ternate : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aw, Suranto. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
- Fahham, A Muchaddam. (2016). *Sistem Religi Suku Nuaulu Di Pulau Seram Maluku Tengah*. Jurnal Aspirasi Vol. 7, No. 1, Juni 2016. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Li, Dominggus Elcid. (2013). *Industrialisasi Sopi di NTT Yang Berkelanjutan*. Briefing Paper 001. [www.irgsc.org](http://www.irgsc.org)
- Miller, Katherine. (2006). *Organizational Communication: Approaches and Processes* (6th ed.). Belmont C/A. Thomson and Wadsworth.
- Mulyana, Deddy (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Puspasari, C, dkk. (2017). Pengaruh Globalisasi Dalam Film Indonesia: Representasi Budaya Dalam Film Nagabonar dan Nagabonar Jadi 2. *Cover Age 8: Journal Of Strategic Communication*, Volume 8, No.1, September 2017. Universitas Pancasila
- Tulalessy, D, Quin. (2016). Sagu Sebagai Makanan Rakyat dan Sumber Informasi Budaya Masyarakat Inanwatan : Kajian Folklor Non Lisan. Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa : Melanesia, Volume 01, Nomor 01, Agustus 2016. UNIPA Manokwari
- Iman, Mustafa. (2018). (<https://lokadata.id/artikel/air-kekeluargaan-itu-bernama-sopi>) diakses tanggal 19 Agustus 2019

## **OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN DI ACEH: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara**

**Teuku Alfiady<sup>1)</sup> & Risna Dewi<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh  
email: *afliady@unimal.ac.id*

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh  
email: *risna.dewi@unimal.ac.id*

### **ABSTRAK**

Dalam rangka pengentasan kemiskinan. Besarnya jumlah dana yang dikucurkan melalui dana otonomi khusus tidak secara otomatis memberikan solusi atas kemiskinan yang sebenarnya sebagai sumber disintegrasi pada masa itu. Kegagalan pemanfaatan dana otsus terlihat jelas dari posisi Aceh sebagai sepuluh daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 839 ribu jiwa atau 15,97 persen pada tahun 2018. Lebih buruknya kemiskinan justru tidak menurun, dimana kemiskinan justru semakin meningkat. Pada tahun 2017 masyarakat miskin di Aceh 829 ribu jiwa atau naik 10 ribu jiwa pada tahun selanjutnya. Ini merupakan fakta empirik yang memperlihatkan adanya kesalahan dalam tata kelola keuangan. Melimpahnya kekayaan dan kucuran uang ternyata tidak semana-mena menjadikan Aceh lebih baik. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan fenomena di atas. Dengan memahami realita kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai buruh pada usaha-usaha pembuatan batu bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Mereka bekerja tanpa ada jaminan sosial dan upah yang layak, sedangkan pekerjaan yang dijalani berhadapan dengan resiko yang besar. Secara praktis pemberian otonomi khusus dapat menanggulangi persoalan disintegrasi, namun otonomi khusus belum dapat menjawab persoalan yang substansial yaitu penanganan kemiskinan secara absolut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana informasi digali secara mendalam mungkin dari sumber yang kredibel dan relevan yang dapat menjawab persoalan yang diajukan.

**Kata Kunci:** *Otonomi Khusus, pengentasan kemiskinan dan pelaku usaha batu bata*

### **PENDAHULUAN**

Dana Otonomi Khusus (otsus) adalah sebuah anugerah bagi Aceh dalam upaya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang telah berlangsung berkepanjangan. Kemiskinan yang berlangsung di Aceh hingga saat ini menjadi perhatian masyarakatnya. Betapa tidak banyaknya dana otsus yang dikucurkan

oleh pemerintah pusat (RI) melalui dana Otsus dengan angka yang fantastis ternyata tidak memberikan perubahan yang sangat fundamental bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, dana yang besar tersebut justru menghadirkan permasalahan baru bagi pembangunan Aceh yaitu ketimpangan pembangunan. Besarnya anggaran yang dimiliki ternyata tidak sejalan dengan reformasi pembangunan yang mengarah pada pengetasan kemiskinan.

Dana otsus yang diharapkan sebagai obat mujarab dalam memberikan kesembuhan penyakit untuk warga “miskin” akibat konflik senjata dan sosial yang berkepanjangan ternyata hanya mampu mensejahterakan masyarakat Aceh secara sepihak. Faktanya pada tahun 2018 angka kemiskinan di Aceh mencapai 839 ribu jiwa (15,97 persen) dan masuk ke dalam 10 daerah termiskin di Indonesia pada Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut meningkat ketimbang tahun sebelumnya (2017) sebanyak 10 ribu jiwa dari 829 ribu jiwa (15,92 persen). Besarnya angka kemiskinan tersebut tidak sejalan dengan besarnya dana otsus yang mencapai 8,03 Triliun rupiah pada tahun 2018 dan 2017.

Dana otsus merupakan kompensasi pemerintah RI terhadap pemerintah Aceh atas kesepakatan damai yang dicapai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dengan alokasi dana otonomi khusus. tahun 2008 adalah sebesar Rp 3,59 Triliun dan terus meningkat setiap tahunnya sesuai perkembangan DAU Nasional. Total dana otsus yang sudah diterima Aceh sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp 56,67 Triliun. Jumlah dana otsus yang sudah diterima merupakan jumlah yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dalam rangka pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai pernyataan Gubernur Aceh:

Tabel 1: Dana Otonomi Khusus Dari Tahun 2008-2018

No	Tahun Anggran	Jumlah Dana Rp
1	2008	3,5 triliun
2	2009	3,7 triliun
3	2010	3,8 triliun
4	2011	4,5 triliun
5	2012	5,4 triliun
6	2013	6,1 triliun
7	2014	8,1 triliun

8	2015	7,0 triliun
9	2016	7,7 triliun
10	2017	8,0 triliun
11	2018	8,03 triliun

(Sumber: Bappeda Aceh)

Fakta di atas menyajikan satu pertanyaan penting apakah kekayaan menjadi satu-satunya faktor dalam mengetaskan persoalan kemiskinan? pada kenyataannya, faktor politik adalah faktor yang paling dominan memainkan peranan bagi munculnya penduduk miskin baru akibat berbagai kebijakan yang dibuat. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor infrastruktur yang terbatas menjadi penyebab makin banyaknya kemiskinan di Indonesia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang berlimpah namun apabila hidup di daerah yang tertinggal dengan infrastruktur yang terbatas maka besar kemungkinan individu tersebut akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi khusus di Aceh akan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya karena pemerintah di daerah lebih dekat dengan warga daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah di daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat.

Ketidak merataan distribusi dana ini tampak jelas jika melihat kehidupan masyarakat di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang belum tersejahterakan secara utuh. Ulee Pulo salah satu desa sebagai penghasil batu bata terbesar di Aceh Utara, hampir seluruh warganya bekerja pada sektor tersebut baik sebagai pemilik maupun sebagai buruh. Baik bekerja pada pembuat dasar, pembakar, maupun pengangkut batu bata. Ketergantungan mereka terhadap sektor ini pada satu sisi menjadi nilai tambah bagi perekonomian keluarga, akan tetapi di sisi yang lain sektor ini sangat riskan akan ancaman kegagalan terutama ketidak pastian pasar serta penyertaan modal kerja yang tidak pernah difikirkan oleh negara

Ketika musim sepi pemesanan terkadang mereka menjual batu bata jadi di bawah harga standar (hanya cukup untuk biaya operasional modal dasar) perbutirnya. Banyak diantara pelaku usaha ini mengalami kebangkrutan sehingga tidak lagi mampu memproduksi batu bata lainnya. minimnya pendapatan ini berujung pada penyertaan modal yang didapatkan dengan cara hutang di Bank maupun pada individu dengan sistem “raintenir” dengan bunga yang besar. Pelaku usaha ini harus menyisihkan dari sebagian pendapatan yang mereka dapatkan untuk cicilan hutang.

### **LANDASAN TEORI**

Batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli pemerintahan. Perbedaan sudut pandang para ahli mengakibatkan batasan yang pasti mengenai konsep desentralisasi sulit diperoleh. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh Koswara (2005) memberikan batasan bahwa desentralisasi adalah :

*Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration (i.e. delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies.*

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat proses penyerahan (transfer) kekuasaan dari pemerintah pusat (the national capital) dengan dua variasi yaitu (1) melalui dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat instansi vertikal di daerah atau (2) melalui devolusi (pengalihan tanggung jawab) kekuasaan pada pemeritaha yang memiliki otoritas pada daerah tertentu atau lembaga-lembaga otonom di daerah.

Definisi lainnya yang terdapat dalam Hand Book of Public Administration yang diterbitkan PBB mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan pemerintah berikut fungsi-fungsinya yang dibedakan menjadi (1) dekonsentrasi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan secara administratif kepada instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah dan (2) devolusi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan kepada pemerintah

loka yang memiliki kekuasaan pada wilayah tertentu dalam ikatan suatu negara sehingga terwujud daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi desentralisasi sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Otonomi Daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan

(kemampuan) pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Penekanan Otonomi daerah di Indonesia dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijabarkan semua urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga kabupaten/kota, yaitu :

1. Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di suatu daerah
2. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu Daerah
3. Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggungjawab masyarakat
4. Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia
5. Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah, dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan
6. Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Sidik, 2002). Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna,

manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai

## **METODE PENELITIAN**

Secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitian ini didasari pada kondisi alamiah (*natural setting*). Pendekatan ini juga merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang alamiah. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya mendasar pada naturalisasi atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Dalam paradigma penelitian ini realitas dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna yang disebut dengan paradigma postpositivisme anonimnya ialah positivisme yang mengembangkan metode kuantitatif. Sugyono (2014) memberikan penekanan pada objek yang diteliti merupakan objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uraian Umum Gampong Ulee Pulo**

Gampong Ulee Pulo merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Utara yang berada di Kecamatan Dewantara. Bagian barat bersebelahan dengan Desa

Ulee Releung, sebelah Selatan dengan Desa Releut timur, wilayah Barat bersebelahan dengan Desa Paloh Lada dan Bangka, sedangkan wilayah tenggara bersebelahan dengan Desa Bangka. Desa ini termasuk salah satu desa yang memiliki keuntungan geografis, dimana keberadaan desa ini tidak jauh (hanya sekitar 1 sampai 2 KM) dengan pusat industri PT. Pupuk Iskandar Muda dan pusat kantor administrasi sekaligus pusat perbelanjaan Keude Krueng Geukuh.

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Ulee Pulo**

<b>Tahun</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	1.938	2.120	2.073	2.098	2.140

*Sumber, Dewantara dalam angka, 2017*

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa angka pertumbuhan penduduk di Gampong Ulee Pulo cenderung stabil, yaitu cenderung naik turun. Data terakhir yang didapatkan bahwa jumlah penduduk sebesar 2.140 jiwa

**Tabel 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah penduduk</b>
Laki	1.069
Perempuan	1.071

*Sumber: Dewantara dalam Angka, 2017*

**Tabel: 3 Jumlah penduduk berdasarkan pada Pekerjaan**

<b>Pertanian</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>Transportasi</b>	<b>Jasa dan lainnya</b>
69	343	36	72	29

*Sumber, Dewantara dalam Angka, 2017*

Data di atas memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Gampong Ulee Pulo bekerja sebagai buruh pada sektor perindustrian. Industri-industri rumahan telah menopang kehidupan keluarga masyarakat Gampong Ulee Pulo. Industri yang paling banyak ditemukan ialah industri pengelolaan batu bata dalam bentuk pengelolaan bata basah, dan pembakaran. Pertumbuhan industri batu bata ini juga

mendorong untuk bertumbuhnya jasa transportasi. Industri ini termasuk industri yang memiliki mobilitas yang tinggi.

Untuk mendapatkan batu bata jadi, terlebih dahulu pengusaha mendatangkan tanah yang dipasok dari luar Desa, kemudian batu bata yang sudah dicetak (masih dalam keadaan basah) diangkut ke tempat pembakaran (panglong: *dapu bata*), selesai dibakar selama 3 sampai 4 hari bata kemudian diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka kepada konsumen. Adanya mobilitas ini mendorong untuk tumbuh dan berkembangnya jasa transportasi yang umumnya juga dimiliki oleh masyarakat setempat.

Secara geografis, Gampong ini tidak memiliki lahan pertanian yang memadai untuk melakukan cocok tanam. Lahan persawahan tidak luas, dan tidak memiliki saluran irigasi. Masyarakat yang ingin bersawah biasanya ke desa-desa tetangga yang memiliki kawasan persawahan yang luas dengan infrastruktur irigasi yang memadai. Seperti di Gampong Releut Barat dan Releut Timur. Sedangkan di Gampong Ulee Pulo area persawahan umumnya adalah sawah dengan tadah hujan. Mereka bekerja sekali atau dua kali dalam setahun.

Masyarakat Ulee Pulo yang bekerja pada sektor pertanian ialah menanam tanaman muda seperti cabai, sayuran, ubi-ubian yang tidak memerlukan lahan luas. mereka memanfaatkan pekerangan dan lahan kosong di belakang rumah. Desa ini tidak memiliki industri pertanian yang besar, layaknya desa-desa yang berada di pedalaman. Struktur tanah yang tandus dan sebagai berkarang tidak begitu menguntungkan bagi masyarakat setempat jika mengandalkan pada sektor pertanian seutuhnya

Sedangkan usaha (jasa lainnya) ialah masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Karena desa ini berada pada daerah lintasan Banda Aceh – Medan, banyak warga yang membuka usaha perdagangan di pusat keramaian yang terletak di Dusun III.

## Gambaran Usaha Batu Bata

### Gambar I: Dapur pencetakan batau bata basah



Sumber: dokumentasi milik pribadi.

Keterangan gambar: dapur batu bata ini milik Nur Aini yang terletak di Dusun I Gampong Ulee Pulo. Dapur pencetakan ini dapat menampung ribuan bata basah yang dikerjakan oleh keluarga. Pekerja biasanya terdiri dari anak famili.

Proses produksi batu bata memiliki rangkaian kegiatan yang panjang, memiliki pembagian kerja yang jelas. Misalnya pekerjaan mana yang mesti dilakukan oleh perempuan dan laki-laki atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kedua jenis gender ini. Proses pembuatan batu bata pertama kali dengan menghancurkan tanah dengan terlebih dahulu dibasahi agar tanah nantinya mudah dimasukkan ke dalam cetakan dan agar struktur bata yang dicetak lebih padat. Proses ini dalam bahasa Aceh disebut dengan (*lhoeh*) yang bisa dilakukan dengan menggunakan kaki dengan cara diinjak-injak, menggunakan hewan seperti kerbau atau sapi dan bisa juga menggunakan mesin traktor. Saat ini masyarakat Ulee Pulo umumnya menggunakan mesin traktor dengan sistem sewa atau dimiliki sendiri. pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh laki-laki, karena berat dan susah terutama jika menggunakan mesin traktor dan menggunakan hewan ternak.

Tanah yang sudah dihancurkan kemudian diangkut ke dalam gudang pencetakan (sal bata) yang letaknya bersebelahan. Mereka yang bekerja mencetak bata adalah perempuan dari berbagai usia dan status. Pekerjaan ini relatif mudah dan tidak membutuhkan tenaga yang begitu berat ketimbang pekerjaan lainnya dalam memproduksi batu bata. Mereka yang bekerja di sal bata diupah sesuai dengan jumlah cetakan bata yang dihasilkannya. Untuk satu cetakan upah yang diterima 50 rupiah, jika banyak cetakan yang diselesaikan banyak pula yang hasil yang didapat. Dalam satu sal bata melibatkan 3-5 pekerja perempuan dan bisa lebih sesuai dengan ukuran dan target bata yang harus diselesaikan. Karena pekerjaan ini relatif mudah dan tidak membutuhkan kemampuan khusus banyak pekerja hanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bukan sebagai penghasilan utama. Sebagian diantara pekerja juga masih berstatus mahasiswa diantaranya ialah Fitrianti mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Fitrianti sudah bekerja sebagai pencetak batu sejak dua tahun lalu hingga sampai saat ini, pekerjaan ini ia lakukan di sela-sela kesibukan kuliah dan ketika libur semester. Terlebih saat ini ia tinggal menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Antropologi sehingga memiliki waktu luang yang relatif lebih banyak ketimbang semester-semester sebelumnya.

Dalam sehari ia bisa mencetak 500 batu bata dengan jam kerja dari jam 08 pagi sampai dengan jam 13.00 uang yang dihasilkan rata-rata 25.000 s.d 30.00 rupiah perhari.

“sangat tergantung dari berapa banyak bata yang mampu saya cetak, kalau banyak yang saya cetak, uang yang saya dapatkan juga banyak. Pokoknya semua tergantung dari hasil cetakan. Uangnya sendiri bisa diambil langsung setelah kerja, atau seminggu sekali boleh juga sebulan sekali. Tergantung toke juga, kalau dia punya uang ketika hari itu saya meminta uangnya langsung.”

Fitrianti biasanya bekerja di sal bata milik Bibinya, tapi saat ini ia dan bibinya sedang bekerja di sal bata milik orang lain yang sedikit lebih jauh dari rumahnya, sedangkan milik bibinya tepat berada di sebelah rumah. Bibinya sudah lebih tiga bulan tidak lagi mencetak bata, bibinya tidak memiliki modal untuk

membeli tanah. Dalam satu truck empat kodi tanah untuk batu bata biasa dijual hanya 400.000 rupiah, saat ini sudah 500.000 ribu rupiah. Tidak tersedianya modal usaha ini memaksa bibinya untuk bekerja di sal bata milik orang lain.

Kepemilikan modal memang menjadi persoalan utama pengusaha bata, harga batu bata yang tidak stabil dan sering sekali harganya tidak menguntungkan pelaku usaha membuat mereka enggan untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.

Tahapan selanjutnya setelah bata dicetak ialah mengangkutnya ke tempat pembakaran (panglong). Biaya pengangkutan tidak dibebani kepada pencetak bata basah, pemilik panglong biasanya yang menanggung seluruh biaya transportasi dan biaya angkut bata basah. Pencetak bata basah akan dibayar oleh pemilik panglong sesaat bata basah tersebut diangkut dengan sitem pembayaran *cash* maupun pembayaran ketika batu bata yang sudah dibakar laku. Distribusi/pengangkutan bata basah ke lokasi pembakaran secara keseluruhan dikerjakan oleh laki-laki menggunakan kendaraan roda empat bak terbuka.

Bata yang sudah diangkut kemudian dimasukkan ke dalam panglong pembakaran untuk dikeringkan dalam kurun waktu satu minggu. Bata yang basah kemudian dikeluarkan ketika sudah berwarna kemerah-merahan. Proses pembakaran dilakukan oleh laki-laki, kecuali pemindahan dari dalam kendaraan pengangkutan ke dalam panglong yang juga bisa dilakukan oleh perempuan. Sedangkan memasukkan kayu, menjaga api agar selalu hidup dalam besaran yang normal pengecekan secara rutin selama 24 jam dilakukan oleh laki-laki.

Untuk proses pembakaran batu bata membutuhkan waktu 4 sampai dengan satu minggu untuk mendapatkan batu yang sudah siap dipasarkan. Bahan bakar berupa kayu kering dari pohon karet yang ditatangkan dari beberapa daerah seperti Aceh Timur maupun pedalaman Aceh Utara.

Pekerjaan terakhir pemindahan dari dalam panglong pembakaran ke dalam truck pengangkutan untuk diantarkan ke pelanggan masing-masing. Pekerjaan ini terlihat unik dan menarik. Meskipun pekerjaannya cukup keras dan melelahkan, banyak perempuan yang terlibat. Mereka secara bersamaan memindahkan batu bata dan berbaur bersama laki-laki dalam segala kondisi. Ketika proses pemuatan

batu bata selesai mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah batu bata yang diangkut ke dalam trusk

Secara keseceluruhan pengerjaan batu bata secara keseluruhan dilakukan dengan cara-cara tradisional, manual dan menggunakan peralatan-peralatan kompensional. Sentuhan mesin apalagi digital tidak akan ditemukan, bahkan atap panglongnya sendiri secara umum atapnya terbuat dari daun rumbia kering yang mudah terbakar.

Minimnya penggunaan peralatan modern dalam proses pembuatan batu menjadikan biaya produksi cukup mahal dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Modernisasi pembuatan batu bata sulit diterima bagi pelaku usaha batu bata, dikarenakan konsumen lebih memilih batu bata yang dikerjakan secara manual. Penggunaan mesin pemotong dan pemadat umpunya, menurut beberapa informan dahulu ada beberapa pengusaha yang menggunakan mesin tersebut, akan tetapi pemasaran produk sangat sulit.

“dulu pernah ada di sini (Ulee Pulo) yang menggunakan mesin pemadat, tapi tidak laku, susah mendapatkan pelanggan” Ujar Haji Madi.

Haji Madi (51) sendiri merupakan pengusaha batu bata yang memiliki belasan panglong batu bata yang kesemuanya berada di Gampong Ulee Pulo. Ia memulai usahanya sejak masih remaja dan berawal dari sebagai pekerja lepas pada salah satu dapur bata milik keluarga. Saat ini ia memiliki puluhan karyawan yang bekerja pada dapur batanya.

### **Kemiskinan Pengusaha Batu Bata**

Menarik untuk dipahami mengapa mereka (pelaku usaha batu bata) menghadapi persoalan kemiskinan. Padahal mereka memiliki perkerjaan, berpenghasilan cukup, berada pada lokasi usaha yang strategis, berdasarkan letak geografi mereka berada di kawasan berdekatan dengan kota kecamatan, kawasan industri dan berada di lintasan jalan raya. Bukankah kesemua hal tersebut mampu meningkatkan derajat hidup mereka dan mampu mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Ditambah lagi dengan adanya otonomi khusus yang dimiliki oleh Aceh secara keseluruhan dengan jumlah yang fantastis. Apakah dana tersebut tidak menyentuh para pekerja dan pengusaha batu bata secara langsung?

Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi fokus dasar dari penelitian ini. Peneliti melihat persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh pelaku usaha batu bata di desa Ulee Pulo merupakan persoalan yang kompleks, tapi tidak begitu rumit untuk menemukan jalan keluarnya ketimbang permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat miskin yang tinggal di wilayah pedesaan dan di kawasan terpencil yang memiliki jarak yang jauh dengan pusat pemerintahan

Dalam arti proper kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional. Chambers (dalam Nasikun) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) kemiskinan (proper),
- 2) ketidakberdayaan (powerless),
- 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency),
- 4) ketergantungan (dependence), dan
- 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk

- a) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

- c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan pada pelaku industri batu bata dapat dikategori sebagai kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak memihak kepada mereka. Kebijakan pembangunan baik pemerintah daerah, provinsi maupun kebijakan nasional tidak pernah menyentuh pelaku industri batu bata secara langsung. Seperti pendampingan usaha, mendorong untuk dilakukannya adaptasi terhadap teknologi-teknologi pengelolaan batu bata, memberikan jaminan (asuransi) jika mereka gagal dalam mendapatkan pasar penjualan, memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha.

Sama halnya dengan dana otonomi khusus yang dimiliki oleh Aceh juga tidak kebijakannya tidak menyentuh pelaku industri batu bata ini. Melalui wawancara yang peneliti lakukan, baik aparatur desa maupun pelaku usaha tidak pernah mendapatkan bantuan modal dalam bentuk apapun melalui dana otonomi khusus dari pemerintah provinsi Aceh.

Kebijakan ini menjadikan pengusaha batu bertambah miskin dan semakin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Salah satu informan Muhammad Reza yang sudah tidak lagi menjalankan usahanya, sebab tidak ada lagi modal menjelaskan bahwa mereka seakan bekerja tanpa ada sedikitpun intervensi dari pemerintah.

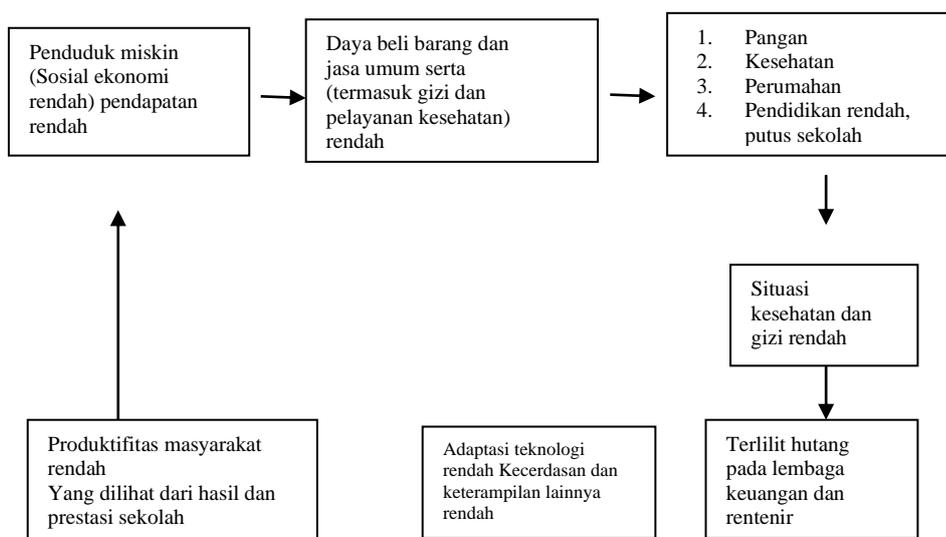
“tidak tau pasti mengapa kami tidak dipandang oleh negara (pemerintah). Apakah usaha ini tidak dianggap penting? Padahal usaha (batu bata) telah mampu menghidupkan banyak ekonomi rumah tangga dan menyekolahkan anak-anak. Anak-anak mudah seperti kami hampirsemua bekerja di batu bata”

Kebijakan pembangunan yang tidak menysasar kelompok industri batu bata memberikan dampak serius pada ketimpangan pembangunan di tengah masyarakat. Upah yang minim diterima oleh pekerja (baik pemotong bata basah, pengangkut, maupun yang membakara) tidak seimbang dengan pendapatan yang dihasilkan oleh pengusaha batu bata. Kesenjangan pendapatan ini menimbulkan kesenjangan seirus pada masyarakat. Pekerja tetap menjadi miskin, sedangkan pemilik modal menikmati kekayaan dari hasil penjualannya.

Kebijakan strategis pada dasarnya sangat diperlukan untuk memahami persoalan ini. Yaitu kebijakan sosial yang dapat melindungi kelas pekerja dari berbagai ancaman, bahkan ancaman jika pada suatu saat mereka harus berhenti dari pekerjaannya. Diantaranya ialah negara harus mampu menjamin keselamatan mereka dalam bekerja melalui jaminin sosial ketenaga kerjaan. Jadikan mereka sebagai pekerja yang terlindungi

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh masyarakat yang bekerja pada industri batu bata di Gampong Ulee Pulo tidak terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan. Tidak ada yang dapat menjamin keselamatan dan keberlangsungan mereka dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Gambaran kemiskinan pada pelaku industri batu bata dapat dilihat pada skema berikut:



Kemiskinan pada pekerja industri batu bata dapat dicirikan sebagai berikut:

1. rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan,
2. mempunyai tingkat pendidikan yang rendah,
3. kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja),
4. kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan
5. kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa untuk membuka usaha industri ini memerlukan modal yang tidak sedikit, baik dari pembangunan infrastrukturnya (dapur pengolahan dan dapur cetak), modal kerja (tanah dan kayu). Maka banyak warga memilih untuk menjadi pekerja ketimbang membuka produksinya sendiri. mereka pada akhirnya menjadi buruh pada industri ini. Perempuan umumnya menjadi buruh pemotong bata basah dengan rata-rata penghasilan 35.000 hingga 50 ribu rupiah perharinya. Sedangkan laki-laki bekerja pada buruh angkut dan buruh pembakar bata dengan penghasilan 50 ribu sampai 100 ribu rupiah perharinya. Tergantung dari produktifitas mereka.

Masalah penyertaan modal usaha menjadi persoalan utama pelaku usaha batu bata. Pelaku usaha tidak memiliki modal yang mupuni agar usaha mereka berkelanjutan. Untuk satu kali produksi dibutuhkan modal 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Dampak yang lebih buruk dihadapi oleh Muhammad Reza, usaha pembakaran batu bata yang telah dijalaninya bersama keluarga harus tutup karena tidak memiliki modal usaha lanjutan. Pembangunan dapur pembakar batu bata awal mulanya dibangun menggunakan dana pinjaman dari salah satu bank. Hasil usahanya digunakan untuk menutupi cicilan hutang bank yang dibayar tiap

bulannya. Setelah beberapa tahun usaha tersebut berjalan Muhammad Reza terpaksa tidak lagi melanjutkan usahanya.

Faktor lain penyebab rendahnya produktivitas ekonomi kelompok miskin dan rentan di wilayah KTI adalah belum optimalnya skala usaha dan keterhubungan dengan pasar yang lebih luas. Di satu sisi, masyarakat miskin dan rentan terlibat dalam sektor ekonomi yang produktivitasnya rendah serta komoditas yang belum terhubung dengan pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan skema kerjasama antara swasta dan kelompok masyarakat serta adopsi teknologi dan inovasi yang masih rendah. Akumulasi dari kondisi tersebut membuat sektor ekonomi produktif di wilayah KTI terjebak pada skema business as usual dan berkuat pada sektor-sektor usaha yang sudah jenuh.

Bekerja sebagai buruh pemotong bata basah maupun pengangkut batu bata ke dalam truk pengangkutan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Penghasilan yang didapatkan dari dua jenis pekerjaan tersebut rata-rata hanya Rp. 50.000 bahkan terkadang tidak sampai. Terutama pada pekerja pemotong bata yang seharusnya hanya mampu memotong dengan maksimal 700 keping bata dikali dengan harga perkepingnya Rp 50 = Rp. 35.000

### **Pentingnya Skema Kerjasama**

Penelitian ini menemukan bahwa usaha batu bata masuk dalam kategori usaha-usaha yang mudah jenuh. Artinya banyak pengusaha batu bata yang mengalihkan usahanya pada usaha lainnya jika dianggap tidak lagi menguntungkan. Keberlanjutan usaha sangat tergantung pada permintaan pasar, pada musim sepi pembeli usaha ini akan tutup dan kembali bergeliat jika permintaan meningkat. Kondisi ini sangat berdampak pada sistem ketenaga kerjaan dan pendapatan rutin anggota keluarga. Tidak jarang ditemukan banyak rumah produksi batu bata yang berhenti bukan dikarenakan terbatasnya bahan baku yang tersedia. Melainkan pengusaha yang tidak memiliki modal lanjutan akibat berhentinya produksi pada priode tertentu.

Permasalahan ini bermuara pada komoditas yang belum terhubung dengan pasar yang lebih luas, pengembangan skema kerjasama antara swasta dan kelompok masyarakat serta adopsi teknologi dan inovasi yang masih rendah. Pasar utama dari batu bata ini ialah pasar domestik yang umumnya berasal dari Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan permintaan dari luar dua daerah ini sangat sedikit sekali. Pengusahaan tidak mampu menembus pasar luas, karena usaha yang sama juga hampir ditemukan di setiap wilayah di Aceh. Kabupaten Bireun misalnya, daerah ini memiliki beberapa tempat yang jumlah produksi batu batanya lebih besar ketimbang wilayah Aceh Utara.

Ekspansi pasar ke luar wilayah mungkin saja terjadi jika pasokan dari wilayah daerah masing-masing tidak mencukupi untuk kebutuhan domestik. Celah inilah yang kemudian membuka peluang bagi pengusaha batu bata untuk menjamah pasar luas. Namun, pendekatan seperti ini sulit untuk dijangkau. Pengusaha batu bata tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi pasar secara komprehensif. Jaringan bisnis selama ini hanya terjalin pada komunikasi-komunikasi yang bersifat personal dan terbatas.

Selanjutnya, pengembangan skema kerjasama antara swasta dan kelompok masyarakat. Swasta berperan penting dalam upaya untuk melanjutkan industri ini, sehingga industri ini tidak tergantung pada proyek-proyek pemerintah yang bertumpu pada periode-periode tertentu. Pada saat musim proyek industri ini kewalahan dalam mencukupi kebutuhan pasar, banyak permintaan yang tidak terpenuhi. Sedangkan pada musim sepi proyek mereka berhenti produksi. Swasta berperan dalam menutupi kekosongan ini

Upaya penghubungan kerjasama ini tentu tidak dapat dilakukan melalui pengusaha secara individu, asosiasi pengusaha batu bata diperlukan untuk menjangkau pasar secara terbuka atau melalui sistem pengendalian koperasi yang dibangun secara bersama. Sistem monopoli seperti pada satu sisi menguntungkan pengusaha agar usaha tetap berjalan dengan jangkauan pasar yang luas. sisi lainnya kesiapan sumber daya manusia mesti mupuni. Pengusaha tidak hanya dituntut untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap pakai mereka mesti dipersiapkan untuk memahami industri batu bata sebagai industri strategis.

Sejauh ini pengusaha batu bata belum terhubung satu dengan lainnya, jaringan sesama pengusaha masih sebatas pada jaringan persahabatan dan kerjasama yang bersifat temporer dan terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami karena memang dalam mekanisme kerjanya industri ini dibangun dan dikelola dengan cara-cara tradisional, usaha dibangun atas dasar kekeluargaan yang berbasis pada *home industry* hingga penjualan juga dilakukan tanpa melalui sistem penjualan yang berhubungan dengan teknologi seperti yang dijelaskan pada ulasan sebelumnya.

Persoalan utama selanjutnya ialah adaptasi teknologi yang belum sepenuhnya diterima dengan baik sebagai konsekuensi atas industrialisasi. Cara-cara pengelolaan tradisional masih menjadi andalan utama industri ini, dari pertama hingga akhir produksi. Lambannya adaptasi teknologi ini disebabkan oleh banyak faktor yang bukan saja bertumpu pada keengganan pelaku untuk mengadopsinya. Persepsi pasar juga sangat mempengaruhi

Peralihan dari pemotongan dan pengepresan (pemadatan) bata basah secara manual menjadi tenaga mesin misalnya, pengusaha menyadari penggunaan mesin dapat memotong ongkos (upah) pekerja hingga beberapa persen. Namun persepsi pasar terhadap bata yang diolah menggunakan mesin memiliki kualitas lebih rendah ketimbang batu bata yang diolah secara manual. Persepsi ini telah diwaikan secara turun temurun dan menyebar dari mulut ke mulut warga. Hingga akhirnya mereka (pengusaha bata) tetap menggunakan medium tradisional.

Sulitnya mengadopsi perubahan pada struktur industri ini memerlukan campur tangan pihak luar yang mampu menjelaskan kepada publik bukan hanya sebatas pada kecanggihan dan kelebihan peralatan. Masyarakat (konsumen dan produsen) mesti memahami bahwa industrialisasi memerlukan alternatif lain berupa peralatan guna memudahkan pekerjaan. Proses inilah yang sering dikenal dengan difusi inovasi, yaitu bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan.

Rogers (1983) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (the process by which an innovation is

communicated through certain channels overtime among the members of a social system). Disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut.

### **KESIMPULAN**

Dana otonomi khusus di Aceh tidak memiliki orientasi pembangunan dan perlindungan yang jelas terhadap tenaga kerja informal. Limpahan dana otsus terfokus pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap pekerja-pekerja pada sektor industri informal yang pada dasarnya industri-industri informal telah berkontribusi pada pembangunan. Banyak masyarakat yang bertopang pada industri informal dengan serapan tenaga kerja yang luas dan banyak. Namun, industri-industri informal yang pada dasarnya juga sebagai industri rumahan kerap gugur di tengah jalan. Pelaku industri ini tidak mendapatkan jaminan langsung dari negara, apalagi yang bersumber dari dana otonomi khusus. Pekerja-pekerja pada sektor ini tidak mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan upah yang layak (UMR), dan mereka hidup dalam garis kemiskinan

Diantara pelaku industri pengolahan batu bata di Gampong Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Desa ini memiliki industri pengolahan batu bata yang sangat ramai. Hampir keseluruhan warganya tergantung pada industri rumahan ini. Persoalan utama yang dihadapi oleh pelaku industri pengolahan batu bata ialah 1) penyertaan modal, 2) adaptasi teknologi yang masih sangat rendah, 3) permintaan pasar yang tidak stabil, dan 4) biaya produksi yang sangat mahal. Masalah tersebut tidak tertangani oleh negara dan cenderung diacuhkan dan berdampak luas bagi keberlangsungan usaha. Banyak pengusaha-pengusaha batu bata yang “gulung tikar” karena tidak memiliki modal

yang mencukupi. Untuk mendapatkan modal pengusaha mengajukan pinjaman (*loan*) pada lembaga-lembaga keuangan dan rentenir. Namun, sering kali pinjaman ini berujung petaka. Dengan sistem bunga, banyak pengusaha yang tidak mampu membayar cicilan tiap bulannya. Hasil dari penjualan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, sebaliknya hutang justru menjerat mereka dan menjerumuskan mereka kepada kemiskinan berkelanjutan hingga hutang selesai

## DAFTAR PUSTAKA

- Askhalani, dkk, Korupsi di Negeri Syariat: Catatan Jaringan GeRAK Aceh, Aceh: GeRAK Aceh, 2009.
- Badrudin, Rudi, Ekonomika Otonomi Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
- Boediono, Ekonomi Makro Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Boediono, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Departemen Keuangan RI, Usulan Formulasi Dana Alokasi Umum Tahun 2002, Jakarta: Indonesia, 2001.
- Djohan, D, Desentralisasi Asimetrik di Aceh, Jakarta Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI,2006.
- Djojosoekarto (ed.), dkk, Grand Strategi Penataan Dsaerah 2025: Bunga Rampai Wacana, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Hendra, Roy, Determinan Kemiskinan Absolut di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2007, Tesis 2010.
- Kaputra, dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,2013.
- Luthfi, A, Impact of Aceh's Additional Budget From Special Autonomy OilGas Revenue Sharing Fund to Poverty Reduction in Aceh, Aceh: ICAIOS's Journal, 2012.
- Mardiasmo (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Andi Publisher
- Masyarah, Harry, dkk, Post-Tsunami Aid Effectiveness in Aceh: Proliferation and Coordination In Reconstruction, The Brookings Global Ekonomi and Development Working Paper Series, Washington D.C.: Wolfensohn Center for Development and The Brookings Institute, 2008.
- Mollet, Julius Ary, Special Autonomy and Poverty Reduction Programs in Papua: Does it Work?, Papua: Jurnal Universitas Cendrawasih, 2012.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah

Puskapol, Fisip UI Mencari Model Hubungan Pusat Dan Daerah: Refleksi Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Working Paper. 23 February 2009 Draft. Pusat Kajian Politik.

Skonieczny, G, dan Torrasi, B, The Influence of Regional Autonomist Government on the Territory Environmental and Economics Performances, Journal of Enviromental Economics Volume II 2008.

Todaro, Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan, Pearson Education Limited, 2006. Yosmardin, dkk, Politik Desentralisasi dan Desentralisasi Asimetris, Jakarta, Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2006.

undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

## KONSTRUKSI IDENTITAS KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA HALAL ACEH

Ade Muana Husniati<sup>1)</sup>, Maryam<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh  
email: *ademuana@unimal.ac.id*

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana identitas komunikasi pariwisata halal Aceh yang mulai diperkenalkan kepada publik sejak tahun 2016 dikonstruksikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta tim pariwisata halal Aceh yang terdiri dari banyak elemen baik swasta, akademisi maupun pemerintahan Aceh itu sendiri. *Brand* pariwisata Aceh ini mengusung tema Islam yang *Rahmatan Lil'alamin* (rahmat bagi semesta alam) sebagai semangat bersama untuk memajukan industri pariwisata Aceh, sebagai cahaya benderang yang mengajak pada nilai-nilai kebaikan, kemakmuran, dan memberikan manfaat serta kebaikan bagi semua pihak yang tercermin melalui program-program pariwisatanya. Semangat dalam membentuk identitas pariwisata Aceh dengan *tagline the light of Aceh* atau Cahaya Aceh secara perlahan ingin merubah pandangan publik terhadap citra buruk syariah yang digambarkan oleh media selama ini yang dikemas dalam sebuah branding baru "*the light of Aceh*". Penelitian dengan paradigma konstruktivisme ini menjadikan pihak internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta tim publikasi, tim pariwisata halal dan *stakeholders* eksternal lainnya yang ada di industri pariwisata Aceh sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dijalankan oleh Disbudpar Aceh dalam mengkonstruksi destinasi wisata halal aceh dengan memanfaatkan *social media* terutama Instagram sangat kekinian dan tepat sasaran, disamping penggunaan media lainnya serta dibantu dengan bentuk komunikasi tatap muka. Hal ini tampak pada beberapa prestasi yang diperoleh baik pada tingkat nasional, maupun internasional atas upaya yang telah dilakukan tersebut.

**Kata kunci:** *Komunikasi Pariwisata, Pariwisata Aceh, Pariwisata Halal*

### PENDAHULUAN

Aceh pada tahun 2016 oleh Kementerian Pariwisata dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal di Indonesia bersama dengan Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat. Tentu saja hal ini mendorong Aceh untuk turut serta mengejar pasar wisatawan halal dunia. Salah satunya pada tahun yang sama pariwisata Aceh membangun *brand* sekaligus citra sebagai daerah yang layak

untuk dijadikan prioritas sebagai destinasi pariwisata halal dan memukau untuk dijadikan tempat berinvestasi. Otonomi daerah merupakan salah satu contoh ketika pemerintah lebih mengarah pada fungsi koordinasi ketimbang ikut campur terlalu jauh hingga malah menghambat perkembangan daerah. Otonomi daerah juga memberi kesempatan untuk tiap daerah membentuk citranya masing-masing. Tentu akan sangat luas sekali ketika melihat bagaimana Indonesia mengelola citranya. Maka dalam artikel ini, yang menjadi fokus adalah konstruksi identitas pariwisata halal Aceh. Yakni bagaimana Aceh, membangun dan mengelola citranya melalui sektor pariwisata.

Syariah Islam telah menjadi payung hukum dalam setiap kebijakan di Aceh. Sebagaimana kita ketahui, Aceh memiliki Qanun (peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan hingga kehidupan bermasyarakat Kemudian, Wilayatul hisbah atau polisi syariahlah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Melihat aturan-aturan berbasis syariah yang meliputi bidang aqidah, syar'iah, akhlak yang sudah berlangsung belasan tahun secara terlembaga, tentu juga mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dan berada di ruang publik. Hal ini pulalah kemudian dijadikan semangat dalam membentuk identitas pariwisata Aceh dengan *tagline the light of Aceh* yang pada Juni 2016 diperkenalkan kepada publik. Mungkin, secara perlahan melalui *brand* pariwisata ini Aceh ingin merubah pandangan publik terhadap citra buruk syariah yang digambarkan oleh media. Pariwisata Aceh telah dikemas dalam sebuah *branding* baru, "*The Light of Aceh*". Cahaya Aceh ini merefleksikan semangat bagi seluruh masyarakat yang disatukan melalui Syariat Islam yang *Rahmatan lil 'alamiin*, sebagai cahaya benderang yang mengajak pada nilai-nilai kebaikan, kemakmuran, dan memberikan manfaat serta kebaikan bagi semua pihak. Beberapa poin dalam membentuk *positioning* Aceh melalui *brand the light of Aceh* seperti yang tertuang dari laman Disbudpar Aceh yakni, di bidang pariwisata, Aceh mempertegas posisinya sebagai destinasi wisata halal di Indonesia.

Wisata dan gaya hidup halal telah menjadi *trend* global, wisatawan non-muslim juga dapat menikmati jenis wisata ini. Sebagai negeri yang semua sendi

kehidupan berlandaskan syariat Islam, termasuk pariwisata, Aceh memiliki akar yang kuat untuk membentuk *branding* mewujudkan destinasi wisata halal. Kementerian Pariwisata RI tahun 2016 menominasikan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia. Sebagai daerah yang punya potensi besar di bidang pariwisata, pemerintah Aceh menjadikan pariwisata sebagai sektor utama pasca era minyak dan gas, sehingga dapat menggeliatkan roda ekonomi masyarakat. Wisata halal saat ini menjadi sorotan dunia. Negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslimpun saat ini sedang menyasar pasar wisata halal. Alangkah disayangkan apabila Aceh yang selama ini telah menjalankan qanun syariah tidak memanfaatkan peluang yang telah dibentuk oleh pasar dunia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Konstruksi Sosial Media Massa**

Konstruksi Sosial Media Massa berawal dari pemikiran sosiolog Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1966 dalam karyanya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Sebenarnya teori ini mengemukakan asumsi Berger tentang hubungan diantara individu dan masyarakat berdasarkan tinjauan sosiologi pengetahuan. Melalui penelitian Burhan Bungin yang berjudul “konstruksi sosial media massa: realitas iklan televisi dalam masyarakat kapitalistis pada tahun 2000, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subyektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, sifat dan kelebihan media massa telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan lambat itu. Substansi “teori konstruksi sosial media massa” adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa. Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial

media massa atas konstruksi sosial atas realitas. Berikut gambar proses konstruksi sosial media massa oleh Burhan Bungin (2008:195):

Konten konstruksi sosial media massa, dan proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi
2. Tahap sebaran konstruksi
3. Tahap pembentukan konstruksi realitas
4. Tahap konfirmasi

### **Komunikasi Pemasaran**

Komunikasi pemasaran merupakan penggabungan konsep-konsep komunikasi dan pemasaran. Secara sederhana komunikasi diartikan sebagai sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Sementara pemasaran secara sederhana didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menemukan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka penggabungan keduanya menjadi sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan terkait kebutuhan pelanggan. Pendapat lain mengemukakan bahwa komunikasi pemasaran tidak hanya menemukan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi komunikasi pemasaran mampu menciptakan kebutuhan baru yang sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Sementara Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Suryana (2019:1.6) menyebutkan bahwa pada umumnya komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan dirancang agar konsumen mengetahui adanya produk tersebut, mendorong adanya pembelian atau komitmen, menimbulkan sikap positif terhadap produk, memberikan arti simbolis terhadap produk, atau menunjukkan bagaimana komunikasi tersebut dapat lebih baik dalam memecahkan masalah konsumen jika dibandingkan dengan produk (barang atau jasa) kompetitor.

### ***Place Branding***

*Place Branding* merupakan sebuah bentuk komunikasi pemasaran berkaitan dengan membangun identitas ataupun citra sebuah tempat. Terkait dengan *brand* sebuah tempat tujuan, Anholt dalam Koswara (2013:340) menyebutkan:

*“Place branding is the management of place image through strategic innovation and coordinated economic, commercial, social, cultural, and government policy. Competitive identity (CI) is the term to describe the synthesis of brand management with public diplomacy and with trade, investments, tourism and export promotion”*

Pengelolaan *brand* sebuah tempat tujuan merupakan rangkaian upaya pembentukan identitas merk yang kemudian dilanjutkan dengan upaya memposisikan merek dalam benak pengunjung, dan akhirnya terbentuk menjadi citra merek sebuah tempat tujuan. Baik atau buruknya pengunjung atau *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya mencitrakan sebuah tempat akan bergantung kepada upaya terkoordinasi dalam masalah-masalah yang menyangkut internal sebuah kota dan negara, sehingga memberikan nilai keuntungan kompetitif dengan kota lainnya. Beberapa keuntungan penggunaan *brand* dalam mempromosikan sebuah tempat antara lain adalah Pertama, kota dapat dijadikan sebagai sebuah hak cipta, yang artinya dapat mengingatkan orang tentang keunikan sebuah kota. Kedua, kota juga dapat menjadi sebuah simbol kualitas yang dapat meyakinkan pengunjung, kualitas yang dapat merepresentasikan kepribadian pengunjungnya yang ditunjukkan melalui tampilan-tampilan yang disampaikan oleh merek sebuah kota. Ketiga, ketika digunakan berkali-kali, merek menjadi sebuah metode tangan pendek untuk mengingatkan pengunjung potensial mengenai manfaat yang ditawarkan oleh sebuah kota.

langkah selanjutnya dalam proses pemasaran adalah perencanaan promosi. Perencanaan promosi akan dirancang untuk mengkomunikasikannya kepada target segmen mengenai citra kota dan manfaat-manfaat yang disediakan dengan mengunjungi sebuah kota. Akan lebih banyak komponen terlibat dalam mengembangkan sebuah strategi promosi dari pada sekedar meletakkan sebuah slogan cerdas dan brosur yang bagus. Promosi dapat dirancang untuk mempengaruhi secara rasional informasi-informasi yang faktual yang dibutuhkan pengunjung potensial dalam proses pengambilan keputusannya untuk mengunjungi sebuah tempat. Promosi juga dapat dirancang melalui penggunaan pesan-pesan persuasif yang menarik perhatian turis potensial. Jika sebuah pendekatan pesan rasional dan emosional telah dirancang, pesan-pesan promosi

kota harus menarik perhatian konsumen dengan sejumlah pesan-pesan lainnya. Komunikasi merek terpadu menjadi sebuah harga mutlak apabila pesan-pesan kota ingin diterima secara utuh oleh konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Paradigma penelitian ini adalah paradigma *Constructivism*, dimana paradigma *Constructivism* dimulai dengan pertanyaan mendasar yaitu bagaimana orang-orang disuatu tempat/lokasi mengkonstruksikan realita. Paradigma ini membahas mengenai persepsi mereka, “kebenaran”, penjelasan, kepercayaan dan pandangan mengenai dunia. Selain itu konsekuensi dari konstruksi tersebut bagi perilaku mereka dan orang-orang lain yang berinteraksi dengan mereka juga diteliti (Patton, 2002:96). Paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti dalam mengkonstruksi realita di Aceh terkait konstruksi citra destinasi wisata halal beserta segala unsur yang mendukung proses lahirnya. Bagaimana ia dipersepsi dan diciptakan hingga akhirnya dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Penelitian kualitatif ini menjadikan tim publikasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengonsep Ulang Definisi Halal**

Menurut tim publikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, halal itu bukan hanya labelisasi untuk makanan saja, tetapi lebih luas dari itu. Meliputi berbagai proses dari barang yang akan digunakan, dikonsumsi, *hospitality* beserta seluruh elemen yang terlibat dalam industri pariwisata hingga perilaku seluruh unsur dalam masyarakat Aceh. Meski Aceh sudah “*default*” halal, artinya sudah identik dengan Islam, namun dalam pengembangan industri pariwisata, citra saja tidak cukup tanpa mengikuti prosedur yang terlegitimasi atau dapat dibuktikan secara formal administratif, mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan, yakni, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana hasil wawancara dengan Tim Publikasi Disbudpar Aceh sebagai berikut:

*“Itu yang selalu diwanti-wanti ..., jangan gara-gara kita ni Indonesia ya, terlebih di Aceh, jangan gara-gara kita membawa di defaultnya Halal. Aceh itu dari syariat islam udah halal gitu tapi bukan itu tu, perilaku tukang becak, taksi dibandara itu halal gak sih? Menyapa gak sih, halal itu kan lebih ke perilaku hospitality nya, mushala ditempat wisata itu ada gak? Kamar mandinya bersih atau enggak sampe kesitunya, karena biasa orang tandai halal itu identik dengan makanan, kalo ditempel o gak halal, makanya sekarang festival kuliner nanti ada pos sertifikasi halal dari MPU. Jadi semua rumah makan, hotel, itu ada proses halal, ada di tempel logo bukan ada kepentingan masyarakat lokal tapi ketika ada datang wisatawan emang datang dari Malaysia, Brunei, hotel halal. Hotel halal maksudnya apa contohnya ada mukena, gak harus kita tanyak telpon susah-susah ini mukenanya mana, sajadahnya mana, enggak.”*

Sertifikat halal tidak hanya untuk restoran atau penyedia produk kuliner saja. Tetapi juga ditujukan untuk hotel yang tidak hanya mensyaratkan tamu yang boleh menginap di kamar yang sama adalah pasangan yang halal, akan tetapi, proses ketersediaan air yang digunakan untuk segala operasional hotel haruslah melalui proses yang halal. Artinya, proses dari pengambilan, penyaringan, hingga digunakan, semuanya harus mendapatkan sertifikasi halal dari mulai restoran, spa, hingga kolam renang.

Demikian pula halal menurut kabid pemasaran disbudpar Aceh mengenai halal yang bukan seperti yang dibayangkan secara umum oleh masyarakat luas yakni hanya terkait makanan yang mengandung anjing ataupun babi saja. Tetapi juga meliputi kesadaran masyarakat untuk melahirkan budaya sertifikasi terhadap program, potensi, usaha, budaya bersih dan higienis serta pelayanan yang baik yang dapat langsung dirasakan oleh wisatawan dan kelengkapan sarana dan prasarana ibadah di berbagai tempat mulai dari warung kopi hingga ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi lainnya.

Kabid Pemasaran juga mengkritisi perilaku masyarakat yang dianggap masih memerlukan proses untuk memahami konsep halal tersebut. Selama ini masyarakat dianggap cukup puas dengan label halal yang disebut “*default*” oleh tim publikasi. Namun kenyataannya, banyak perilaku yang dianggap sepele

ternyata belum mencerminkan perilaku halal yang sesuai dengan standar sertifikasi.

Istilah wisata halal sendiri baru dipopulerkan di Aceh sekitar tahun 2016 seiring dengan peluncuran *brand* baru. Sebelumnya istilah yang sering didengar adalah wisata religi dan wisata Syariah yang dalam Qanun Aceh no 08 tahun 2013 (tentang kepariwisataan) pasal 13 ayat 1 huruf a sendiri disebutkan bahwa jasa wisata syariat adalah jasa wisata tarikat dan zikir, atraksi seni sufistik, pengobatan tradisional, dan wisata syariat islam lainnya. tentu saja secara tekstual makna dalam Qanun syariat tersebut lebih sempit dibandingkan dengan makna penggunaan istilah halal yang disebutkan oleh tim publikasi, kabid pemasaran dan ketua ASPPI Aceh. Berikut hasil wawancara dengan kabid pemasaran:

*“Qanun sudah ada, UU No 08 tahun 2013. Belum (yang khusus tentang pariwisata halal Aceh), tapi lagi coba kita buat dalam bentuk pergubnya. Kita coba fokus pada wisata halal...”*

Media massa pernah memberitakan beberapa kasus penutupan tempat rekreasi (pantai) karena dianggap melanggar Syariah. Hingga berdampak pada citra Aceh yang dianggap kaku dan keras oleh masyarakat luar Aceh baik domestik maupun internasional. Kepala bidang pemasaran Disbudpar Aceh sendiri menyampaikan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah membenahi cara sumberdaya manusianya terlebih dahulu, aturannya, aparaturnya juga masyarakatnya. Apabila budaya halal sudah terbentuk, maka biasanya hal-hal lain akan ikut dengan sendirinya. Untuk mewujudkan itu semua, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen yang ada di Aceh.

Sebelum lahir istilah wisata halal yang kini menjadi tren dunia, istilah lain yang juga pernah digunakan adalah *muslim friendly destination* (destinasi ramah terhadap muslim) pada saat Jero Wacik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2004-2009). Persyaratan untuk menjadi destinasi wisata muslim saat itu bukan berarti untuk wilayah dengan penduduk muslim. Namun yang menjadi persyaratan adalah bagaimana sebuah wilayah tersebut mampu menciptakan kenyamanan bagi wisatawan baik dari sisi kebersihan, pelayanan, kejujuran, keikhlasan.

Kabid pemasaran juga menambahkan bahwa penyampaian informasi yang baik dan benar menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Aceh. Aceh terus membenahi dan mempersiapkan diri agar benar-benar layak menjadi destinasi wisata halal dunia.

Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Aceh yang diketuai oleh Dedy T. Zaimy menyatakan bahwa untuk percepatan Aceh sebagai destinasi wisata halal, asosiasi ini dilibatkan oleh pemerintah Aceh. Sekitar 90% anggota ASPPI menjadi bagian dari kelompok kerja (pokja) yang dibentuk. Antara lain pokja restoran halal, pokja biro perjalanan halal dan pokja hotel halal. Mereka membantu Disbudpar Aceh untuk mensosialisasikan sertifikasi halal bagi industri yang terlibat pada sektor pariwisata di Aceh. Untuk restoran dan biro perjalanan cenderung mudah mengikuti proses sertifikasi halal. Namun untuk hotel, masih terdapat banyak tantangannya dan prosesnya lebih Panjang dengan standarisasi yang sudah disiapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Hal ini semakin menguatkan pernyataan Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh dan tim Publikasi sendiri mengenai halal yang tidak hanya sebatas pada makanan saja. Bahwa ada semacam perluasan makna dari kata halal yang mencerminkan keseluruhan budaya dan perilaku yang penuh rasa tanggung jawab.

## **TAHAP MENYIAPKAN MATERI KONSTRUKSI**

### **a. Tim Publikasi**

Tahap menyiapkan materi konstruksi dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui tim publikasi. Tim ini ditunjuk melalui SK dan mereka terdiri atas komunitas pariwisata. Tim ini sendiri terdiri atas fotografer, *content creator* dan mereka juga membantu Disbudpar Aceh untuk merangkul beragam komunitas yang terkait dengan pariwisata Aceh lainnya. Seperti Genpi Aceh, para blogger, fotografer dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Aceh bapak Ramadhani Sulaiman pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut: “kita punya Tim publikasi yang kita rekrut”. Menurut tim publikasi yang di koordinir oleh Aulia, tim ini terdiri dari 10 orang dengan beragam fungsi sebagai berikut:

*“Itu mulai dari tim kreatif, photographer, videographer, tim admin, admin website ada 10 orang, ada tim admin untuk web 2 orang, terus photographer 1 orang, videographer 1 orang, tim liputan lapangan 2 orang” (11 Agustus 2017) Ada karena setiap ada kegiatan misalnya memang ada pak kadis, ada ni bidang-bidangnya, itu kita yang mengcover untuk turun ke lokasi, maksudnya untuk update, live twit, live twit yang apa namanya, seluruh rangkaian kegiatan kita twit, twit di twitter. Dari 2 orang yang di tim ini yang biasanya untuk mengcover itu, baru tim ini nanti yang ekspor ke tim kreatif konten untuk membuat berita atau release, jadi totalnya 10 orang”.*

Untuk kekurangan tenaga apabila agenda kegiatan pariwisata di Aceh sangat banyak, tim ini merekrut tenaga relawan (volunteer) untuk membantu menjangkau setiap arena kegiatan dan meliputnya. Anggota tim yang bertindak sebagai administrator (admin) tidak diganggu dan harus tetap berada di tempat. Karena fungsinya mengkoordinir setiap kegiatan dan mempublikasikannya melalui sosial media. Selain menangani hal-hal terkait publikasi, tim ini juga berperan sebagai *event organizer* untuk beberapa agenda kegiatan sesuai dengan permintaan. Seperti yang pernah dilakukan di Sabang, mereka mempublikasikan kegiatan yang diadakan secara mendadak namun melakukan promosi dengan maksimal selama beberapa hari seperti promosi melalui stasiun radio setempat hingga *roadshow* ke sekolah-sekolah. Berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui oleh tim ini, mereka menjadi lebih mampu memetakan dan memahami kondisi lapangan (khalayak, antusiasme masyarakat masing-masing daerah) untuk sebuah agenda terkait pariwisata.

Proses mempersiapkan materi konstruksi dilakukan oleh tim publikasi yang terdiri dari sepuluh anak muda profesional dalam bidangnya masing-masing. Yakni sebagai *photographer, content creator, videographer, admin*, serta terkadang mereka juga merangkap sebagai panitia maupun *event organizer*. Tim ini sangat berperan penting dalam proses menyiapkan materi konstruksi hingga dapat diterima oleh para pengguna Instagram. Tim ini juga sangat mengenal karakteristik khalayaknya. Baik khalayak social media hingga masyarakat suatu wilayah terkait agenda kepariwisataan. Sementara untuk kontennya, menurut

kepala bidang pemasaran yang menjadi materi postingan pada *social media* adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat atraktif, memiliki daya tarik, punya karakteristik dan berbentuk *event* serta memperlihatkan keindahan alam atau potensi daerah.

**b. Branding Pariwisata Halal Aceh “The light of Aceh”**

Sebagaimana kita ketahui bahwa branding merupakan sebuah proses dari menciptakan hingga mempertahankan brand di benak publik yang tidak hanya sekedar logo, nama dan permainan warna serta desain. Dalam proses branding tersebut, Aceh melahirkan sebuah brand pariwisata semenjak tahun 2016 dengan *tagline the light of Aceh* untuk mensupport kemenangan Aceh pada kompetisi pariwisata halal nasional di tahun yang sama yang diumumkan pada tanggal 21 september 2016. Pada kompetisi tersebut aceh memenangkan tiga kategori yaitu, airport ramah wisatawan muslim terbaik (Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh), destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik, dan daya Tarik wisata terbaik (Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh).



Gambar 1: *brand* pariwisata Aceh

Berikut wawancara dengan Kepala bidang Pemasaran Disbudpar Aceh terkait branding terbaru Pariwisata Aceh:

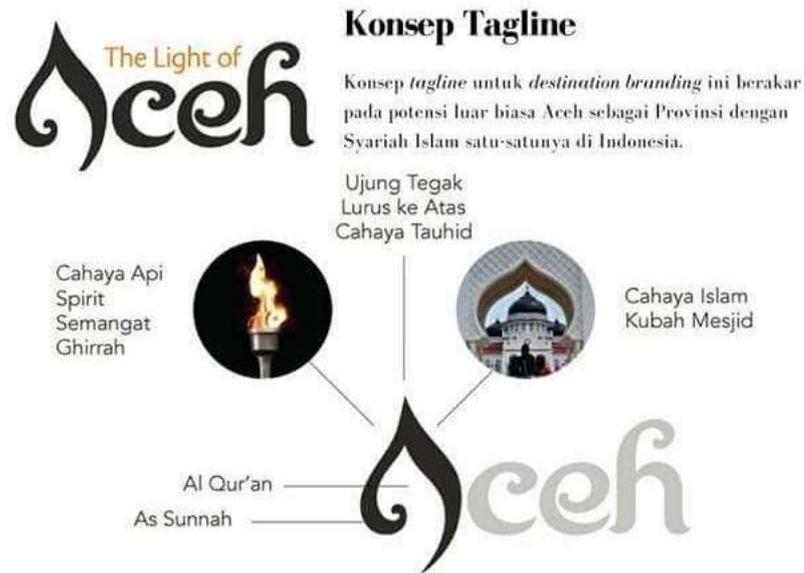
*“Kalo tagline The Light of Aceh itu adalah branding pariwisata Aceh terbaru yang kita gali bersama melibatkan stakeholders terkait khususnya mereka dari akademis, mereka dari pemerintahan, kabupaten kota, termasuk para industri dan yang lebih menarik lagi kita juga merekrut konsultan dari jogja, ya artinya kita coba koordinasikan pemikiran mereka tidak hanya dari dalam tapi dari luar Aceh, artinya branding yang kita bangun tersebut adalah harus bisa menjadi teknik yang bisa diterima oleh semua pihak, menarik kemudian bisa memiliki waktu yang panjang.”*

Brand baru pariwisata Aceh lahir dengan melibatkan banyak pihak yang dianggap mampu dan mewakili elemen-elemen yang terlibat dalam sector

pariwisata seperti akademisi, pemerintahan kabupaten dan kota yang ada di Aceh, para pekerja industri serta konsultan swasta. Melalui seminar, *focus group discussion* (FGD), rapat, diskusi, presentasi serta adanya kepanitiaan terkait penciptaan brand baru tersebut. Berikut wawancara dengan Kabid Pemasaran:

*“Iya seminar, focus group discussion, FGD, rapat-rapat, diskusi, presentasi, dan semua ada. Konsultannya itu ada 2 yaitu mas Ari dengan mas satu lagi siapa namanya saya lupa, mereka itu dari Jogja, dan mereka itu adalah praktisi. Ada- ada, nanti saya kasi (nama perusahaan konsultannya). Itu bentuk dari pada semangat kita melihat begitu banyak potensi yang kita miliki dari konteks alam, budaya, manusia dan juga konteks keberpihakan pemerintah atau daerah wisata, dan kita juga melihat bagaimana hal baru, planning baru, itu media digital semakin merakyat sehingga kita melihat konsep pariwisata di Aceh ni harus kita re-design khususnya dengan tagline yang kita miliki dari Aceh Fantastic Destination menjadi The Light of Aceh atau Cahaya Aceh, nah disini kita bangga wawasan the light of Aceh, atau cahaya mampu mewarnai Aceh sebagai destinasi wisata.. kedepan. sebelumnya itu adalah Aceh Fantastic Destination. sekitar 3 atau 4 tahun, dari 2012 sampe 2016”*

Elemen grafis brand pariwisata aceh ini terdiri atas logo, tagline, nama, serta kombinasi warna yang penggunaannya disesuaikan dengan tempat dan kebutuhan, dengan desain sederhana namun penuh makna. Asal usul konsep dari brand berakar dari potensi Aceh sebagai provinsi syariah dan *rahmatan lil alamin* dipilih untuk mengkomunikasikan *destination branding*. *Rahmatan* diartikan sebagai rahmat, keberkahan, cahaya. *Alamiin* diartikan sebagai alam semesta, dunia. *Rahmatan lil alamiin* dimaknai sebagai cahaya bagi dunia. Dunia dalam hal ini difokuskan pada Aceh. Dengan tujuan untuk mewujudkan islam sebagai *rahmatan lil alamiin* yang dimulai dari provinsi Aceh. Menurut tim branding penggunaan *tagline destination branding the light of Aceh* dapat menjadi *spirit* atau semangat bagi seluruh warga, komunitas, birokrasi, akademis dan bisnis secara keseluruhan yang kaya warna keberagaman namun disatukan dengan syariat islam. Berikut gambar penjelasan oleh komunitas I Love Aceh:



Gambar 2: *brand* (asal usul logo dan konsep tagline)

*Logo the Light of Aceh* yang menggunakan Bahasa Inggris tentu saja guna menarik minat wisatawan manca negara sebagai berikut:



Gambar 3: Logo dengan *tagline* berbahasa Inggris

Selain mendesain logo berbahasa Inggris, logo dengan Bahasa Indonesia juga telah didesain untuk kepentingan penggunaan bagi pemasaran dengan jangkauan wisatawan domestik sebagai berikut:



Gambar 4: Logo dengan *tagline* berbahasa Indonesia

Logo baru beserta *tagline the light of Aceh* ini baru di luncurkan pada pertengahan tahun 2016 tepatnya pada Juni 2016 sekaligus menyongsong kompetisi wisata halal nasional dan internasional.

Pesan dari the light of Aceh menurut Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh adalah:

*“pesan utamanya (the light of Aceh) sih sederhana, kita melihat provinsi Aceh, Aceh yang berbudaya, Aceh yang adat istiadatnya, Aceh dengan potensi wisata alamnya, Aceh potensi syari’at islam yang berkembang pesat kemudian Aceh dengan jumlah populasi islam yang besar dan disini kita ingin angkat karakteristik Aceh, bahwasanya Aceh itu sangat kental dengan budaya islamnya, jadi kita coba bangun dengan The Light of Aceh atau Cahaya Aceh dengan filosofinya dengan mengajak seluruh masyarakat...yang disatukan dalam syariat islam rahmatan lil alamin sebagai cahaya yang terang benderang, dan juga rahmat bagi semua pihak, tapi tidak mesti dibatasi islam tapi siapapun yang datang ke Aceh tu kita jadikan tamu kita dengan cahaya yang terang benderang mampu mewarnai semua kehidupan masyarakat.”*

Beberapa hal hal yang dianggap perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan sebuah *branding* yakni *durable*, diterima oleh masyarakat, sesuai karakter daerah, mudah diingat, singkat, padat dan memiliki makna yang mendalam.

## **TAHAP SEBARAN KONSTRUKSI**

### **Penggunaan *Social Media***

Media baru muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi. Kepentingan yang makin besar dari perusahaan media terhadap komunikasi berbasis internet pada

kenyataannya adalah cerminan dari bangkitnya bentuk baru komunikasi (McQuail, 2011). Informasi digital termasuk melalui media baru mempunyai karakteristik tersendiri. Yakni, *manipulable, networkable, dense, compressible, dan impartial* (Flew, 2008). Dalam pemasaran pariwisata penyertaan revolusi teknologi disebut sebagai online tourism marketing sebagai usaha untuk menjual produk/jasa pariwisata dan membangun hubungan dengan wisatawan menggunakan internet (Hasan, 2015).

Disbudpar Aceh selain menggunakan *new media* Instagram, juga menggunakan beberapa *platform social media* lainnya. Yaitu twitter, youtube, facebook serta website. Sebagai mana Instagram terdiri atas Instagram bisnis dan birokrasi, website juga terbagi atas dua kategori tersebut. Untuk bisnis beralamat [www.acehtourism.travel](http://www.acehtourism.travel) sementara untuk birokrasi [www.disbudpar.acehprov.go.id](http://www.disbudpar.acehprov.go.id). Pendekatan publikasi meliputi empat elemen yang disebut POSE (Paid media, Owned media, Social Media, Endorser). Pendekatan ini pula yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Meski promosi agenda pariwisata saat ini telah beralih pada penggunaan media kekinian (*new media*), namun disbudpar Aceh masih tetap menggunakan media massa lama agar hubungan baik tetap terjaga. Bagaimanapun, media massa lama masih mendapatkan tempat untuk beberapa karakteristik yang dimilikinya, terutama tingkat kepercayaan hasil liputannya, ditengah banyaknya berita hoaks yang hilir mudik pada social media. Sebelumnya, media massa yang menjadi sarana promosi adalah media local dan nasional. Pengiriman rilis juga tergantung jumlah anggaran yang tersedia. Biasanya setahun tiga sampai empat *release*.

Disbudpar Aceh bila dilihat dari postingan pertamanya mulai menggunakan Instagram sebagai sarana promosi dimulai pada taggal 6 mei 2015. Jumlah followers dan likes yang diberikan pada setiap postingan juga terus mengalami meningkat. Pada tanggal 20 november 2017, jumlah followers sebanyak 15,3K followers dan pada 3 juni 2018 meningkat menjadi 18,4K. pada tahun 2016 saat Aceh mulai memperkenalkan branding wisata barunya, serta mengejar penghargaan nasional dan internasional untuk pariwisata halal, ig

@disbudpar\_aceh sangat gencar melakukan postingan sepanjang tahun hingga berjumlah 399 posts. Jumlah postingan ini merupakan jumlah postingan yang cukup besar selama setahun bagi ig @disbudpar\_aceh menurut hasil pengamatan peneliti.

Postingan pertama akun ini berupa event pulau Weh Dive Fest “nature in paradise” June 6-7, 2015. Postingan ini hanya disukai oleh 33 followers dengan 7 komentar. Tema pariwisata yang digunakan masih Visit Aceh yang sudah digunakan sejak tahun 2013. Visit aceh mengusung tagline fantastic destination, sebelum akhirnya Aceh meluncurkan brand baru pada tahun 2016.



Gambar 5: Postingan pertama pada ig @disbudpar\_aceh

## **TAHAP PEMBENTUKAN KONSTRUKSI REALITAS MELALUI INSTAGRAM**

### **Penggunaan instagram oleh disbudpar Aceh**

Sejak peluncuran branding destinasi wisata Aceh yang baru pada pertengahan tahun 2016, promosipun lebih digencarkan pada ajakan untuk mendukung Aceh dan Indonesia memenangkan kompetisi pariwisata halal internasional yang diselenggarakan di Abu Dhabi. Beragam upaya kampanye lapangan dan postingan tersebut tidaklah sia-sia.



Gambar 6: *launching the light of Aceh*

*Launching brand* pariwisata Aceh ini dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi kebudayaan dan pariwisata aceh pada tanggal 19 september 2016. Namun *soft launchingnya* sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya dengan mengeluarkan video dan iklan radio juga dengan memperkenalkannya kepada komunitas pemuda yang aktif di bidang pariwisata dan social media.



Gambar 7: ajakan untuk voting pada WHTA

Setelah diluncurkannya brand pariwisata aceh yang baru, kampanye melalui Instagram untuk memenangkan Aceh pada ajang pariwisata internasionalpun kian gencar dilakukan. Dengan menayangkan video para artis dan *public figure* lainnya. Bukan hanya kampanye melalui Instagram, tim relawan juga melakukan kunjungan langsung ke masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Mulai dari warung kopi, berbagai pusat keramaian, mengisi acara talkshow di stasiun televisi lokal hingga ke sekolah-sekolah yang kemudian kegiatan tersebut kemudian juga dipamerkan lagi di indtagram, sebagai berikut:



Gambar: kampanye *vote* Aceh di sekolah

## TAHAP KONFIRMASI

Akhirnya, dengan beragam upaya yang telah dilakukan di tahun yang sama, Aceh memenangkan dua kategori pada World Halal Tourism Award 2016. Indonesia memenangkan 12 kategori dari 16 kategori yang dipertarungkan. Dari 12 kategori, Aceh memenangkan dua kategori untuk keikutsertaannya pertama kali pada ajang tersebut yaitu sebagai world's best airport for halal travellers dan world's best cultural destination.



Gambar: World Halal Tourism Award 2016

Selain memenangkan kompetisi, beberapa komunitas serta masyarakat umumnya mengadopsi alphabet logo pariwisata Aceh pada logonya. Menurut komunitas Skuter Aceh yang juga mengadopsi logo ini, hal ini dimaksudkan agar langsung identik dan menunjukkan identitas keAcehan. Hal ini menunjukkan bahwa *brand* tersebut mudah diterima oleh masyarakat internal Aceh sendiri.

## KESIMPULAN

Upaya yang dijalankan oleh disbudpar Aceh dalam mengkonstruksi destinasi wisata halal aceh dengan memanfaatkan *social media* terutama Instagram sangat tepat. Mengingat data APJI 2017 pengguna internet tertinggi berusia 19-34 tahun sebanyak 49,52%. Menggandeng komunitas anak muda untuk terlibat dalam kampanye voting KPHN dan WHTA pada tahun 2016 telah terbukti keberhasilannya. Namun, bertolak belakang dengan identitas pariwisata yang dibentuk, Aceh masih dianggap tidak aman oleh banyak pihak internasional. Bukan karena konflik yang berkepanjangan dimasa lalu. Namun karena pemberitaan media terkait pelaksanaan syariah islam. Sebagai contoh, perhelatan Aceh internasional marathon yang akan diselenggarakan 29 juli tahun 2018 di kota Sabang yang awalnya diprediksi akan diikuti oleh 4000 pelari dengan tujuan untuk mempromosikan keramahan, suasana aman serta terbukanya aceh bagi wisatawan dan investasi, namun masih kurang diminati karena Aceh dianggap kurang aman (kompas.com, februari 2018) salah satunya karena isu penolakan

terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Aceh dan anggapan bahwa untuk pelari perempuan diwajibkan berjilbab. Hal ini beriringan pula dengan himbuan dari bupati Aceh Besar yang mewajibkan pramugari memakai jilbab ketika berada di bandara sultan Iskandar muda, Aceh Besar. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Aceh untuk mengkonstruksi identitas pariwisatanya sebagai cahaya, sebagai *rahmatan lil alamin*. Namun upaya yang telah dilakukanpun memberikan hasil meskipun masih membutuhkan waktu agar benar-benar tertanam di benak dan dipercayai oleh publik. Untuk pengembangannya, mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan para *stakeholders* selayaknya harus menjadi prioritas dengan melakukan pendekatan persuasif secara bertahap. Mengembangkan opini bahwa pariwisata tidak bertentangan dengan nilai Islam asal seluruh komponen masyarakat melakukan pengawasan dan pihak berwenang membuat standar kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh komponen termasuk pihak swasta, ulama, umara dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat di seluruh provinsi harus menjadi prioritas dengan melakukan pendekatan secara massif oleh para *opinion leaders*. Untuk mendapatkan dukungan dari media massa konvensional, tentu saja pemerintah harus mengubah cara kerjanya dengan mengutamakan kepentingan publik. Perbaikan, penyediaan, pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana publik untuk kepentingan publik serta mengukir banyak prestasi yang diakui oleh beragam Lembaga, tentu akan menciptakan berita dengan *tone* positif pada media massa meski tak dapat dipungkiri bahwa *bad news* tentu lebih menarik untuk dimuat. Namun beragam prestasi tersebut dapat mengimbangi berita dengan *tone* negatif meski tak mungkin untuk dihindari. Yang lebih sederhana dan mudah serta menjangkau publik yang lebih luas adalah memanfaatkan sosial media dan bekerjasama dengan komunitas milenials. Hal ini sudah dibuktikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hingga mampu memenangkan kompetisi pariwisata internasional serta mendapatkan penghargaan kehumasan. Tak hanya pemerintah provinsi, kesadaran dan kerjasama dengan *stakeholders* kabupaten/kota tentu akan semakin memperkuat *brand* pariwisata halal Aceh. Wisata halal Aceh merupakan sebuah komoditi. Menjual nilai-nilai kearifan lokal

dalam bentuk pariwisata. Sekaligus sebagai bentuk syiar yang menyesuaikan tuntutan jaman. Tema wisata halal merupakan *marketing* daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata. Wisata halal sebagai bentuk *positioning* Aceh sebagai destinasi yang unik. Budaya halal harus terlebih dahulu menjadi kepribadian masyarakat Aceh. Halal itu tidak hanya soal makanan. Tetapi juga perilaku, kepribadian, kebersihan, *hospitality*, kesopanan, dan lain sebagainya. Apabila semua itu terwujud, maka dengan sendirinya pariwisata halal akan bergerak menciptakan kebaikan bagi masyarakat juga bagi wisatawan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana.
- Flew, Terry. (2008). *New Media: An Introduction*. Oxford University Press.
- Hasan, Ali. (2015). *Tourism Marketing*. Yogyakarta: CAPS.
- Koswara, Aang. (2013). *City's Branding ala Munich*. Bandung: Rosda.
- McQuail, Denis (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nadlir, Moh. (2018). *Gara-gara Isu LGBT, Aceh International Marathon 2018 Sepi Pendaftar*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/19113441/gara-gara-isu-lgbt-aceh-international-marathon-2018-sepi-pendaftar>
- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods, Third Edition*, CA: Sage.
- Suryatna, Asep. (2019) *Komunikasi Pemasaran*. Banten: Universitas Terbuka.

## **MODEL PARIWISATA ISLAMI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Anismar**

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh  
email: *anismar@unimal.ac.id*

### **ABSTRAK**

Kabupaten Aceh Singkil merupakan sebuah daerah di Propinsi Aceh yang mempunyai potensi alamnya sangat mempesona bila dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Aceh. Namun sampai sekarang usaha pengembangan kepariwisataannya di Kabupaten tersebut seperti “kura-kura berjalan di atas batu”. Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunannya yang sangat lambat malah nyaris tidak terlihat, pada hal dari potensi alam dan letak wilayahnya sangat strategis. Hal ini dapat diduga karena tidak didukung dengan sumber daya manusia (SDM), mengingat daerah ini masih tergolong muda menjadi Kabupaten yang ada di Aceh, sehingga sampai sekarang belum ada arah atau konsep apapun dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Singkil. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Data dianalisis dalam bentuk langsung secara terus menerus, dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah data diperoleh pola, bentuk bahkan tema baru dalam penelitian. Selanjutnya semua data dianalisis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui pendekatan observasi, dokumentasi dan wawancara dari seluruh informan sasaran penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, serta gejala individu atau kelompok tertentu dalam kaitannya dengan hubungan budaya dan sosial kemasyarakatan.

**Kata kunci:** *model kepariwisataan, Wisata Islami, dan Aceh Singkil*

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Aceh Singkil merupakan sebuah daerah termasuk dalam Propinsi Aceh, yang mempunyai keindahan alam sangat mempesona. Wisata bahari dengan 99 pulau yang terdapat di Kecamatan Pulau Banyak, senantiasa menanti pengunjung. Bentang alamnya yang terdiri dari bagian jajaran Bukit Barisan dengan beberapa sungai yang indah merupakan areal petualangan dalam wisata alam bagi kalangan pemuda dan remaja pecinta alam, lintas alam dan sebagainya, serta dengan kesenian tradisionalnya yang sangat unik dan menarik, bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di nusantara ini. Kesemua

potensi ini bila dikembangkan dan ditata lebih maksimal lagi, maka tidak mustahil pada masa yang akan datang pendapatan daerah menjadi idola dari sektor ini, seperti Pulau Bali pada saat sekarang.

Setiap usaha pengembangan kepariwisataan sangat perlu memperhatikan serta mempelajari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena itu merupakan salah satu kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Belum tentu semua nilai yang hidup dalam masyarakat itu bertentangan dengan menghambat usaha-usaha pembangunan. Bahkan mungkin, dan sering kali telah dibuktikan oleh ahli-ahli ilmu sosial, bahwa sebagian dari nilai-nilai dari suatu masyarakat, termasuk masyarakat yang dianggap terbelakang atau belum maju, ada mempunyai sifat atau pengaruh positif terhadap usaha pembangunan kalau saja tahu dan pandai memakainya (Alfian, 1986 : 266).

Selama ini di Propinsi Aceh pada umumnya, dalam pengembangan pariwisata selalu berorientasi pada nilai-nilai agama (konsep islami). Namun dilapangan kita lihat, arah konsep tersebut belum juga terwujud, malah cenderung berorientasikan kepada konsep Pusat yaitu dengan konsep “Saptapesona”nya. Konsep ini belum tentu cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Singkil, karena tradisi masyarakatnya sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di tempat lain terutama diluar Propinsi Aceh.

Dari hasil pengamatan sementara dapat diketahui bahwa, pada umumnya masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, mempersepsikan kegiatan kepariwisataan dengan hal-hal yang negatif, misalnya dengan munculnya pariwisata maka akan muncul pula pola pergaulan bebas dikalangan remaja, dan berubahnya pola pikir masyarakat kearah modernis (yang dipersepsikan negatif). Dengan demikian, program pengembangan pariwisata oleh Pemerintahan Daerah selalu dipersepsikan hal-hal yang negatf oleh masyarakat, sehingga dilapangan terdapat banyak kendala yang akan dihadapi.

Potensi kepariwisataan yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil tersebut belum dapat diandalkan sebagai suatu aset yang mampu mendatangkan penghasilan karena potensi objek wisata tersebut belum dimanfaatkan secara

optimal. Sementara kawasan pariwisata yang telah dikembangkan masih belum dikelola dengan baik seperti halnya daerah tujuan wisata Pulau Banyak.

Sebagian besar masyarakat Aceh Singkil menganut agama Islam yang fanatik. Secara keseluruhan jumlah terperinci penganut agama di Aceh Singkil, Islam 78722 orang, Protestan 841 orang, Katolik 23 orang dan lain-lain 241 orang (Aceh Singkil dalam angka 2018 : 62)

Ajaran Islam terpancang di bumi Aceh Singkil sudah sejak beberapa abad yang silam. Tidaklah mengherankan bila aqidahnya mengakar dalam segala sendi kehidupan. Pantas jika Islam menjadi landasan utama pola pikir dan pola tingkah segenap penduduknya, hal itu terbukti dalam kehidupan mereka sehari-hari, dimana layak tidaknya suatu sikap dilihat dari benar tidaknya dan halal haramnya semuanya menurut kacamata Islam.

Pada satu sisi fanatisme terhadap Islam menyelamatkan daerah ini dari penduduk penjajah. Terbukti dari 350 tahun masa penjajah Belanda di Indonesia, Aceh secara umum dan khususnya Aceh Singkil hanya diduduki 43 tahun, itu pun tidak menguasai semua daerah jajahan, hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat mereka duduki. Oleh karena Islam mengajarkan agar tidak mau menerima kepemimpinan orang kafir yang boleh jadi akan merusak aqidah dan tentu hal itu menyesatkan. Fanatisme terhadap Islam tersebut bisa dilihat dari pola pembinaan terhadap anak-anak. Sejak dini mereka sudah diperkenalkan kepada Al-Qur'an, juga sedikit demi sedikit diajarkan bahasa arab. Sebab, kepandaian mengaji dan bahasa arab seorang anak menjadi kebanggaan orang tua, disamping itu menambah wibawa sebuah keluarga, sehingga banyak ulama di Indonesia ini lahir di bumi Aceh Singkil.

## **LANDASAN TEORI**

Menurut Yoeti (1997 : 103) kata pariwisata ditinjau dari etimologis ialah berasal dari bahasa sanskerta, sesungguhnya bukanlah berarti “tourisme” (bahasa Belanda) atau “*tourism*” (bahasa Inggris). Kata pariwisata, menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “*tour*”, pendapat ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut: kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing

kata “pari” dan “wisata”. Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar lengkap (ingat kata dari paripurna), sedangkan wisata, berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “*travel*” (dalam bahasa Inggris). Atas dasar itu, maka kata “pariwisata” seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dan berputar-putar, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*” sedangkan untuk pengertian jamak, kata “pariwisata” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.

Sedangkan di Indonesia, pengertian “wisata”, “wisatawan” dan “parawisata”, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9/1990 adalah :

- Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakuakn secara sukarela serta bersifat sementara atau menikmati objek dan daya tarik wisata.
- Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
- Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Demikian konsep atau batasan pariwisata dan definisi wisatawan dewasa ini, memang kalau disimak dengan baik, antara pakar yang satu dengan pakar yang lain mengajukan konsep yang berbeda. Akan tetapi kalau ditarik benang merah dari konsep-konsep ini dapatlah diketahui bahwa, sebenarnya pariwisata ini tidak lain adalah perpindahan (perjalanan) seseorang dari tempat dimana ia tinggal (hidup) ke tempat yang baru (tujuan wisata) dan bertujuan untuk menikmati perjalanan itu dengan berbagai maksud.

Berpijak pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, tentang pemberian otonomi kbusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memberi perubahan mendasar di dalam penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, termasuk dalam bidang kepariwisataan, juga dengan Undang-Undang No.44 Tahun 2000, tentang pelaksanaan Syari’at Islam, bagi warga Nanggroe Aceh Darussalam, yang mempunyai batas-batas dan warna pelaksanaan

kepariwisataan tersebut adalah pada objek-objek dan kawasan wisata para pengunjung harus menjaga dan memelihara norma, adat istiadat masyarakat Islam (hal yang dilarang dalam agama Islam). Hal ini juga berlaku di Bali, pengunjung tetap dilarang berjalan-jalan pada hari nyepi, atau masuk pura, bagi orang perempuan yang sedang menstruasi. Diharapkan program kepariwisataan Nanggroe Aceh Darussalam dikembangkan dengan tatanan yang spesifik sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat Aceh dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya.

Dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 20 Tahun 2001, tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan Syari'at Islam, pada bab pendahuluan point a dan b dijelaskan bahwa :

- a. Aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan Syari'at Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi keluarga dan masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hyman (dalam Tan, 1997 : 42), penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Rusidi (1999 : 18) menjelaskan penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan fenomena empirik yang disertai dengan penafsiran-penafsirannya dengan tujuan memperoleh gambaran setepat realitanya.

Mengenai pendekatan kualitatif Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000 : 3) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam operasionalisasi penelitian dilapangan, peneliti bertindak sebagai instrument peneliti. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara serta berusaha memahami dan menganalisanya. Langkah-langkah dilapangan dilakukan secara sistematis sebagai usaha menjawab sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, baik yang sudah direkayasa maupun yang sedang dan dalam menanti pengembangan. Wisata bahari baik disepanjang pantai maupun disekitar Kepulauan Banyak senantiasa menanti pengunjung. Bentang alamnya yang terdiri dari bagian jajaran Bukit Barisan dengan beberapa gunung merupakan areal petualangan dalam wisata alam bagi kalangan pemuda dan remaja pecinta alam, pendaki gunung, kemping, lintas alam, dan sebagainya.

Pada zaman dahulu kala para pedagang dari Gujarat, Turki, Madagaskar yang melakukan barter hasil bumi di pelabuhan Singkil tak pernah mau membuang kesempatan untuk singgah di Kepulauan Banyak atau Pulau-Pulau Bagu dan Bangkaru maupun pulau-pulau kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya.

Selain wisata bahari, di Kepulauan Banyak dan wisata petualangan menyusuri sungai Alas. Aceh Singkil masih memiliki objek-objek wisata lain yang tidak sedikit jumlahnya. Objek-objek wisata tersebut meliputi wisata pantai, wisata lintas alam, wisata budaya, wisata ilmiah, dan wisata ekonomi.

Sebagian kecil wisata bahari telah dikemukakan diatas. Meski demikian berbagai bentuk wisata lainnya diberbagai tempat senantiasa menarik bagi para pengelana (turis).

Islam juga menganjurkan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan bahari sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Al-Isra' ayat 66*.

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“ Tuhanmu yang melayarkan kapal untuk mu di laut, supaya dapat kamu mencari karuniaNya (rizkiNya). Sesungguhnya Dia penyayang kepada mu”.

Sulit dibayangkan masyarakat disekitar kawasan wisata dapat berkembang tanpa harus merubah lingkungannya, termasuk lingkungan sosial budayanya, tanpa keharusan memperlonggar aspek religi yang dominan sebagai umat beragama (Islam). Dapat dipahami, bagaimana proses perkembangan masyarakat di sekitar objek wisata dalam hubungannya dengan pihak wisatawan ditengah-tengah perubahan sosial yang terjadi dengan pesat dalam era globalisasi saat ini. Kecanggihan media elektronika di bidang informasi dan komunikasi akhir-akhir ini, telah membuat kita dengan segera menyaksikan pentas dunia yang mempertontonkan aktivitas hidup dan kehidupan manusia yang seolah-olah mengesampingkan norma dan kaidah kesusilaan yang sarat dengan doktrin nilai-nilai religi sebagai unsur norma agama.

Di bidang keagamaan, tampakiia kegiatan kepariwisataan dapat dipastikan mempunyai dampak yang serius. Publikasi hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sangat terbatas. Dampak tersebut cenderung merupakan tubrukan moralitas yang tampak pada aktivitas keagamaan masyarakat terutama bagi masyarakat disekitar daerah tujuan wisata.

Bila dihubungkan dengan pengamatan dilapangan, masyarakat (responden) yang menyatakan berdampak negatif dari kehadiran wisatawan, adalah masyarakat (responden) yang melihat dari segi pergaulan dan pakaian wisatawan sangat tidak sopan dalam pandangan agama. Sedangkan yang masyarakat (responden) yang menilai menguntungkan dalam aktivitas keagamaan, karena melihat ada wisatawan yang datang ke objek wisata dengan tujuan ilmiah (penelitian) dan wisatawan dalam kehadirannya menyempatkan diri bertukar pikiran (membagi pengalaman) dengan masyarakat setempat tentang pengetahuan agama.

Bagi masyarakat Aceh Singkil sudah lebih dari pada jelas, bahwa agama, adat dan budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan spiritual

kesehariannya. Perilaku seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh penghayatan dan cara ia menerapkan adat disekelilingnya.

Namun karena kesalahan dan penyimpangan pengoperasian pariwisata seolah-olah tanpa adanya unsur seks atau embel-embelnya (disco, night club, pantai pijat dan lain-lain) pariwisata tidak bisa berkembang. Sikap yang demikian adalah tidak beralasan. Bisa saja wisata tanpa menyajikan seks mendapat pesanan yang baik. Malah ada negara yang menyesali dirinya karena terlanjur mempromosikan seks sebagai andalan wisatanya, lebih-lebih dengan berkembangnya AIDS akhir-akhir ini. Sikap industri pariwisata seperti ini perlu dirobah dan diarahkan agar mereka yakin bahwa perusahaan dibidang pariwisata tanpa unsur seks juga bisa mendatangkan uang, Contoh di Mekah, dan Madinah.

Pembangunan sektor agama di Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh sekaligus sebagai mata rantai yang tidak terputus, berkelanjutan dan berkesinambungan dalam menciptakan landasan menuju cita-cita pembangunan dalam masyarakat yang selaras dan seimbang antara duniawi dan ukhrawi guna mencapai masyarakat adil dan makmur.

## **KESIMPULAN**

1. Walaupun di Aceh Singkil penduduknya didominasi beragama Islam, namun tingkat toleransi terhadap agama lain terjalin baik, ini ditandai dengan banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara (yang bukan beragama Islam) ke daerah ini, masyarakat tetap memperlakukannya dengan baik. Kemudian banyak terdapat Gereja hingga sekarang aman dari gangguan penduduk setempat.
2. Motivasi kunjungan berkaitan dengan kegiatan religius, disamping obyek kunjungan rekreasional sebagai obyek peninggalan sejarah oleh wisatawan umum. Dalam hal kunjungan wisatawan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan telah berkembang di Aceh Singkil, seperti halnya kunjungan-kunjungan yang dilakukan di makam ulama Syekh Abdul Rauf Al-Singkili dan Syekh Hamzah Fansury.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

BPS. 2018. *Aceh Singkil dalam angka 2018*. Badan Pusat Statistik

Marpaung, Happy (2000), *Pengetahuan Kepariwisata* (edisi revisi) Bandung, Alfabeta

Moleong, Lexy (2000), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 20 Tahun 2001

Rusidi (1992), *Dasar-Dasar Penelitian dalam Rangka Pengembangan Ilmu Program Pascasarjana*, Bandung. Unpad

Sukarsa, I Made (1999), *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Departemen P dan K Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tan, Nelly G (1997), *Masalah Perencanaan dalam Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta. Gramedia

Yoeti (1997), *Pengembangan Pariwisata di Bali*. Jakarta

**QUALITY ASSURANCE DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
PENANGANAN KESEHATAN PENYAKIT HIV AIDS DI  
KABUPATEN ACEH UTARA:  
Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar  
Pelayanan Minimal**

**Cut Suknawati<sup>1)</sup>, Bobby Rahman<sup>2)</sup>, Murniati<sup>3)</sup>, Hidayatul Fitri<sup>4)</sup>**

<sup>1-4)</sup> Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh

Korespondensi: *cut.suknawati@unimal.ac.id*

**ABSTRAK**

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi keperluan dasar warga negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelayanan dasar itu terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan daerah permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Kesehatan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena banyaknya kasus yang berhubungan dengan kesehatan belum dilayani baik oleh Pemerintah daerah Aceh Utara, khususnya kasus HIV AIDS. Adanya kasus penderita HIV AIDS 103 orang menjadi preseden buruk yang menodai sistem pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Perlakuan yang diskriminatif yang terjadi kepada penderita HIV AIDS. Sosialisasi yang tidak meyeluruh memperburuk persepsi masyarakat terhadap penyakit ini terutama bagi penderita HIV AIDS atau sering disebut dengan orang dengan HIV AIDS (ODHA). Jika isu ini tidak dikendalikan serius, maka dikhawatirkan akan menimbulkan efek-efek negatif seperti pelayanan yang terus menerus lambat, tenaga kesehatan yang tidak profesional, dan ongkos kesehatan yang mahal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara, menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, FGD, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini memperlihatkan bahwa mereka yang terindikasi penyakit ini menjadi kelompok dalam masyarakat. Mereka akan dikucilkan karena dianggap membawa penyakit yang dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya. Semestinya masyarakat berkontribusi untuk memulihkan mereka, namun yang terjadi sebaliknya. Masyarakat yang apatis dan sinis menimbulkan persoalan psikologis bagi penderita. Karenanya pemulihan masyarakat yang menderita penyakit ini mesti melibatkan tokoh masyarakat juga tokoh agama sebagai wujud dukungan psikologis kepada mereka.

**Kata Kunci:** *Quality Assurance, HIV Aids, standar pelayanan minimal*

**PENDAHULUAN**

Secara normatif pemerintah dipaksa untuk terus menggali potensi-potensi yang membawa perubahan yang lebih baik untuk membawa rakyat dan

wilayahnya ke posisi terbaik. Glasson (dalam Sirojuzilam. 2010) mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah dapat terjadi sebagai akibat dari penentu endogen dan eksogen. iaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam wilayah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar wilayah. atau kombinasi dari keduanya. Keragaman wilayah Indonesia yang sangat besar mengakibatkan perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dasar pembangunan yang sentralistik pada masa lalu. baik dalam dasar perpajakan. pengurusan sumber daya alam maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang tajam dan menimbulkan kecemburuan antar wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut. pemerintah pasca Orde Baru menerbitkan dua undang-undang iaitu. nomor 22 Tahun 1999 tentang Pihak Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tentang desentralisasi kewenangan pengurusan sumber daya di daerah dan kewenangan keuangan atas fungsi-fungsi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini mengakibatkan otonomi daerah dilaksanakan kembali.

Sejak Otonomi Daerah diberlakukan. membawa harapan bagi Pihak Pemerintah Daerah untuk boleh memaksimalkan potensi daerahnya. salah satunya adalah semangat dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah bagi pemerintah daerah di Indonesia merupakan dasar yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut. dan merupakan aspirasi masyarakat. Hal ini juga berlaku di Aceh bagian Utara. apalagi didukung oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh Nomor 18 tahun 2001. dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.

Selama hampir 17 tahun setelah otonomi khusus. peneliti mendapati beberapa aduan masyarakat mengenai pelayanan umum yang diberikan oleh Pihak Pemerintah Daerah. Aduan ini seperti yang diutarakan oleh Zulfadli salah seorang warga yang berdomisili di bagian barat Aceh Utara. Pembangunan mempunyai tujuan untuk memajukan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan fisik. dan perbaikan ekonomi masyarakat. tetapi kenyataannya.

perekonomian dimana laju pertumbuhan rendah. penanggulangan kemiskinan dinilai melambat begitu juga dengan laju peningkatan per kapita yang melambat. Hasil temuan *Institute for Development of Acehese Society (IDeAS)* mempublikasikan bahwa dari jumlah 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. 17 kabupaten dan kota diantaranya menunjukkan angka kemiskinan semakin meningkat. Kabupaten Aceh Utara menempati posisi sembilan termiskin dengan prosentase 19.78%. IDeAS juga menyatakan bahwa pemerintah harus memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada sektor pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. (Modus Aceh. unduh tanggal 28 Maret 2019).

Pihak Pemerintah Daerah yang seharusnya lebih mengenal kondisi sosio politik dan kultural daerah tidak juga peka akan masalah yang timbul di daerah kewenangannya. akibatnya masyarakat akan menganggap pemerintah lemah dan terparah akan timbul tuduhan bahwa Pihak Pemerintah Daerah telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Daerah memiliki tarikan dan kepentingan yang berbeda-beda. sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelayanan sangat penting memperhatikan dan mampu mendefinisikan masalah dan berbagai kepentingan publik. Pembangunan wilayah dalam melayani masyarakat boleh dilakukan dengan baik tidak terlepas dari proses pembuatan dasar pembangunan yang benar-benar komprehensif dan benar-benar berlandaskan keperluan dari masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang banyak terjadi di daerah dimana Pihak Pemerintah Daerah sepertinya kurang sensitif dengan berbagai aduan pelayanan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia terus berusaha memperbaiki kualitas pelayanannya. ini ditunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Pihak Pemerintah Daerah yang baru hasil revisi dari UU Pihak Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004. yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pihak Pemerintah Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 ini. mensyaratkan Pihak Pemerintah Daerah harus melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. pemerintahan konkuren wajib melaksanakan pelayanan dasar seperti: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan; (iii) Kerja

umum dan penataan ruang; (iv) Perumahan rakyat dan daerah permukiman; (v) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta (vi) Sosial.

Kesehatan menjadi perhatian utama peneliti, karena jika masyarakat sehat, maka daerah akan menjadi sehat. Selain itu Aceh Utara sampai dengan saat ini masih diliputi dengan berbagai persoalan kesehatan yang harus ditangani segera. Persoalan tersebut seperti, adanya kasus gizi buruk yang cukup besar, kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), yang didata oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Balai Syura Aceh Utara tahun 2018 sebanyak 103 kasus dan kemungkinan terus bertambah. Ketiadaan data kesehatan mengenai berbagai penyakit yang diidderita oleh masyarakat Aceh Utara; seperti penyakit diabetes mellitus, HIV AIDS, hipertensi, bronkitis dimana penyakit-penyakit tersebut merupakan hal pelayanan dasar kesehatan yang harus Pihak Pemerintah Daerah selesaikan. Ironisnya, data mengenai penyakit tidak ditemukan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2018 (walaupun BPS merupakan satu-satunya acuan dalam penyampaian data yang telah diakui oleh Negara). Masih adanya perlakuan membedakan lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat. Mereka lebih mendahulukan kalangan atas (elit) sedangkan dalam hal kesehatan tidak ada kalangan elit maupun miskin, karena semua orang memerlukan kesehatan yang baik.. Masih adanya ketidaksepakatan dalam pengurusan Rumah Sakit Daerah Cut Meutia (sebelum pembangunan daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia adalah merupakan rumah sakit yang secara absolut dikelola oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Setelah pengembangan wilayah (pemisahan wilayah), posisi Rumah sakit secara teritorial berada di pemerintahan Kota Lhokseumawe. Akibatnya terjadi tarik menarik pengurusan rumah sakit dan sampai dengan sekarang pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu memberikan ganti rugi kepemilikan kepada Pemerintah daerah Aceh Utara). Walaupun berbagai persoalan kesehatan yang muncul, peneliti memfokuskan diri untuk meneliti kasus penanganan HIV AIDS, mengingat HIV AIDS menjadi isu yang menghangat di seluruh dunia dikarenakan kasus penderita semakin bertambah setiap saatnya. Berdasarkan beberapa realitas tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

fenomena “*Quality Assurance* Penanganan Kesehatan Penyakit Hiv AIDS Di Kabupaten Aceh Utara”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. karena peneliti ingin lebih memahami fenomena-fenomena pelayanan publik khususnya *quality assurance* pelayanan kesehatan dalam menangani HIV di Kabupaten Aceh Utara. Untuk memperoleh data sebagai landasan interpretasi untuk menjawab permasalahan penelitian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. maka di bawah ini akan dipaparkan lokasi penelitian. subyek penelitian. teknik pengambilan data dan teknik analisis data.

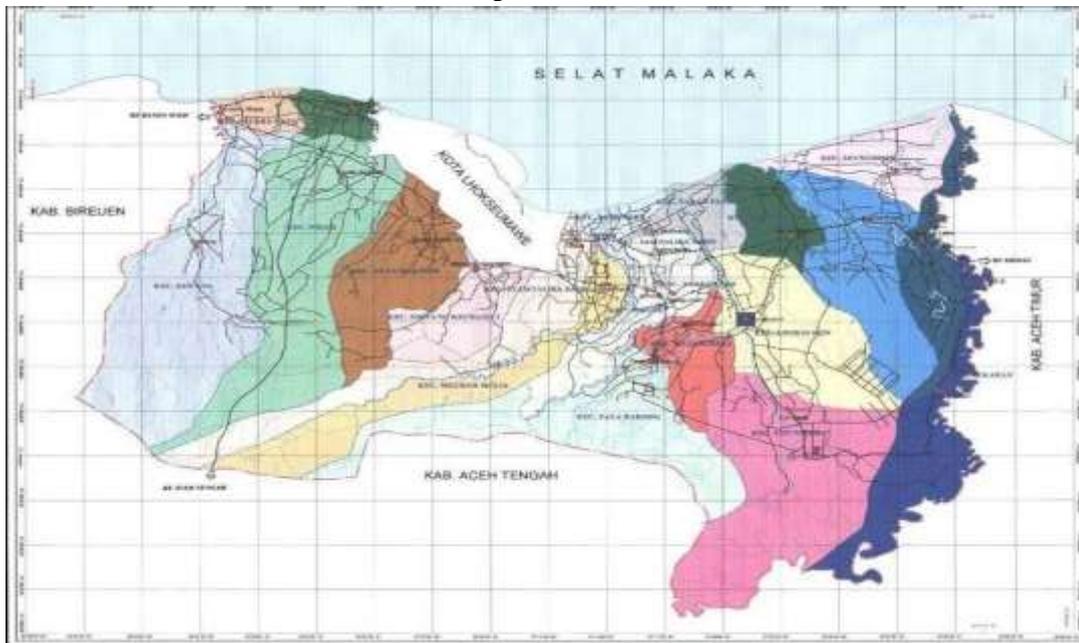
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Wilayah Provinsi Aceh adalah yang terletak paling barat ujung pulau Sumatera di Negara Indonesia. dan berada di pesisir dan dataran tinggi. Aceh Utara sebelumnya tergabung dengan kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe. Kemudian. melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000. Bireuen dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom dan disusul dengan Kota Lhokseumawe yang berpisah setelah keluarnya Undang- undang Nomor 2 Tahun 2001.

Kabupaten Aceh Utara terletak pada geografis dengan titik koordinat  $96.52.00^0-97.31.00^0$  Bujur Timur dan  $04.46.00^0-05.00.40^0$  Lintang Utara. Secara administratif Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah  $3.296.86 \text{ km}^2$ . dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Gambar 4.1.  
Peta Kabupaten Aceh Utara



### **Standar Pelayanan Minimal; Pemahaman Mengenai Permendagri Nomor 100 Tahun 2018**

Standar pelayanan minimal (SPM) mungkin bukan barang baru. karena SPM melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai UU No. 23 tahun 2014. yakni ada 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan. kesehatan. pekerjaan umum dan penataan umum. sosial. perumahan rakyat dan kawasan permukiman. ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ada sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan SPM. namun SPM dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. sumber daya personil. dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Adapun urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar ada 18 urusan yakni tenaga kerja. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pangan. pertanahan. lingkungan hidup. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. pemberdayaan masyarakat dan desa. pengendalian penduduk dan keluarga berencana. perhubungan. komunikasi dan informatika. koperasi usaha kecil dan menengah. penanaman modal. kepemudsan dan olahraga. statistik. persandian. kebudayaan. perpustakaan. dan kearsipan. Selain itu ada juga urusan pemerintahan

pilihan ada 8 urusan meliputi kelautan dan perikanan. pariwisata. pertanian. kehutanan. energi dan sumber daya mineral. perdagangan. perindustrian. dan transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini diluncurkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Mendagri Tjahjo Kumolo tanggal 16 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540 oleh Widodo Ekatjahjana. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 19 November 2018 di Jakarta. Peraturan ini dibuat harapannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari waktu ke waktu. Pemerintah diharapkan lebih peka dan antusias untuk melaksanakan amanat yang tertera dari SPM tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyati Mukhtar selaku Seksi Promosi Kesehatan Kabupaten Aceh Utara berikut ini:

“Kami sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SPM ini. Kami terus berusaha untuk mengimplementasikan sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Memang belum seluruhnya bisa diaplikasikan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan secara mendetail. apalagi 6 urusan wajib. 6 urusan wajib tersebut terkait pelayanan dasar yakni pendidikan. kesehatan. pekerjaan umum dan penataan umum. sosial. perumahan rakyat dan kawasan permukiman. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”.

Beliau melanjutkan, untuk di Kabupaten Aceh Utara kasus HIV AIDS yang terdata adalah sebesar 103 kasus, dimana mayoritas penderita HIV dan AIDS ada di Kecamatan Dewantara dan Baktiya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Kasus Pengidap HIV AIDS**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2018**

No.	Kecamatan	Jumlah Pengidap
1.	Dewantara	15
2.	Baktiya	10
3.	Muara Batu	7
4.	Kuta Makmur	7
5.	Meurah Mulia	6
6.	Lhoksukon	5
7.	Nisam Antara	5
8.	Matangkuli	5
9.	Syamtalira Aron	4
10.	Tanaj Jamboe Aye	4
11.	Syamtalira Bayu	4
12.	Lapang	4
13.	Samudera	4
14.	Nisam	3
15.	Cot Girek	3
16.	Seunudon	3
17.	Sawang	2
18.	Tanah Luas	2
19.	Sampoiniet	2
20.	Tanah Pasir	2
21.	Buket Hagu	1
22.	Nibong	1
23.	Lhok Beringen	1
24.	Simpang Kramat	1
25.	Pirak Timu	1
26.	Blang Glumpang	1
27.	Langkahan	1
Jumlah		103

Peneliti melihat adanya peningkatan yang signifikan kasus HIV AIDS setiap tahunnya. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 jumlah penderita HIV AIDS adalah sebesar 70 kasus. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh Utara seharusnya bisa mengantisipasi kenaikan kasus HIV AIDS, mengkaji apa yang menjadi kekurangan selama ini sehingga kasus ini semakin menanjak naik. Masyarakat menilai dinas kesehatan tidak melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan kasus secara serius, sehingga kasus HIV

AIDS semakin meningkat dan meluas. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad salah seorang masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah seorang penderita HIV AIDS yang telah meninggal dunia.

“Pada awalnya shock dengan kenyataan bahwa salah seorang sanak saudara saya yang divonis menderita HIV. Saya tidak menyangka hal mengerikan tersebut bisa ada di keluarga kami. Yang saya tahu beliau sakit yang pada penanganannya membutuhkan cuci darah. Beliau sudah beberapa kali melakukan cuci darah. Pada akhir hidupnya kami terkejut dengan pernyataan dokter yang menyatakan bahwa beliau sudah terinfeksi HIV. Ternyata pada masa penanganan cuci darah diduga adanya virus tersebut. Pihak rumah sakit sepertinya tidak berupaya memberikan informasi yang menyeluruh. Akhirnya keluarga hanya bisa pasrah dan berharap semoga hal ini tidak terjadi kepada orang lain”.

Pihak dinas kesehatan menyatakan bahwa selama ini mereka telah melakukan kerjasama dengan para pihak agar kasus HIV AIDS bisa tertangani dengan baik dan bisa menekan angka penderita HIV AIDS.

“Dinas kesehatan sudah berkoordinasi dengan Puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Ada 32 Puskesmas yang kami bina untuk bisa menangani kasus HIV AIDS. Setiap Puskesmas memiliki petugas HIV dan tim VCT yang beranggotakan 4 orang guna melakukan penyuluhan-penyuluhan pada tiap kecamatan yang berbeda. Kami juga melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada dimensi social kesehatan. Misalnya saja seperti Yayasan Permata Aceh Peduli. Kami selalu melakukan koordinasi dan berdiskusi mengenai langkah yang bisa dilakukan untuk penanganannya”.

Senada dengan pernyataan dari Ibu Sri, pak Sayuti juga yang merupakan staf yang menangani bidang khusus HIV AIDS menyatakan bahwa:

“Pengawasan dan penyuluhan dilakukan sekali dalam setahun tetapi dilakukannya pada 15 kecamatan yang berbeda-beda. Namun pada awal tahun 2019, tim dinas kesehatan Aceh Utara tidak lagi melakukan penyuluhan ke gampoeng-gampoeng, melainkan sudah mulai dilakukannya sosialisasi ke sekolah-sekolah dikarenakan saat ini terdapat banyak kasus penyimpangan seksual seperti homoseksual pada remaja tingkat sekolah dan dikhawatirkan penyebaran HIV AIDS semakin meningkat dikarenakan kasus tersebut. Dan kasus penyimpangan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh remaja SMA saja, bahkan mahasiswa yang juga sudah melakukannya, yaitu menjadi bagian kelompok gay, atau lelaki seks lelaki (LSL). Dengan kata lain, laki-laki menyukai lelaki dan melakukan hubungan seksual sesama lelaki”.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan menyadari bahwa masih banyak yang harus dipersiapkan dalam mengaplikasikan Permendagri No. 100 Tahun 2018 ini. Dinas harus memulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri:

“Pemerintah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar khususnya bidang kesehatan berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan. Walau pada tahap implementasi kami masih belum bisa melakukan sepenuhnya seperti yang diamanatkan. Masih ada beberapa hal teknis yang menjadi kendala, seperti anggaran yang dibebankan pada APBK Aceh Utara dan belum sepenuhnya data penderita HIV AIDS yang terdeteksi”.

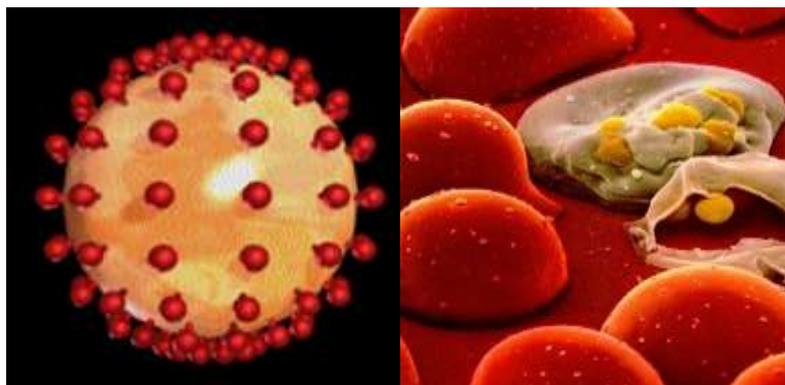
Peneliti melihat bahwa pihak pemerintah kabupaten Aceh Utara belum mampu memaksimalkan untuk melaksanakan Permendagri nomor 100 tahun 2018 ini. Walaupun dalam aturan permendagri ini pemerintah daerah dapat melakukannya secara bertahap. Kasus HIV AIDS menjadi perhatian seluruh dunia karena dampak yang mengerikan bisa terjadi. Ketidakseriusan ini terlihat dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan belum bisa memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang harusnya termuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Jika pun ada tidak secara mendetail menjelaskan standar pelayanan minimal seperti yang diamanatkan oleh Permendagri No. 100 tahun 2018. Hal lain, peneliti melihat perangkat daerah belum secara serius memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD, dan belum bisa memastikan anggaran program dalam APBK Aceh Utara tahun 2019 ini.

Peneliti juga mendapati ketika menggali lebih lanjut mengenai informasi mengenai struktur tim penerapan SPM Kabupaten Aceh Utara tidak mendapati informasi secara mendetail. Pihak pemerintah hanya menyatakan bahwa Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Utara sudah terbentuk, hanya saja belum

sepenuhnya bisa melakukan hal-hal secara penuh sesuai dengan Permendagri tersebut. Adanya fakta bahwa Tim Penerapan SPM Kabupaten Aceh Utara belum juga sepenuhnya bisa melaksanakan tugas yang seperti; menyusun rencana aksi SPM, melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM, mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait penerapan SPM secara periodik, melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat.

### **Quality Assurance Pelayanan HIV AIDS di Kabupaten Aceh Utara**

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Utara, dikarenakan perkembangan kasusnya cenderung meningkat. Kelompok yang paling rentan tertular virus ini adalah remaja dan ibu rumah tangga. Pengetahuan mereka tentang masalah ini masih rendah. Terutama kesehatan produksi. Khususnya cara-cara melindungi diri dari perilaku seksual yang beresiko, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual terutama HIV dan AIDS. Hingga Juni 2018, menurut data kementerian Kesehatan, diperkirakan terdapat lebih dari 600 ribu orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia. Rinciannya, total penderita HIV sebanyak 301.959 orang dan AIDS 108.829 orang, didominasi usia produktif 25-49 tahun. Sedangkan tahun 2019 dari bulan April sampai dengan Juni jumlah kasus HIV yang dilaporkan sebanyak 11.519 orang. Persentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-49 tahun (71,1%), diikuti kelompok umur 20-24 tahun (14,4%), dan kelompok umur  $\geq 50$  tahun (9%). Ratio HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Persentase faktor risiko HIV tertinggi pada bulan April-Juni 2019 adalah hubungan seks beresiko pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) (18%), Heteroseksual (17%) serta penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun (1%). Terjadi peningkatan jumlah kasus HIV yang dilaporkan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 (11.081 orang menjadi 11.519 orang).



Dari bulan April sampai dengan Juni 2019 jumlah AIDS dilaporkan sebanyak 1.463 orang. Persentase AIDS tertinggi pada kelompok umur 30-39 tahun (34,7%), diikuti kelompok umur 20-29 tahun (27,3%) dan kelompok umur 40-49 tahun (20,4%). Persentase faktor risiko tertinggi adalah hubungan seks berisiko pada heteroseksual (70%), homoseksual (Lelaki Seks Lelaki) (22%), perinatal (3%), biseksual (2%) dan penasun (1%). Terjadi penurunan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan dibandingkan triwulan I tahun 2019 (1.536 orang menjadi 1.463 orang).

Di Kabupaten Aceh Utara data yang peneliti terima dari pihak Dinas Kesehatan sendiri adalah sebesar 103 kasus HIV AIDS, 36 diantaranya meninggal dunia karena tidak rutinnya mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran petugas. Aceh Utara merupakan Kabupaten tertinggi kasus HIV AIDS di Propinsi Aceh. Jumlah pengidap HIV AIDS di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Narkoba dan gaya hidup bebas menjadi faktor utama meluasnya virus mematikan ini. AIDS disebabkan oleh *Human immunodeficiency Virus* (HIV). HIV masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Chaidir, salah seorang penggiat pencegahan dan pengendalian HIV AIDS yang juga salah seorang pendiri Yayasan Permata Atjeh Peduli (YPAP) berikut ini:

“Penyakit ini dapat dipisahkan menjadi empat fase atau tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi HIV Primer. Sejak waktu infeksi virus sampai terbentuknya antibody dalam darah. Pengidap akan merasakan demam ringan, berkeringat pada malam hari. Fase pertama ini juga

mencakup periode jendela. Tahap kedua adalah Tahap Asimptomatik. Dimana pengidap dalam keadaan sehat sebagaimana biasa, sistem imunnya masih cukup kuat. Tahap ketiga adalah Tahap HIV Simptomatik. Pengidap adakalanya mengalami nyeri mulut ringan, infeksi kulit atau berkeringat di malam hari. Orang tersebut dapat menerima perlakuan atau pengobatan untuk infeksi dan menjadi sembuh. Beberapa bulan kemudian, ia akan mengalami infeksi yang lain lagi. Infeksi-infeksi ringan ini menandakan skala kecil dari melemahnya kekebalan. Hal ini berarti virus HIV telah merusakkan sistem imun pada titik dimana sistem imun tidak lagi dapat memerankan fungsi normalnya. Tahap keempat yaitu Perkembangan HIV menjadi AIDS. Insiden tetap dari infeksi oportunistik serius seperti TB, PCP (yaitu infeksi oportunistik serius pada paru-paru), diare dan *kaposi'ssarcoma* (salah satu jenis kanker kulit). Terjadinya kemunduran dalam kesehatan, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian. Dalam fase terakhir ini kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut memiliki AIDS”.

Seseorang yang pada fase terakhir, kondisi seseorang merosot hingga sampai pada tingkat dimana ia tidak mampu bekerja. Fase ini dapat bertahan 16 hingga 18 bulan. Pada beberapa orang fase ini lebih singkat. Media telah menciptakan kesan bahwa kemunduran kesehatan berlangsung bertahun-tahun, dengan gambaran orang terbaring di rumah dan rumah sakit. Pada kenyataannya hal ini hanya terjadi selama beberapa bulan terakhir dari fase keempat. Pada sebagian besar periode ini orang cukup sehat untuk melanjutkan bekerja atau beraktivitas. Hal ini dalam kenyataannya beragam antara satu dan lain orang. Beberapa orang cenderung menjadi sakit secara kronis untuk waktu yang lama, padahal masih dapat berfungsi secara normal.

## **KESIMPULAN**

Standar pelayanan minimal (SPM) yang diatur oleh UU No. 23 tahun 2014 yang meliputi 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan umum, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada dasarnya telah diketahui oleh petugas medis di rumah sakit umum daerah (RSUD) Cut Meutia. Dalam menjalankan fungsi dan perannya petugas medis merujuk pada peraturan tersebut sebagai upaya untuk mencapai pelayanan publik yang maksimal. Terlebih lagi dalam penanganan masyarakat (pasien) yang menderita

penyakit HIV AIDS. Pasien yang terpapar penyakit menular ini membutuhkan penanganan medis yang optimal dan membutuhkan perlakuan secara berbeda dengan mereka yang menderita penyakit lainnya. Terutama sekali pelayanan yang berbasis pada pendekatan interpersonal (*interpersonal approach*) agar pasien tetap optimis dengan kesembuhannya.

Melibatkan partisipasi masyarakat dan tokoh agama secara luas juga menjadi bagian terpenting bagi mereka, dalam melakukan dukungan psikososial kepada para penderita HIV AIDS. Karena dukungan psikososial bisa meningkatkan penerimaan status (penerimaan diri merupakan sikap yang merefleksikan perasaan nyaman sehubungan dengan status HIV-nya), dukungan akses layanan *Care Support Treatment* (CST) (dimaksudkan untuk memberikan rujukan kepada ODHA guna melakukan pemantauan kesehatannya atau mengakses layanan pengobatan melalui layanan CST, yaitu layanan terkait HIV dan IMS yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui fasilitas kesehatan yang ada. Dukungan kepatuhan berobat (bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pengobatan yang disepakati dilaksanakan dan dipatuhi secara baik dan benar untuk jangka waktu yang lama). Dukungan pencegahan positif ( adalah upaya-upaya pemberdayaan ODHA yang be

## DAFTAR PUSTAKA

- Airasian. Peter W & Gay. L.R. (2003). Educational Research: Competences for Analysis and Applications. 7<sup>th</sup> Edition. Pearson.
- Azwar. Azrul. (2006). Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan (Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecahan Masalah). Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.
- Ennis. Kay Dwney & Harrington. Dennis. (2005). Organisational Effectiveness in Irish Helath Care Organizations. *Managing Service Quality*. Int 10. 377-386
- Fogel. R.W. (1986). Nutrition and The Decline in Mortality since 1700; Some Futher Preliminary Findings. *Long Term Factors in American Economic Growth*
- Hary. Tjitono. (2000). *Kualitas Pelayanan Konsumen*. Jakarta. Grapindo Persada
- Junaidi. P. (2001). *Seminar Survai Kepuasan Pasien Di RS Secara Menyeluruh*. Yogyakarta. UGM
- KickBush. Iloni. (2008). Health Literacy: an Essential Skill For The Twenty First Century.. *Health Education*. Vol 108 (02)
- Marc. Suhrcke. Mc.Kee. Martin & Rocco. Lorenzo. (2007). Health Investment Benefits Economic Development. WHO European Office for Investment for Health and Development. Vol. 370
- Maziak. Asfar. Mzayek. Fouad & Nael. (2002). Socio-Demographic Correlates of Psychiatric Mordibity Among low Income Women in Aleppo. *Syiria. Social Science & Medicine*. 54. 1419-1427
- Mc Millan. James H. & Schumacher. Sally. (2006). *Research Education: Evidence Based Inquiry*. 6<sup>th</sup> Edition. Pearson
- Moleong. Lexi J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya
- Morse. Stephen. (2003). For Better or For Worse. Till The Human Development Index Do Us Part?. *Ecological Economics* 45. 281-296
- Patton. Michael Quinn. 1987. *How to Use Qualitative Methods Evaluation*. Sage publications. California.
- Peraturan Menteri Dalam Nergeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- Plano-Clark. Vicki L. & Creswell. John W. (2010). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publication

- Pohan. Imbalo. (2007). Jaminan Mutu Layanan Kesehatan; Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta. Buku Kedokteran
- Sanusi. Yakeen. (2008). Application of Development Index to Measurement of Deprivation Among Urban Household in Minna. Nigeria. Habitat International.
- Silva. Indunil. (2008). Micro Level Determinants of Poverty Reduction in Sri Lanka. A Multivariate Approach. International Journal of Social Economics. Vol. 35 (3). 140-158
- Sirait. Paul. (2009). Pengaruh Layanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin Terhadap Pembangunan Manusia Dalam Pengembangan Wilayah di Kota Medan. Disertasi Universitas Sumatera Utara.
- Sirojuzilam .(2015). Pembangunan Ekonomi Regional. Medan. USU Press
- Smith. Judith.. & Mays. Nicholas. (2007). Primary Care Organization in New Zealand and English: Typing The Balance of The Health Sistem In Favour of Primary Care?. International Journal of Health Planning and Management. Int J Health Plann Mgmt 2007. 22. 3-19
- Soobader & Le Clere. (1999). Aggregation and Measurement of Income Inequality: Effect on Mordibity. Social Science & Medicine 48. 733-744
- Tjiptoherijanto & Budi. (1994). Ekonomi Kesehatan. Jakarta. Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Zikri Bin Muhammad. (2012). Tahap Kecekapan Penyampaian Pelayanan Oleh Pihak Berkuasa Daerah di Malaysia: Kasus Majlis Perbandaran Kajang. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia

**STRATEGI KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI GURU  
DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN  
KEPRIBADIAN ANAK-ANAK CACAT**  
**Studi Deskriptif pada SLB Qalibun Insanni Kecamatan Celala  
Kabupaten Aceh Tengah**

**Subhan. AB<sup>1)</sup>, Viana Safrida Harahap<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Gajah Putih  
Takengon  
email: *subhanab76@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui strategi komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat. Untuk mengetahui kendala komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi guru komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat yaitu dalam proses belajar mengajar antara guru dengan siswa berbentuk komunikasi sehari-hari. Dalam hal ini komunikasi memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam perkembangan kepribadian siswa. Bentuk komunikasi yang efektif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah bentuk komunikasi antarpersonal. Karena dalam proses tersebut dapat menghasilkan (timbal balik) yang dimana dapat mengetahui apakah komunikasi dapat diterima dengan baik atau tidak. Selain itu kedua proses tersebut dapat memaksimalkan penyampaian informasi dari guru kepada siswanya. Agar informasi yang diberikan oleh guru dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh siswanya. Dengan demikian Guru telah memberikan upaya yang baik melalui menggunakan jenis komunikasi. Pendekatan ini telah berhasil dilakukan namun belum mencapai hasil secara maksimal. Kemudian faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat. Faktor yang mendukung komunikasi guru terhadap siswa dalam perkembangan kepribadian siswa adalah adanya respon yang baik dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun ketika latihan di dalam kelas. Ketika terdapat respon dari siswa maka komunikasi antara guru dengan siswa dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Adapun faktor penghambat adalah ada beberapa siswa yang senantiasa melakukan kenakalan didalam kelas sehingga mengganggu proses komunikasi yang terlaksana sebagaimana harapan.

**Kata kunci:** *Strategi Komunikasi Antar Pribadi, Guru, Anak, Cacat.*

## **PENDAHULUAN**

Komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Komunikasi juga dikatakan sebagai suatu proses yaitu aktivitas yang mempunyai beberapa tahapan yang terpisah antara satu sama lainnya tetapi mempunyai hubungan pemakaian informasi menunjuk pada peranan informasi dalam mempengaruhi tingkah laku manusia, baik secara individual, kelompok maupun masyarakat, jadi jelas bahwa tujuan komunikasi adalah untuk mempengaruhi tingkah laku orang.

Komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan berupa umpan balik seketika. Komunikasi antarpribadi merupakan adalah proses pengalihan informasi dari satu atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu atau kelompok orang lainnya (Effendy, 2003: 78).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sebagai pertukaran makna, komunikasi bersifat khas-unik dan tidak dapat diulangi persis sama. Karena, meski orang yang berkomunikasi sama, namun bila diulang, waktu, situasi, dan keadaan bathin orang yang berkomunikasi sudah berbeda. Karena itu, dalam setiap komunikasi, baik orang yang mengirim maupun yang menerima dampaknya tidak dapat dihilangkan karena mereka dapat dihilangkan karena mereka tidak dapat mencabut kata yang sudah mereka ucapkan dan mengganti dampak yang diakibatkannya merka hanya dapat mengubah kata-kata.

Kepribadian anak terbentuk dengan melihat dan belajar dari orang-orang disekitar anak. Keluarga adalah orang yang terdekat bagi anak dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Segala perilaku orang tua yang baik dan buruk akan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik demi pembentukan kepribadian anak. Pola asuh yang baik untuk pembentukan kepribadian anak adalah pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga mengendalikan anak. Sehingga anak yang juga hidup dalam masyarakat, bergaul dengan lingkungan dan tentunya anak mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin dapat merusak kepribadian anak, akan dapat dikendalikan oleh orang tua dengan menerapkan sikap-sikap yang baik dalam keluarga serta contoh atau tauladan dari orang tua (Kartini Kartono, 2001: 13).

Perkembangan kepribadian siswa melalui kehidupan sosial yaitu suatu proses dimana seorang anak belajar menjadi anggota dan berpartisipasi dalam masyarakat. Suatu proses penanaman atau tranfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pada dasarnya tidak ada seorang manusia} pun yang tidak melakukan proses sosialisasi dalam hidupnya. Manusia hidup dari dan dalam masyarakat.

Melalui proses sosialisasi seseorang menjadi tahu, pandai dan terampil bagaimana ia harus berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam proses sosialisasi seseorang mempelajari peran-peran sosial agar dia mampu berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan dan norma yang berlaku dan ditranfer dari masyarakat atau kelompoknya. Seperti menumbuhkan disiplin dasar yaitu disiplin membatasi pemenuhan kepuasan sesaat dengan jalan menunda atau mengubah pemenuhan keinginan seseorang demi persetujuan sosial atau demi tujuan di masa depan. Membentuk diri seseorang agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat dimana dia tinggal.

Berdasarkan hasil observasi penulis, dapat dilihat bahwa, seiring dengan hambatan sikap yang dihadapi oleh peserta didik pada setiap hari, hambatan lain yang penting adalah hambatan fisik, yang meliputi gedung sekolah, taman bermain, toilet dan lain-lain. Selain itu, sebagian besar sekolah secara fisik tidak dapat diakses untuk banyak peserta didik. Karena sekolah tidak dilengkapi untuk

menanggapi kebutuhan khusus. Kemudian kurangnya tenaga guru yang mampu mengajar anak yang berkebutuhan khusus (anak cacat).

## **LANDASAN TEORI**

### **Komunikasi**

Scharmm mengemukakan bahwa istilah komunikasi berasal dari Bahasa Inggris “*Communication*” yang juga berasal dari perkataan Latin yakni “*Communicatus*” yang berarti sama (*common*). Jadi pada saat kita melakukan komunikasi itu berarti kita juga sedang berusaha melakukan kesamaan (*communes*) dengan orang lain. Suatu komunikasi menurut Scharmm tidak akan aktif apabila kepentingan bersama antara komunikator dan komunikan tidak terpenuhi (Effendy, 2006: 28).

Menurut E.M. Rogers komunikasi adalah penyampaian gagasan, informasi, instruksi dan perasaan dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kepada kelompok orang yang lain (Effendy, 2006: 14). Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal demikian dapat dijelaskan bahwa, komunikasi terjadinya pertukaran kata dengan arti dan makna tertentu. Dari sudut pandang pertukaran makna komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Pertukaran makna merupakan inti yang terdalam dari kegiatan komunikasi karena yang disampaikan orang dalam komunikasi bukan kata-kata, tetapi arti atau makna dari kata-kata yang ditanggapi orang dalam komunikasi bukan kata-kata tetapi makna dari kata-kata karena merupakan interaksi, komunikasi merupakan kegiatan yang dinamis selama komunikasi berlangsung dengan baik pada pengirim maupun pada penerima terus- menerus terjadi saling memberi dan menerima pengaruh dan dampak dari komunikasi tersebut.

### **Komunikasi Antar Pribadi**

Komunikasi antarpribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan

beberapa efek dan berupa umpan balik seketika. Komunikasi antarpribadi merupakan adalah proses pengalihan informasi dari satu atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu atau kelompok orang lainnya (Effendy, 2003: 78).

Komunikasi antarpribadi mempunyai berbagai macam manfaat. Melalui komunikasi antarpribadi bisa mengenal diri sendiri dan orang lain. Melalui komunikasi antarpribadi bisa mengetahui dunia luar. Melalui komunikasi antarpribadi dapat menjalin hubungan yang lebih bermakna. Melalui komunikasi antarpribadi dapat melepaskan ketegangan.

Keuntungan dari komunikasi jenis ini adalah: a. Terjadinya kontak pribadi (*personal contact*) pribadi yang menyentuh pribadi komunikan, b. Ketika menyampaikan pendapat maka akan adanya umpan balik berlangsung seketika (*immediate feedback*), c. Bisa langsung mengetahui umpan balik dari komunikan, baik raut muka, dan perasaannya, gayanya, d. Mengetahui jika gagal menyampaikan pesan maka bisa mengubah gaya penyampaian pesan.

Menurut De Vito (2007: 234-236), prinsip-prinsip dalam komunikasi antarpribadi adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi adalah paket isyarat
- 2) Pesan yang kontradiktif
- 3) Komunikasi Adalah Proses Penyesuaian

### **Definisi Guru**

Secara etimologi, istilah guru dalam bahasa Inggris disebut “teacher”, sedangkan dalaam bahasa Arab dikenal dengan istilah “mu’alim”, mudaris, muhadzib, mu’adib”, yang berarti orang yang menyampaikan ilmu, pelajaran, akhlak, dan pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru diartikan orang yang mengajari orang lain, di sekolah atau mengajari ilmu pengetahuan atau keterampilan (Murip, 2013:24).

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan ikut meningkatkan mutu pendidikan nasional yang bertujuan berkembangnya peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara umum, tugas guru dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Profesi. Tugas profesi ini meliputi mendidik, mengajar, dan melatih;
- 2) Kemanusiaan. Salah satu tugas ini adalah menjadi orang tua kedua.
- 3) Kemasyarakatan.

Salah satu tugas ini ikut mencerdaskan bangsa dan ikut membantu menciptakan dan membentuk warga Indonesia yang bermoral Pancasila (Murip, 2013:24).

### **Guru SLB**

Pendidikan adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Tanpa pendidikan, anak tidak akan dapat mencapai martabat kemanusiaan, tidak bisa menjadi pribadi utuh; juga tidak bisa menjadi insan sosial dan abdi Tuhan yang saleh. Sebab anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan serba kurang lengkap, dengan naluri dan fungsi-fungsi jasmani-rohani yang belum berkembang (Kartono, 2001:5).

Salah satu jenis pendidikan yang ada di Indonesia adalah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Lembaga Pendidikan Luar Biasa adalah lembaga pendidikan yang profesional, yang bertujuan membentuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Seorang Guru SLB dalam meningkatkan kinerjanya perlu memahami dan memiliki kompetensi dasar sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat dicapai sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan khusus didasari oleh tiga kemampuan, yaitu; (1) kemampuan umum (general ability), (2) kemampuan dasar (basic ability), dan (3) kemampuan khusus (specific ability). Kemampuan umum adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), kemampuan dasar adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, sedangkan

kemampuan khusus adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus jenis tertentu (spesialisasi) (Supriadi, 2003:16).

Kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya tersebut menggambarkan pengalaman-pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam pekerjaan dan harapan-harapan mengenai pengalaman mendatang (Arum, 2008:9). Selain itu Kumar (2007:32) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah tingkatan emosi positif yang diukur ketika pekerjaan seseorang tampak memenuhi tugas penting yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Kepuasan kerja guru merupakan perasaan guru tentang menyenangkan atau tidak mengenai pekerjaannya dan sejauh mana penerimaan dan nilai-nilai seorang guru terhadap faktor-faktor seperti evaluasi, hubungan rekan kerja, tanggung jawab, dan pengakuan.

Guru di SLB memiliki tantangan tersendiri di dalam pekerjaannya sebagai guru yang berbeda dengan guru-guru di sekolah biasa lainnya. Guru SLB dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti harus mengajar siswa yang memiliki kebutuhan khusus, kurangnya ketersediaan sumber daya guru SLB, rendahnya insentif yang mereka terima, kurangnya perhatian pemerintah terhadap Sekolah Luar Biasa (Supriadi, 2003:12). Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa guru SLB, mereka menyatakan bahwa pekerjaan mereka lebih berat dibandingkan guru di sekolah biasa, tetapi fasilitas sekolah yang mendukung proses belajar, insentif dan perhatian dari pemerintah yang mereka dapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sebagai guru pendidik di SLB.

### **Definisi Psikologi**

Menurut asal katanya berasal dari kata-kata Yunani : *Psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harfiah Psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Dengan singkat disebut ilmu jiwa.

Berbicara tentang jiwa sering orang menafsirkan artinya secara berbeda-beda. Ada orang mengartikan jiwa adalah nyawa, ada pula yang mengartikannya sebagai arwah, sukma, batin, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai akal budi. Tetapi arti “ ilmu jiwa” masih kabur sekali. Apa yang dimaksud dengan “ jiwa”,

tidak ad seorang pun yang tahu dengan sesungguhnya. Karena kekaburan arti itu, sering timbul berbagai pendapat mengenai definisi Psikologi yang saling berbeda (A. King, 2010:5).

### **Definisi Kemampuan Anak**

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan anak berusaha dengan diri sendiri (A. King, 2010:9). Kemampuan sebagai suatu dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil.

Sementara itu, (Ahmad, 2004:14) kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (*ability*) adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

### **Nilai-Nilai Kepribadian**

Mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab pada hakikatnya dekat dengan makna kepribadian. Pengembangan potensi tersebut harus menjadi landasan implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Dalam arah dan kebijakan dan prioritas pendidikan kepribadian ditegaskan bahwa pendidikan karakter sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025. Bahwa pendidikan kepribadian sejalan dengan prioritas pendidikan nasional, dapat dicermati dari standar kompetensi lulusan (SKL) pada setiap jenjang pendidikan. Sebagaimana diketahui untuk memantau pelaksanaan pendidikan dan mengukur ketercapaian kompetensi yang ingin diraih pada setiap jejang pendidikan telah diterbitkan permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan (SKL). Jika dicermati secara mendalam, sesungguhnya hampir pada setiap rumusan SKL tersebut secara implicit maupun eksplisit baik pada SKL SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, memuat substansi nilai/ kepribadian.

Gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam draf Grand Design pendidikan kepribadian. Dalam draf tertanggal 23 Oktober 2010 tersebut, pada setiap rumusan SKL dicoba diberikan keterangan tentang kepribadian apa yang dapat dikembangkan pada pencapaian setiap SKL. Mengingat Grand Desing ini

masih merupakan draf memang ada hal-hal yang patut di pertanyakan tentang makna nilai-nilai yang di cantumkan kecuali itu pada draf tersebut ada SKL yang tidak ditulis lengkap, terutama pada SKL untuk SMP/MTs/SMA/MA sehingga harus dikembangkan sesuai dengan SKL yang ada pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, dan dituliskan nilai/ kepribadian yang kira-kira sesuai dengan rumusan SKL-nya. Hal tersebut dapat diamati dari sejumlah table dibawah ini (Ali, 2010:283):

Table 2.1

substansi nilai/karakter yang ada pada SKL SD/MI/SDLB/PAKET A

NO.	Rumusan SKL	Nilai/Karakter
1	Kenjelaskan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan anak	Iman dan tkwa bersyukur.
2	Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri	Jujur, mawas diri.
3	Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.	Disiplin
4	Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.	Terbuka, nasionalistik, menghargai ( <i>respect</i> ), harmonis, tolera.
5	Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.	Bernalar, kreatif, kritis, tanggap.
6	Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan Guru/pendidik.	Bernalar, kreatif, kritis,
7	Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.	Benar, curiositas (kepenasaran intelektual)
8	Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.	Bernalar, mampu memecahkan masalah ( <i>problem solving</i> )
9	Menunjukkan kempuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar.	Terbuka, bernalar, kuriotitas
10	Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.	Peduli, tanggung jawab
11	Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, Negara,dan tanah air Indonesia.	Nasionalistik, kewargaan ( <i>civic</i> ) dan kewarganegaraan ( <i>citizenship</i> )
12	Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya local.	Nasionalistik

13	Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, buger, aman, dan memnfaatkan waktu luang.	Bersih, tanggung jawab, menghargai kesehatan, kreatif
14	Berkomunikasi secara jelas dan santun.	Santun
15	Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.	Gotong royong, peduli
16	Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.	Gigih, tekun
17	Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.	Bernalar, teliti

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup pendidikan kepribadian adalah mendidik siswa untuk cerdas dalam segala hal baik dari segi emosional atau mampu dalam mengendalikan emosi, spiritual, maupun intelektualnya.

### **Jenis-Jenis Cacat pada Manusia**

Semua manusia diciptakan Tuhan secara berbeda-beda satu sama lain. Selain secara fisik yang berbeda-beda, manusia juga diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tidak lain bertujuan agar manusia bisa saling kenal-mengenal satu sama lain.

Macam-macam/jenis-jenis kecacatan atau kelainan pada manusia:

#### **1. Buta (tuna netra)**

Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter (Aynunin, 2012:4).

#### **2. Tuli (Tuna Rungu)**

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat

pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik (Aynunin, 2012:4).

**3. Bisu (Tuna Wicara)**

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu (Aynunin, 2012:4).

**4. Cacat Fisik (Tuna Daksa)**

Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.

**5. Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita)**

Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari (Aynunin, 2012:5).

**6. Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras)**

Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras (Aynunin, 2012:6).

## 7. Cacat Kombinasi (Tuna Ganda)

Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.

### Keperibadian Anak Cacat

Istilah keperibadian digunakan untuk pengertian yang ditujukan pada individu atau perorangan. Artinya, yang mempunyai keperibadian adalah individu. Gordon W. Allport (1937) memberikan definisi keperibadian: *Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment*. Terjemahannya adalah keperibadian sebagai organisasi sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya (Kartono, 2001: 13).

Keperibadian anak terbentuk dengan melihat dan belajar dari orang-orang disekitar anak. Keluarga adalah orang yang terdekat bagi anak dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Segala perilaku orang tua yang baik dan buruk akan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik demi pembentukan keperibadian anak. Pola asuh yang baik untuk pembentukan keperibadian anak adalah pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga mengendalikan anak. Keperibadian merupakan hasil pengaruh hereditas dan lingkungan. Thomas dan kawan-kawan mengatakan, “keperibadian dibentuk oleh temperamen dan lingkungan yang terus menerus saling mempengaruhi”. Mereka selanjutnya menerangkan bahwa “jika kedua pengaruh itu harmonis, orang dapat mengharap perkembangan anak yang sehat, jika tidak harmonis, masalah perilaku hampir pasti akan muncul” Terdapat tiga faktor yang menentukan perkembangan keperibadian; faktor bawaan, pengalaman awal, dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan selanjutnya. Pola tersebut sangat erat hubungannya dengan kematangan ciri fisik dan mental yang merupakan unsur bawaan individu. Ciri-ciri ini menjadi landasan bagi struktur keperibadian yang dibangun melalui pengalaman belajar Nani (2010: 7).

Melalui belajar, sikap terhadap diri dan metode khas untuk menanggapi orang dan situasi, sifat-sifat kepribadian didapatkan melalui pengulangan dan kepuasan yang diberikannya. Pengalaman belajar yang awal terutama didapat dirumah dan pengalaman kemudian diperoleh dari berbagai lingkungan diluar rumah. Tekanan sosial dirumah, sekolah dan kelompok teman sebaya juga mempengaruhi corak sifat-sifat kemudian hari. Bila agresivitas diperkuat karena dianggap ciri yang sesuai dengan jenis kelamin untuk anak laki-laki, anak akan berusaha belajar bersikap agresif (Nani, 2010:8)

Komunikasi berkaitan dengan perilaku manusia dan kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lainnya di muka bumi ini. Komunikasi merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, tanpa komunikasi seseorang akan merasa terisolasi. Pertukaran pesan terjadi dalam proses komunikasi. Hal ini yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Bahkan untuk hal-hal kecil, manusia juga memerlukan pertukaran pesan agar memperoleh informasi tentang hal tersebut.

Pesan-pesan yang dipertukarkan ini tidak hanya berupa bahasa verbal tapi juga dapat terlihat dalam perilaku manusia yang lainnya. Ketika kita mengedipkan sebelah mata, melambaikan tangan, mengganggu-anggukkan atau menggeleng-gelengkan kepala, mengernyitkan alis, membelalakkan mata dan sebagainya. Namun, perilaku-perilaku tersebut baru bisa dikatakan sebagai sebuah pesan jika memenuhi dua syarat. Pertama perilaku tersebut dilihat oleh seseorang lainnya dan yang kedua adalah perilaku tersebut memiliki makna.

Pesan seperti yang telah digambarkan di atas, baik yang berupa verbal ataupun nonverbal telah menunjukkan bahwa komunikasi itu bersifat simbolis. Susanne K. Langer mengatakan bahwa kebutuhan akan simbolisasi adalah kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh manusia. Menurutnya, fungsi pembentukan simbol ini adalah satu diantara kegiatan-kegiatan dasar manusia, seperti makan, melihat dan bergerak. Ini adalah proses fundamental dari pikiran dan berlangsung setiap waktu (Rakhmat, 2005:96).

## **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini sebagaimana judul pada penelitian yaitu “Strategi Komunikasi Antar Pribadi Guru dalam Perkembangan Kepribadian Anak-Anak Cacat (Studi Deskriptif pada SLB Qalbun Insanni Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah )”. Berdasarkan hal di atas maka ruang lingkup penelitian ini yaitu Strategi Komunikasi Antar Pribadi Guru dalam Perkembangan Kepribadian Anak-Anak Cacat. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) di SLB Qalbun Insanni Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah . Sebagai objek penelitian adalah guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan Kepribadian Anak-Anak Cacat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Dezin dan Lincoln dalam Moleong tahun 2007 “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada” (Moleong, 2007:5). Berdasarkan hal demikian, penulis ingin mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana strategi komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat. Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber primer berupa hasil observasi atau pengamatan langsung serta wawancara dengan responden yaitu siswa dan guru. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku perpustakaan, majalah, opini, jurnal, media internet dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan analisis dengan langkah-langkah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Observasi**

Observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung ke tempat penelitian. Pengamatan ini dilaksanakan selama 2 hari, adapun hasil pengamatan penulis yaitu:

### 1) **Observasi Guru**

Komunikasi antara guru dengan siswa terjadi ketika guru memberikan materi pelajaran di dalam kelas pada proses pembelajaran (belajar mengajar), maupun ketika memberi penjelasan di lapangan sebelum melakukan sebuah praktek. Komunikasi yang digunakan berbentuk verbal dan non verbal. Non verbal yang ditemukan adalah komunikasi yang dilakukan antara guru dan siswa yaitu komunikasi secara tertulis. Karena seorang guru yang menyampaikan materi secara tertulis di papan tulis. Sedangkan komunikasi verbal dilakukan terhadap siswa yang buta, tuli dan bisu.

Berdasarkan hasil observasi penulis juga menemukan komunikasi kelompok dan masa. Komunikasi kelompok diantaranya ketika ada beberapa siswa yang sedang berbicara bersama. Ini merupakan suatu proses komunikasi kelompok. Karena mereka terdiri dari lebih 1 orang dan dalam lingkup tertentu. Kemudian komunikasi massa penulis temukan ketika seorang guru sedang menjelaskan ataupun menyampaikan materi kepada siswa. Dan hal ini sebagai komunikasi masa karena pesan atau materi tidak hanya untuk satu siswa melainkan bagi seluruh siswa dalam kelas.

### 2) **Observasi Siswa**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, siswa memberikan respon yang kurang efektif. Beberapa siswa ketika proses pembelajaran tampak sangat mengantuk, tidak jarang mereka menguap dan secara tidak sadar kepala mereka telah berada di atas meja. Padahal sebelum bimbingan belajar berlangsung, mereka bermain dengan riang dan gembira seakan tidak ada lelahnya. Hal ini disebabkan mereka yang memiliki cacat yang berbeda ada yang tidak bisa mendengar, melihat maupun berbicara.

### **Strategi Komunikasi Antar Pribadi Guru Dalam Perkembangan Kepribadian Anak-Anak Cacat**

Strategi Komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat dapat dilihat pada kutipan wawancara. Siswa lebih menyukai pelajaran melalui praktek daripada materi yang diajarkan di dalam kelas.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa siswa lebih menyukai mata pelajaran dilaksanakan melalui praktek verbal maupun non verbal daripada siswa harus mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas. Hal ini merupakan salah satu faktor guru memberikan mata pelajaran kepada siswa menggunakan metode yang bervariasi, sebagaimana yang diterapkan pada mata pelajaran lainnya.

Berdasarkan penjelasan metode pembelajaran di atas dapat dijelaskan bahwa, metode pembelajaran yang digunakan di pada mata pelajaran diterapkan oleh guru dalam pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi dan beragam, seperti metode bercerita, tanya jawab, bercakap-cakap, karyawisata, demonstrasi, eksperimen, pemberian tugas, proyek, sosiodrama, maupun metode ceramah. Ini dilakukan agar siswa senantiasa bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Metode yang diterapkan oleh guru merupakan salah satu bentuk komunikasi antara guru dan siswa. Jenis komunikasi yang diterapkan dalam pembelajaran sama halnya dengan metode yang digunakan, yaitu bervariasi, Penyampaian pesan atau informasi dalam pembelajaran, guru menggunakan berbagai jenis komunikasi, di antaranya, komunikasi verbal, non verbal, dan komunikasi kelompok. Pada penerapannya komunikasi yang paling siswa sukai adalah komunikasi kelompok. Komunikasi yang paling disukai adalah komunikasi kelompok. Karena dalam komunikasi ini mereka dapat saling berinteraksi dan menghilangkan kejenuhan. Kemudian respon siswa terhadap penerapan komunikasi dalam pembelajaran dan yang positif, dan ada juga yang tidak.

Respon positif atau negatif yang diberikan oleh siswa terletak pada keadaan siswa atau karakter siswa itu sendiri yang memiliki minat atau tidaknya terhadap belajar. Siswa yang melakukan kenakalan, lebih sedikit bila dibandingkan dengan siswa yang tidak melakukan kenakalan. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, siswa yang nakal lebih sedikit bila dibandingkan dengan siswa yang tidak. Namun hal tersebut dapat mengganggu siswa yang benar-benar mau belajar dengan tekun.

### **Faktor yang Mendukung dan Menghambat Strategi Komunikasi Antar Pribadi Guru dalam Perkembangan Kepribadian Anak-Anak Cacat**

Beberapa faktor mendukung strategi komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, guru mengatasi siswa yang nakal dilakukan dengan memberikan nasehat, juga memberikan olahraga ringan untuk menghindari stress bagi mereka. Jika dengan hal demikian tidak juga mereka abaikan maka guru sedikit memberikan hukuman. Mengembangkan kepribadian siswa, tidak semata-mata menjadi tanggungjawab guru melainkan tanggungjawab bagi semua guru, kepala sekolah juga orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, melalui pembelajaran dapat membatu pengembangan kepribadian siswa, apabila mendapat dukungan/bimbingan dari orang tua, guru, dan lingkungan. Meskipun demikian guru senantiasa berupaya meningkatkan pembelajaran pada siswa yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan pula bahwa, melalui pembelajaran dapat membatu pengembangan kepribadian, apabila mendapat dukungan/bimbingan dari orang tua, guru, dan lingkungan.

### **Strategi Komunikasi Antar Pribadi Guru dalam Perkembangan Kepribadian Anak-Anak Cacat**

Salah satu usaha untuk menciptakan suatu lingkungan mental yang sehat dapat dilakukan melalui pendidikan yang pembinaannya dimulai sejak Sekolah Dasar. Salah satu peranan pendidikan agama adalah belajar mengendalikan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat atau keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis yang sering juga dikatakan dengan pembinaan kestabilan emosi.

Program kegiatan pendidikan SLB yang baik dan terarah, dapat dijadikan sebagai sarana di dalam pemupukan kestabilan emosi dan keseimbangan mental. Hal ini disebabkan guru-guru pendidikan pada umumnya sangat erat berhubungan dengan siswa. Dalam hal ini tentu guru-guru akan lebih mudah untuk mengamati tingkah laku siswanya secara wajar. Di dalam suasana bebas penuh keakraban tetapi terpimpin, maka siswa akan segera dapat terlihat segala kekurangan dan kelemahan dari masing-masing siswa tersebut. Dengan demikian akan lebih

memudahkan bagi guru pendidikan untuk mengadakan bimbingan dan pengarahan kepada siswa, di dalam usaha memupuk kepribadiannya secara lebih efektif dan efisien.

Melalui bidang pengajaran pendidikan maka pemupukan terhadap pengembangan kepribadian akan diperoleh secara lebih efektif. Siswa akan memperoleh pengalaman secara langsung dalam dunia kenyataan, karena mereka terjun dalam suasana yang penuh rangsangan terhadap timbulnya emosi yang harus dapat di kendalikan.

Komunikasi dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki seni dalam mengajar. Oleh karena itu, untuk mencapai interaksi belajar mengajar yang efektif tentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru (pendidik) dengan siswa (peserta didik). Sehingga terpadunya dua kegiatan, yakni kegiatan mengajar (usaha guru) dengan kegiatan belajar (tugas siswa) yang berdaya guna dalam mencapai tujuan pengajaran. Sering dijumpai kegagalan dalam pengajaran disebabkan lemahnya sistem komunikasi. Untuk itulah guru perlu mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar. Ada tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara pendidik dengan peserta didik.

**Pertama**, Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini, guru berperan sebagai penerima aksi. Guru aktif siswa pasif. Seperti ceramah, pada dasarnya adalah komunikasi satu arah atau komunikasi sebagai aksi. Komunikasi jenis ini kurang banyak menghidupkan kegiatan siswa belajar.

**Kedua**, Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Pada komunikasi jenis ini, guru dan siswa dapat berperan sama, yakni pemberi aksi dan penerima aksi. Keduanya dapat saling memberi dan saling menerima. Komunikasi ini lebih baik dari pada yang pertama, sebab kegiatan guru dan kegiatan siswa relatif sama dan tidak menjadikan siswa sebagai objek pasif.

**Ketiga**, Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Yakni komunikasi yang tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Proses belajar mengajar dengan pola komunikasi

seperti ini mengarah kepada proses pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal. Sehingga menumbuhkan siswa belajar aktif. Seperti diskusi, simulasi merupakan strategi yang dapat mengembangkan komunikasi jenis ini. Ketiga jenis komunikasi di atas tetap memiliki porsi dimasing-masing kondisi, tergantung tujuan apa yang ingin dicapai, sifat bahan pelajaran, sumber belajar yang tersedia, karakteristik kelas, dan kemampuan guru itu sendiri, bagaimana seorang guru akan memilih jenis komunikasi mana yang menurutnya bisa mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada dalam diri siswa.

### **Faktor yang Mendukung dan Menghambat Strategi Komunikasi Antar Pribadi Guru dalam Perkembangan Kepribadian Anak-Anak Cacat**

Pengembangan kepribadian siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, ada 4 faktor penyebab antara lain:

#### **1. Jenis Pembelajaran**

Mata pelajaran memiliki karakteristik masing-masing dan mengandung kekhususan yang membedakan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Maka dari itu, cara pengajaran tiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Ada yang penyampaian dapat dilakukan hanya teoritis saja, ada yang memerlukan praktik, bahkan ada yang harus melakukan eksperimen atau percobaan. Dalam sudut pandang ilmu didaktik, para pengajar harus menerapkan metode yang tepat agar pelajaran yang ia sampaikan tidak membosankan. Ada beberapa pelajaran yang “rawan” dalam hal ini, biasanya pelajaran-pelajaran yang memerlukan metode penyampaian satu arah cenderung lebih membosankan dari pada metode belajar dua arah.

Pelajaran-pelajaran eksak memang tidak menggunakan metode pengajaran satu arah, karena harus disampaikan dengan metode latihan dan eksperimen. Jadi, metode satu arah dapat diterapkan asal menggunakan cara yang interaktif, motivatif, inspiratif, dan membangun karakter siswa, karena cara ini akan mengikut sertakan siswa dalam proses belajar mengajar yang tentunya memacu konsentrasi siswa dalam menyerap pelajaran.

## **2. Kurangnya rangsangan keaktifan siswa dalam belajar**

Tingkat kecerdasan setiap siswa berebeda-beda. Ada siswa yang cerdas sehingga mampu menyerap pelajaran dalam sekali penyampaian, dan ada juga siswa yang harus mendapat berulang kali pengarahannya baru ia mengerti dan memahami suatu pelajaran. Siswa yang mampu menyerap pelajaran dengan mudah biasanya lebih aktif daripada siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik, hal ini karena kebanyakan mereka menganggap bahwa dirinya tidak akan bisa memahami pelajaran (rendah diri). Ini menjadi penyebab terpenting dalam membangun kebosanan bagi siswa. Oleh karena itu, setiap guru dituntut untuk merangsang keaktifan para siswa. Contoh adalah dengan membuat sebuah *game* sederhana yang memacu keaktifan pelajar, berupa kuis yang berisi pertanyaan logika atau hal-hal menyenangkan lainnya. Yang penting adalah, sedapat mungkin para guru membuat semua siswa aktif dalam belajar dengan membuat kegiatan yang mengasyikkan tidak membiarkan para siswa belajar secara pasif. Hendaknya setiap siswa diikutsertakan dalam proses pembelajaran, sebab hal ini sangat menguntungkan bagi guru dan siswa, karena guru dan siswa masing-masing akan mengetahui kelemahannya untuk kemudian dievaluasi agar tercipta proses belajar mengajar yang lebih baik.

## **3. Pendekatan yang salah**

Pendekatan yang salah misalnya, seringkali seorang guru mencoba untuk membangun *image* yang menjadikan dirinya berwibawa. Namun banyak guru salah kaprah dalam menerapkan *image* ini. Bukannya bertambah wibawa, tidak jarang malah mereka menjadi olok-olokan dikalangan siswa. Ini terjadi karena para pengajar sering melakukan pendekatan yang salah terhadap para siswanya. Tidak ada seorang manusia pun yang rela direndahkan derajatnya dan harga dirinya. Oleh sebab itu, jika seorang guru membangun wibawanya dengan cara menyombongkan dirinya dan menjatuhkan harga diri siswanya melalui kata-kata yang menunjukkan bahwa hanya sang gurulah yang benar, maka penjelasan dari guru tersebut tidak akan pernah didengar oleh para siswa, sebaliknya mereka akan mencari kesibukan masing-masing atau bahkan mereka tidur di kelas. Demikian halnya jika sang guru memberi kesan agar siswa-siswa takut kepadanya, yang

terjadi adalah para siswa hanya akan hormat sesaat kepada sang guru yaitu pada saat jam pelajaran sedang berlangsung.

Pendekatan semacam ini menyebabkan guru sering menganggap remeh kepada siswanya, sehingga ia pun mengajarkan hal-hal yang sebenarnya telah diketahui oleh siswanya, apa yang ia ajarkan itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan siswa tidak akan mau berkonsentrasi, sebab ia merasa telah memahami permasalahan tersebut lebih baik daripada gurunya.

#### **4. Kondisi kejiwaan yang sedang memburuk**

Kondisi fisik yang baik belum tentu akan menghasilkan perbuatan yang baik pula, walaupun pepatah berkata bahwa "di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula", namun faktanya sering berlainan. Maka kondisi kejiwaan (*mood*) harus benar-benar sesuai agar menciptakan hasil yang sesuai pula. Manusia sebagai makhluk yang cerdas sebenarnya lebih sering dipengaruhi oleh keadaan jiwa dalam melakukan suatu pekerjaan. Maka dari itu, guru harus mengetahui mood siswa-siswanya, siswa tersebut sedang ada masalah di luar sekolah. Mengadakan bimbingan konseling untuk mengatasinya, jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman dan melindunginya, ini akan membantu untuk meningkatkan gairah dan semangat belajarnya.

Menghindari keempat hal di atas agar tercipta suasana belajar yang menjadi idaman semua pelajar. Belajar yang baik itu tidak penting mahal atau fasilitasnya harus canggih, karena hal tersebut tidak menjamin proses belajar yang efektif tanpa adanya metode belajar yang baik, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita untuk menjadikan belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan.

Kepribadian adalah suatu kesatuan dan kebulatan jasmani dan rohani dari seseorang yang bersifat dinamis dan menjadi dasar kesatuan dan kebulatan tindakan yang akan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui cita-cita, sikap, pembicaraan, cara berpikir dan bertindak dengan berdasarkan falsafah hidup yang diyakininya yang bersumber kepada agama yang dipercayai dan diyakininya.

Sedangkan aspek- aspek pembentukan kepribadian peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek idil atau dasar bersumber dari ajaran wahyu
- 2) Aspek materiil atau bahan berupa pedoman dan ajaran yang terangkum dalam materi bagi pembentukan akhlakul karimah
- 3) Aspek sosial menitik beratkan kepada hubungan yang baik antara sesama makhluk khususnya manusia.
- 4) Aspek teologi pembangunan kepentingan manusia ditujukan pada pembangunan nilai-nilai tauhid sehingga upaya untuk menjadikan kemampuan diri sebagai pengabdian Allah yang setia.
- 5) Demostorial atas penghargaan terhadap paham lawan yang berbeda
- 6) Fitrah manusia, meliputi bimbingan terhadap peningkatan dan pengembangan jasmani dan rohani ruh.

Pembentukan kepribadian peserta didik itu harus seluruh aspek-aspeknya supaya pembentukan kepribadian menjadi paripurna, menyeluruh, terarah dan berimbang. Selain upaya-upaya di atas, upaya pembentukan kepribadian peserta didik yang dapat kita lakukan antara lain :

1) **Pendidikan Keluarga**

Pendidikan keluarga adalah tempat tempat berlangsungnya pendidikan yang pertama dan utama sebelum anak mengenai sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak, sehingga sebagai pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga adalah ayah dan ibu. Jadi baik dan buruknya pendidikan anak-anak dalam keluarga tergantung orang tuanya.

2) **Pendidikan di Sekolah**

Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam pendidikan pengajaran, belajar yang tidak didapatkan anak dalam keluarga. Dengan adanya pendidikan di sekolah maka pendidiknya adalah guru. Seorang guru di samping memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pendidikan agama, juga berfungsi sebagai pembantu keluarga untuk menjadi seorang pendidik dalam usaha pembentukan kepribadian anak.

### **3) Lingkungan Masyarakat**

Menanamkan pendidikan dalam jiwa anak agar mempunyai akhlak yang bermoral tinggi, berbudi luhur terhadap siapapun juga dan bila mana saja, tidak mengenai ruang dan tempat, kalau berkata benar, berbicara jujur, hidup mempunyai malu, jangan suka berdusta, penipu, memelihara amanah dan menepati janji, sopan santun dalam bergaul sesama manusia, tidak bersifat angkuh, sombong, tetapi jangan pula terlalu merendahkan diri, sebaiknya manusia itu bersifat sederhana.

Bertolak dari pendapat di atas, bahwa pembentukan kepribadian seorang peserta didik tidak seperti apa yang dibayangkan, namun ditempuh dalam waktu yang lama, bahkan sejak kecil harus sudah dilatih berbuat dan bersikap baik, yang tidak mengenai tempat, waktu dan situasi. Dengan memberikan latihan-latihan berbuat baik diharapkan peserta didik kelak menjadi dewasa ia mempunyai kepribadian muslim, yang dari aspek-aspek kepribadian tersebut harus dilandasi dengan ajaran Islam.

Pendidikan agama yang diterima oleh anak didalam keluarga merupakan bekal untuk melanjutkan pendidikan di sekolah, hal ini karena sekolah merupakan tindak lanjut dari pendidikan keluarga. Sebagai pendidik tentunya juga menyadari hal tersebut bahwa anak datang dari berbagai lingkungan keluarga yang berbeda, artinya berbagai pengalaman yang dibawa oleh anak dari keluarga sehingga akan beraneka ragam corak kepribadiannya. Oleh karena itu seorang pendidik di dalam menjalankan tugasnya, di samping mengajarkan ilmu pengetahuan juga harus dapat membuat hubungan timbal balik terhadap anak didik. Sebab pekerjaan guru itu menyangkut beberapa faktor yaitu :

Jiwa atau kepribadian anak yang satu sama lainnya berbeda keadaannya, pertumbuhan dan perkembangannya serta wataknya, yang kesemua itu membutuhkan bimbingan yang tepat dari guru. Kepribadian guru itu sendiri merupakan alat yang sangat tajam bagi pelaksanaan pendidikan anak di dalam pendidikan sekolah, sehingga kepribadian guru menjadi ciri dari kesuksesannya. Ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru, seperti metodologi pengajaran, karena dengan ilmu pengetahuan inilah yang akan masuk pada jiwa anak didik.

Peranan gurulah yang sangat' menentukan dalam pembinaan kepribadian anak, karena di samping guru berperan sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pendorong dan pengarah serta bertanggung jawab untuk melihat segala yang terjadi pada diri peserta didik sehingga perilaku keseharian peserta didik dapat selalu dipantau dan diawasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi komunikasi guru komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat yaitu dalam proses belajar mengajar antara guru dengan siswa berbentuk komunikasi sehari-hari. Dalam hal ini komunikasi memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam perkembangan kepribadian siswa. Bentuk komunikasi yang efektif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah bentuk komunikasi antarpersonal. Karena dalam proses tersebut dapat menghasilkan (timbal balik) yang dimana dapat mengetahui apakah komunikasi dapat diterima dengan baik atau tidak. Selain itu kedua proses tersebut dapat memaksimalkan penyampaian informasi dari guru kepada siswanya. Agar informasi yang diberikan oleh guru dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh siswanya. Dengan demikian Guru telah memberikan upaya yang baik melalui menggunakan jenis komunikasi. Pendekatan ini telah berhasil dilakukan namun belum mencapai hasil secara maksimal.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat strategi komunikasi antar pribadi guru dalam perkembangan kepribadian anak-anak cacat. Faktor yang mendukung komunikasi guru terhadap siswa dalam perkembangan kepribadian siswa adalah adanya respon yang baik dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun ketika latihan di dalam kelas. Ketika terdapat respon dari siswa maka komunikasi antara guru dengan siswa dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Adapun faktor penghambat adalah ada beberapa siswa yang senantiasa melakukan kenakalan didalam kelas sehingga mengganggu proses komunikasi yang terlaksana sebagaimana harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad (2006), *Kamus Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta
- Ahmad Fauzi (2004), *Psikolog umum*, Bandung, Pustaka Setia
- A. King Laura (2010), *Psikologi Umum ( Sebuah Pandangan Apresiatif)*, Jakarta : Salemba Humanika
- Ayunin Ciplukz (2012), *Kisah Klasik Penyandang Disabilitas Buku I*, Penitique Publisher, Jakarta
- Azwar, Rasiddin (2001), *Metode Penelitian*, Renika Cipta, Jakarta
- Efendi, Onong Uchjana (2006), *Hubungan Masyarakat*, Remaja Rosdakarya Bandung
- Joseph A. DeVito, *Komunikasi Antarmanusia (Edisi 5)*, Penerbit: Karisma Publishing, Jakarta
- Hartono, Jogianto (2013), *Sistem Teknologi Informasi Bisnis*, Remaja Selemba Empat, Jakarta
- Hikmat, Mahi Mulyana (2010)., *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nani Triani (2010), *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Lamban Belajar (Slow Learner)*, Garis Buku, Jakarta
- Kartini, kartono (2001), *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Renika Cipta.
- Nurjaman, Kadar (2012), *Komunikasi Public Relation Panduan untuk Mahasiswa, Birokrat, dan Praktisi Bisnis*, Pustaka Setia, Bandung
- Murip Yahya (2013), *Profesi Tenaga Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung
- Moleong, Lexy J.,(2007) *Metode Penelitian kualitatif Cet. IV*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Rosady, Ruslan (2004), *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah B., M.Pd. (2008), *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.

Widjaja, H.A.W (2010), *Komunikasi & Hubungan Masyarakat*, Bumi Aksara,  
Jakarta

Wasty Soemanto (2004), *Penganrtar Psikologi*, Jakarta, Bina Aksara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat  
(1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan  
Dosen